repository.ub.ac.id

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI *OPEN GOVERNMENT*

(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO)

SKRIPSI

ROSIDHA

NIM. 145030600111003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI *OPEN GOVERNMENT* (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro)
Disusun Oleh	: Rosidha
NIM	: 145030600111003
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Administrasi Publik
Minat	: Perencanaan Pembangunan

Malang, 16 Agustus 2018

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
M. Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP	**Andy Kurniawan, S.AP, M.AP**
NIP. 19740614 200501 1 001	**NIP. 201107 860320 1 001**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 18 September 2018
Jam	: 11.00-12.00 WIB
Skripsi atas Nama	: Rosidha
Judul	: Strategi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui *Open Government* (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
M. Chazienul Ulum, S.Sos., M.AP	**Andy Kurniawan, S.AP., M.AP**
NIP. 19740614 200501 1 001	**NIP. 201107 860320 1 001**
Anggota	Anggota
Dr. Abdullah Said, M.Si	**Drs. Sukanto, MS**
NIP. 19570911 198503 1 003	**NIP. 19591227 198601 1 001**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 16 Agustus 2018

Rosidha
NIM. 145030600111003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama	: Rosidha
Tempat, Tanggal Lahir	: Lamongan, 10 Februari 1996
Agama	: Islam
Email	: rosidha31@gmail.com
Alamat Tinggal	: Jl. Lettu Suyitno Gg. Eyang Manis Lorong 2 Desa Campurejo, Bojonegoro

Riwayat Pendidikan

1. Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2014-2018)
2. SMA Negeri 2 Bojonegoro (2011-2014)
3. SMP Negeri 1 Bojonegoro (2008-2011)
4. SD Negeri Campurejo 1 (2002-2008)

Prestasi

1. Juara 3 Marching Show Thailand World Music Championships (TWMC) (2016)
2. Juara 3 Individual Contest Pit Ensemble Delta Marching Open Festival Indonesia (D'MOFI) (2016)
3. Juara 9 Divisi Utama Grand Prix Marching Band (GPMB) (2015)

Pengalaman Organisasi

1. Kepala Departemen Administrasi dan Organisasi UKM Marching Band Ekalavya Suara Brawijaya Universitas Brawijaya (2017)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Asisten Pelatih Pit Instrument UKM Marching Band Ekalavya Suara Brawijaya Universitas Brawijaya (2016)
3. Bendahara I Koperasi SMAN 2 Bojonegoro (2013)

Pengalaman Kepanitian

1. Staf Divisi Konsumsi pada Acara Education Show (2016)
2. Koordinator SPV pada Acara Diklat UKM Marching Band ESB ke-7 Univ. Brawijaya (2016)
3. Staf Divisi SPV pada Acara Diklat UKM Marching Band ESB ke-6 Univ. Brawijaya (2015)
4. Bendahara II pada Acara Seminar Bakti Pendidikan Bojonegoro (2015)

Kompetensi Diri

1. Mampu bekerja di lingkungan yang serba cepat
2. Kemampuan baik untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis
3. Terorganisir dan kreatif
4. Sangat antusias untuk memulai pekerjaan dan berkontribusi dengan baik untuk tim

Skripsi ini saya persembahkan kepada sponsor dan supporting system hidup saya
yaitu ibu Kuswati dan bapak Soli serta kedua adik (Ardi dan Fardan)
Ibu Yuniasih
Ibu Yusnawati dan Pak Andy Hartoyo, serta dr. Nannerl Hoetarjo yang sudah
menjadi mentor dan orang tua kedua selama saya di Malang
Para sahabat yang selalu mensupport dalam segala kondisi:
Almh, Dian Kusuma Dewi
Dadang Ardi Pranata
Deliana Swanita
Vivi Ike Ayuningtyas
Ayu Kumala Berliana
Vinda Rahma Aprilia
Konita Itya Permatasari
Keluarga Perencanaan Pembangunan 2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Rosidha, 2018, Strategi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui *Open Government* (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). M. Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP dan Andy Kurniawan, S.AP, M.AP. 150 hlm + xiv

Kepercayaan merupakan hal yang mendasar untuk membangun hubungan antara orang yang satu dengan lainnya. Kepercayaan publik mencakup kepercayaan warga terhadap negara atau pemerintah termasuk di dalamnya ada institusi, kebijakan, para pejabat, dan orang-orang anggota lain yang ada di dalamnya. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah dan anggota masyarakat lain bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk membangun kepercayaan publik dan pendekatan yang digunakan bisa melalui *open government*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, observasi, dokumen, dan juga dokumentasi. Analisis data menggunakan enam langkah dari John Cresswell yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membahas keseluruhan data, membuat *coding* semua data, menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang/partisipan, kategori dan tema yang dianalisis, mendeskripsikan hasil penelitian, pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari segi *political trust* dan *social trust* dapat dikatakan cenderung baik karena realisasi prinsip-prinsip *open government* telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan komitmen yang tinggi. Ruang komunikasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik *offline* maupun *online* membuat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Realisasi pelaksanaan prinsip-prinsip *open government* dalam membangun kepercayaan publik dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Pengaruh lingkungan internal meliputi adanya regulasi nasional dan daerah yang mendukung pelaksanaan *open government*, penguatan SDM, dan pengoptimalan di pemerintahan desa. Kemudian pengaruh eksternal meliputi meningkatnya partisipasi masyarakat, pedoman dari pusat terkait penyusunan rencana aksi *open government*, potensi munculnya *fake* akun dan konflik politik.

Berdasarkan uraian, peneliti memberikan rekomendasi terkait pengoptimalan realisasi prinsip-prinsip *open government*, pengembangan SDM di pemerintahan desa, dan perlunya mengedukasi masyarakat dalam menerima berita.

Kata kunci: **Kepercayaan Publik, Strategi, Keterbukaan Pemerintah**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Rosidha, 2018, The Strategy of Local Government in Building Public Trust through Open Government (Study at Local Government of Bojonegoro Regency). M. Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP and Andy Kurniawan, S.AP, M.AP. 150 page + xiv

Trust is fundamental to build relationships between people. Public trust includes citizens' trust in the state or government, including institutions, policies, officials, and other members of the community within it. Public trust will grow when the government and other community members act according to what is expected. Therefore, a strategy is needed to build public trust and the approach used can be through open government.

This study uses a descriptive method of qualitative approach. Data sources are obtained from informants, observations, documents, and documentation. Data analysis uses six steps from John Cresswell namely processing and preparing data to be analyzed, discussing the entire data, coding all data, applying the coding process to describe settings, people/participants, categories and themes analyzed, describing research results, making interpretations in qualitative research or interpret data.

The results showed that the level of public trust in Bojonegoro Regency which was seen in terms of political trust and social trust could be said to be good because the realization of open government in Bojonegoro Regency which is based on the principles of open government has been carried out by the Bojonegoro Regency government with a high commitment. The communication space provided by the government of Bojonegoro Regency both offline and online has increased public trust in Bojonegoro Regency. Realization of the implementation of open government principles in building public trust is influenced by the internal and external environment. Internal environmental include the existence of national and regional regulations that support the implementation of open government, strengthening human resources, and optimizing the village government. Then external environmental include increased community participation, guidelines from the center related to the preparation of open government action plans, the potential for the emergence of fake accounts and political conflicts.

Based on the description, the author provides recommendations related to optimizing the realization of the principles of open government, developing human resources in the rural local government, and the need to educate society in receiving news.

Keywords: **Public Trust, Strategy, Open Government**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Strategi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui *Open Government* (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang berkat ridho dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
3. Prof. Dr. Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak M. Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP dan Bapak Andy Kurniawan, S.AP, M.AP selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

6. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan terkait perencanaan dan ilmu administrasi selama perkuliahan, serta seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang sudah membantu kebutuhan mahasiswa selama masa perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
7. Semua informan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait kebutuhan data skripsi.
8. Teman-teman Perencanaan Pembangunan angkatan 2014 yang senantiasa saling memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Agustus 2018

Penulis

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

MOTTO i
LEMBAR PERSEMBAHAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iv
LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI v
RINGKASAN vi
SUMMARY vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kontribusi Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
A. Administrasi Publik 11
B. Pemerintahan Daerah 13
C. Kepercayaan Publik 16
1. Arti dan Variasi Kepercayaan 16
2. Urgensi Kepercayaan Publik 22
D. *Open Government* 25
1. Arti *Open Government* atau Pemerintahan Tebuka 25
2. Prinsip-Prinsip *Open Government* 28
3. Langkah-Langkah Menuju *Open Government* 32
E. Strategi 33
1. Arti Strategi 33
2. Manajemen Strategi 35
3. Analisis Lingkungan Strategis 37

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Fokus Penelitian 41
C. Lokasi dan Situs Penelitian 42
D. Jenis Data dan Sumber Data 43
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Instrumen Penelitian 47
G. Analisis Data 48

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

H. Keabsahan Data 52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 54
B. Gambaran Umum Situs Penelitian 55
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro 55
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro 58
3. Bojonegoro Institute (BI) 61
C. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 65
1. Derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 65
2. Realisasi *open government* di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan prinsip-prinsip *open government* 79
3. Analisis lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* di Kabupaten Bojonegoro 93
D. Pembahasan Hasil Penelitian 97
1. Derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 97
2. Realisasi *open government* di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan prinsip-prinsip *open government* 105
3. Analisis lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* di Kabupaten Bojonegoro 124

BAB V PENUTUP 136
A. Kesimpulan 136
B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139
LAMPIRAN 142

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 *Program Experience* yang telah Dilakukan oleh Bojonegoro Institute 63
Tabel 4.2 Data Jumlah Kantor PPID di Kabupaten Bojonegoro 80

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Konsep Kepercayaan 17
Gambar 2.2 Tingkatan Partisipasi Masyarakat 30
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologi 49
Gambar 4.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bojonegoro 54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro 57
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro ... 60
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Bojonegoro Institute 64
Gambar 4.5 Capaian Nilai Tukar Petani, Pengangguran, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2016 67
Gambar 4.6 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2016 67
Gambar 4.7 Daftar Hadir Dialog Interaktif Pimpinan/Kepala OPD 71
Gambar 4.8 Daftar Hadir Dialog Interaktif Staff OPD 72
Gambar 4.9 Daftar Hadir Dialog Interaktif Masyarakat 73
Gambar 4.10 Rangkuman Keluhan/Aspirasi Masyarakat 75
Gambar 4.11 Kerjasama CSO dengan Pemerintah dalam Penyusunan Rencaa Aksi OGP 78
Gambar 4.12 Tranparansi Anggaran Pemkab Bojonegoro dan OPD di Lantai 2 81
Gambar 4.13 Transparansi APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 82
Gambar 4.14 Alur Informasi PPID 83
Gambar 4.15 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan SIAP-LAPOR! 84
Gambar 4.16 Grafik Permohonan Informasi Radio Malowopati 85
Gambar 4.17 Statistik Laju Verifikasi Pengelola Lapor dan Tindak Lanjut OPD 85
Gambar 4.18 E-SAKIP Kabupaten Bojonegoro 87
Gambar 4.19 Dialog Publik 89
Gambar 4.20 Kegiatan Evaluasi Kinerja di Rumah Dinas Bupati 91
Gambar 4.21 Konten Website BOS 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat, kebutuhannya pun semakin bertambah. Kebutuhan yang semakin bertambah ini akan membawa persoalan dalam pemenuhannya. Jika persoalan manusia diakumulasikan sebagai persoalan masyarakat, dan persoalan masyarakat dirumuskan sebagai persoalan negara, maka orang akan menyadari bahwa persoalan tersebut memerlukan suatu tindak pemecahan yang serius. Kondisi ini membuat birokrat pemerintah diminta berpikir, menganalisa, mencari, dan mengajukan premis-premis pemecahan. Apabila pemecahan persoalan tercapai, maka dibutuhkan tindak lanjut dan selanjutnya tindak lanjut ini membutuhkan pengawasan.

Administrasi publik ada untuk mengimplementasikan apa yang telah diputuskan. Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) menyatakan bahwa, administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Administrasi publik sebagai *the work of government* memiliki peran maupun pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara. Cleveland

dalam Keban (2014:15) mengatakan, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, serta lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian tanggung jawab administrasi publik tersebut.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintahan. Pemerintah yang tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya akan memberikan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi. Fiorina dalam Blind (2006:11) menyatakan, *"People trust more governments that can bring about economic growth, create jobs, provide access to education and deliver services in an easy and transparent manner."* Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sebuah negara yang kompeten. Hal ini dikarenakan adanya budaya kepercayaan membuat masyarakat merasa memiliki kesamaan dan potensi dalam keterlibatan pembuatan keputusan kebijakan. Kepercayaan publik kepada pemerintah akan timbul jika memang secara rasional masyarakat melihat dan merasakan kinerja pemerintah untuk kesejahteraan rakyat (Nurmantu, 2018).

Masalah rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dikarenakan rendahnya tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dasarnya. Kepercayaan terhadap pemerintah telah diidentifikasi sebagai suatu hal dasar yang lebih penting di mana legitimasi dan keberlanjutan sistem politik harus dibangun. Kepercayaan

merupakan esensi untuk keterpaduan sosial dan akan menjadi penggerak kemampuan pemerintah dalam mengatur dan memungkinkan mereka bertindak tanpa paksaan. Hal tersebut akan mengurangi biaya transaksi untuk hubungan sosial, ekonomi, politik (Fukuyama dalam Edwards, 2015:1). Di samping itu, kepercayaan publik berakar dari persepsi masyarakat terhadap legitimasi tindakan pemerintah. Contoh, kemampuan pejabat dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan lebih untuk kepentingan umum. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi adalah kuncinya, tetapi integritas juga, termasuk menjaga janji-janji sesuai ekspektasi dengan tidak keluar dari apa yang sebenarnya terjadi (United Nation dalam Edwards, 2015:2).

Membangun negara yang kompeten memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi pada dasarnya memiliki dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi yaitu memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Tujuan kesejahteraan yaitu mengisyaratkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat lokal secara efektif, efisien, dan ekonomis (Domai, 2011:14).

Kabupaten Bojonegoro, sebagai obyek pada penelitian ini memiliki transfomasi yang menarik dalam membangun kepercayaan publik. Sejak awal menjabat sebagai bupati Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2008, Bupati Suyoto sangat sadar bahwa kepercayaan publik bertumpu pada beliau secara personal. Sehingga, menjadi tanggung jawab beliau untuk menstransformasikan kepercayaan publik dari personal ke institusional. Terbangunnya keeratan dan kekuatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dalam berbagai elemen merupakan pengikatnya. Saling percaya tidak hanya secara individual, tetapi juga harus terdorong sebagai institusional dan terimplementasikan sebagai kultural. Dalam pola layanan, tidak hanya sekedar berpikir untuk dirinya sendiri (ego), harus berubah untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan umum (eco), tidak hanya sekedar *serfish*, tetapi harus memberikan layanan yang terumuskan berdasarkan maklumat para pihak utama yang terlayani (*service*).

Tahun 2008, Kabupaten Bojonegoro memiliki tiga masalah utama, yaitu politik uang yang membuat pertumbuhan ekonomi rendah, kemampuan anggaran yang rendah dengan mempunyai hutang sebesar Rp 350 Milyar, di mana hutang tersebut akibat dari pengelolaan pembangunan yang kurang tepat dari pemerintahan sebelumnya. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp 850 Milyar. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten termiskin di Jawa Timur pada tahun 2008. Di samping itu, pastisipasi masyarakat juga rendah. Kemudian, kemiskinan yang endemis sebesar 18,78 persen, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, rendahnya pelayanan pemerintah dan kualitas birokrasi, keterbatasan anggaran, dan korupsi,

membuat masyarakat menuntut adanya perubahan nasib dan perbaikan semangat mental model. Diperlukan suatu tindakan dalam membangun kembali kepercayaan publik (Suyoto, 2016).

Upaya yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membangun kembali kepercayaan publik yaitu dengan pemerintahan yang terbuka (*open government*). Pemerintahan yang terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Hal tersebut mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi. Global Integrity dalam Prakarsa (2017) memberikan pemahaman bahwa melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Keterlibatan publik dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Sedangkan akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya.

Sistem keterbukaan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Undang-undang ini juga mengharuskan pembentukan kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyimpan, mencatat, dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait pelaksanaan *open government* baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati, maupun surat keputusan bupati. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan berbasis Pastisipasi Publik, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melihat dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak ketiga dan pihak internal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, secara umum indeks kepuasan masyarakat Bojonegoro atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 2014 sebesar 65%, padahal pada tahun 2008 hanya 43%. Selain itu, disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro bahwa dari penerapan *open government* telah menjadikan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai daerah percontohan pada ajang *Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program* tiga tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2016, 2017, dan 2018.

Berbagai capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya tidak lepas dari perumusan berbagai strategi. Mengingat bahwa strategi merupakan rencana kegiatan menyeluruh yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci pemilihan strategi seperti apa yang akan digunakan tidak lepas dari adanya analisis lingkungan strategis. Wahyudi dalam Tangkilisan (2007) menyampaikan bahwa lingkungan adalah faktor penting dalam menunjang keberhasilan organisasi maupun institusi. Begitupun dengan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam merealisaikan prinsip-prinsip *open government* untuk membangun kepercayaan publik yang akhirnya bisa meningatkan derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Strategi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui *Open Government*.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimanakah realisasi *open government* di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimanakah lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* untuk membangun kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjawab dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan *political trust* dan *social trust*.
2. Mengetahui dan menganalisis realisasi *open government* di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai penunjang peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Mengetahui dan menganalisis lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* untuk membangun kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Kontribusi Akademis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk akademis mengenai urgensi kepercayaan publik dalam menunjang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
   b. Sebagai bahan referensi tambahan pengembangan disiplin ilmu administrasi publik.
   c. Meningkatkan dan memperdalam daya kreativitas, kualitas, keterampilan, dan kemampuan mahasiswa.

2. Kontribusi Praktis

   a. Membantu mengenalkan Kabupaten Bojonegoro kepada khalayak umum bahwa Kabupaten Bojonegoro yang dulunya kurang dikenal, saat ini mampu menunjukkan eksistensinya hingga tingkat internasional.

   b. Memberikan referensi percontohan pembangunan daerah kepada daerah lain agar bisa belajar dari Kabupaten Bojonegoro.

   c. Sebagai referensi pembaca yang tertarik untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kepercayaan publik melalui *open government*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Secara garis besar berisi tentang pemadatan isi dari masing-masing bab, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini. Lima bab tersebut dengan urutan seperti ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini pembahasan terdiri dari latar belakang pemilihan topik penelitian mengenai alasan yang mendasari penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik melalui *open government*. Ada pula rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

   Bab ini memaparkan tentang teori yang digunakan dan berkaitan dengan topik yang dibahas, di antaranya administrasi publik, pemerintahan daerah, kepercayaan publik, *open government*, dan strategi. Pemilihan teori yang digunakan diharapkan dapat mempermudah pemecahan masalah yang ada.

3. BAB III METODE PENELITIAN

   Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sehingga diuraikan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisa data yang digunakan.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

   Bab ini berisi tentang data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Data disajikan sesuai dengan tiga fokus penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah. Penyajian data disertai dengan bukti pendukung dari informan. Selanjutnya, data yang disajikan akan disinkronisasikan dengan teori yang telah ada pada bab kajian pustaka.

5. BAB V PENUTUP

   Bab ini menyajikan kesimpulan dari data dan hasil pembahasan yang selanjutnya dapat diketahui hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memberikan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Dinamika perkembangan studi administrasi publik berjalan seiring dengan dinamika perubahan negara dan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Caiden menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik. Argumentasi tersebut secara operasionalnya dilakukan lebih banyak atau didominasi oleh birokrasi pemerintahan yang ada di lingkungan eksekutif. Sehingga, Dimock dan Koening mendefinisikan administrasi publik sebagai kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan (Mulyadi, dkk, 2016).

Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas teknis berlandaskan ilmu manajemen untuk mencapai efisiensi yang tinggi, melainkan juga aktivitas-aktivitas politis yang berusaha menafsirkan kehendak publik dan menterjemahkan dalam kebijakan nyata. Administrasi publik juga bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu dari segi materi atau isi, administrasi publik berarti melakukan kebijakan publik dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat umum. Dari segi formal atau bentuk, administrasi publik adalah pengambil keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak. Sedangkan dari segi sosiologis, administrasi publik merupakan bentuk tindakan sosial tertentu yang diorganisir atau serangkaian

proses tindakan sosial yang berlangsung dan dibakukan dalam periode tertentu (Aksa, 2010:129).

Selain itu, administrasi publik mempunyai peran untuk menjaga *public trust* agar legitimasi atau pengakuan politik terhadap eksistensi dan integritas pemerintah tetap terpelihara. Keban (2014) dalam bukunya yang berjudul *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik,* berpendapat bahwa administrasi publik sebagai medan para aparat pemerintah atau eksekutif dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik, maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Administrasi publik dapat dilihat sebagai ajang di mana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar para elit birokrasi dan politisi memenuhi janji-janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka. Hal ini juga didukung oleh pendapat Goodsell (dalam Keban, 2014:8) yang mengatakan adminitrasi publik sebagai upaya menghasilkan *integrated public governance* di mana semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik diintegrasiskan berdasarkan nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keterandalan, transparansi, keterlibatan dan integritas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

B. Pemerintahan Daerah

Amandemen UUD 1945 keempat menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat 1 berbunyi, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang." Sedangkan Pasal 18 Ayat 5 menyebutkan bahwa, "Pemerintahan daerah merupakan daerah otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat."

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah dalam Pasal 1 Ayat 2 yaitu, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas permbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dengan begitu, penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi di mana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah.

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional, mengingat bahwa masyarakat di setiap daerah lokal memiliki keunikan masing-

masing. Melalui desentralisasi akan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana yang telah disinggung dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pada BAB XIV mengenai Partisipasi Masyarakat. Pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat melalui:

1. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
2. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat.
3. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup:

1. Penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.
2. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah.
3. Pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah.
4. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun bentuk partisipiasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Konsultasi publik

   Suatu komunikasi yang bersifat dua arah dalam pelibatan masyarakat untuk perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Musyawarah

   Upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama.

3. Kemitraan

   Hubungan sukarela dan bersifat kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang di dalamnya setuju untuk bekerja sama dalam meraih tujuan dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko, tanggung jawab, sumber daya, kemampuan dan kuntungan secara bersama-sama.

4. Penyampaian aspirasi

   Berupa pemikiran, pendapat, masukan, dan saran terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pengawasan

   Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

C. Kepercayaan Publik

1. Arti dan Variasi Kepercayaan

Kepercayaan merupakan hal mendasar untuk membangun hubungan antara orang satu dengan lainnya. Dengan adanya kepercayaan di masing-masing pihak, apa yang diharapkan oleh seseorang akan mudah dipenuhi oleh seseorang lainnya. Wheeless dan Grotz berpendapat bahwa kepercayaan terjadi ketika pemegang kekuasaan memberikan persepsi yang baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya daripada yang kurang dipercayai. Di sisi lain, Fukuyama mengatakan jika kepercayaan adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik (Blind, 2006:3).

Kepercayaan merujuk pada ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah yang mereka miliki. Bagaimana pemerintah harus beroperasi dan berinteraksi dengan institusi sosial maupun ekonomi lain berserta masyarakatnya, kebiasaan pemimpin politik, dan melayani masyarakat. Ketika masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi, hal yang sering menjadi masalah dalam hubungan parlemen dan apa yang direpresentasikan adalah ekspektasi tersebut menjadi menurun dengan mudah akibat hasil yang sering tidak sesuai. Kebalikannya, ekspektasi yang rendah pada institusi tertentu dapat diartikan bahwa institusi tersebut terkadang relatif lebih mudah untuk menjaga kepercayaan.

Ketika kepercayaan telah dirusak, proses pemulihan kembali untuk membangun kepercayaan itu yang lama dan sulit. Institusi dan pembuat kebijakan kemudian dihadapkan tantangan untuk menyusun ulang tujuan apa yang ingin dicapai, menggunakan proses keberlanjutan, mendorong legitimasi kebijakan dalam penyusunan kebijakan, menstransparansikan komunikasi dengan masyarakat dan mengukur hasil implementasi, mendemostrasikan akuntabilitas terhadap hasil pengukuran kinerja, serta menjaga komitmen mereka selama proses tersebut.

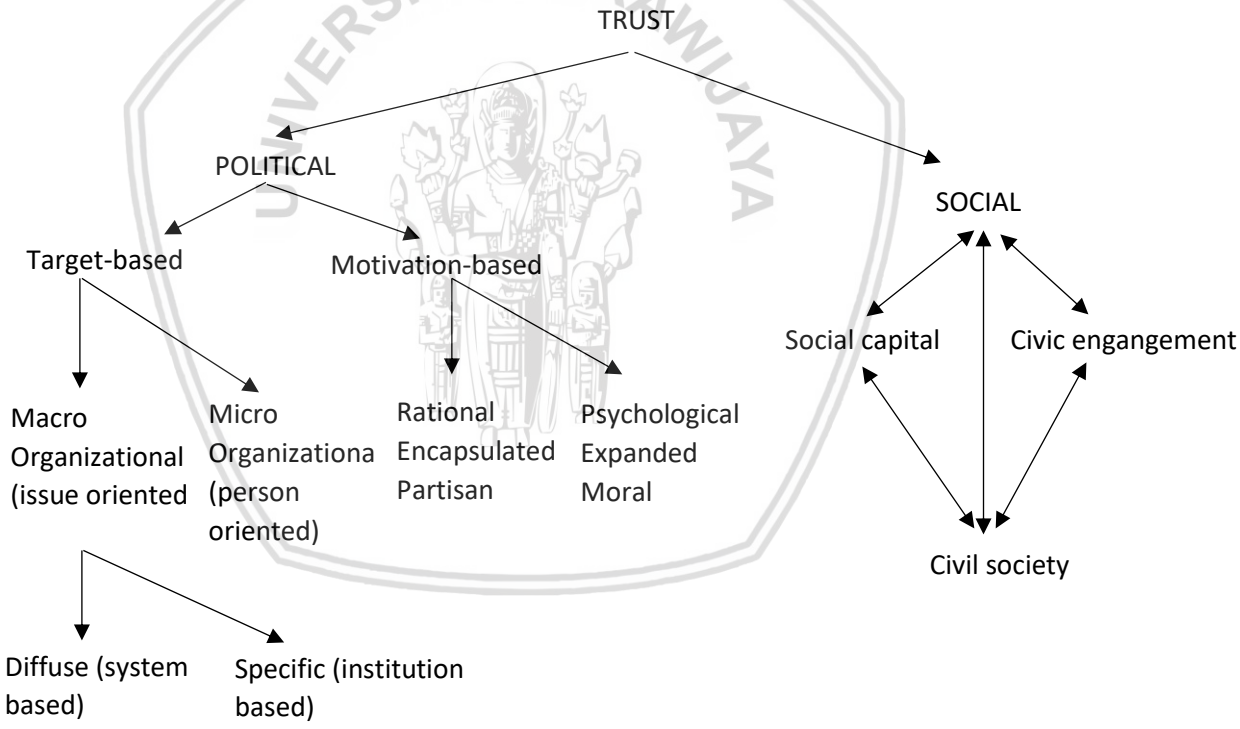

Gambar 2.1 Peta Konsep Kepercayaan

Sumber: Blind, 2010:26

Kepercayaan secara umum memiliki dua variasi, yaitu *political trust* dan *social trust*. Kepercayaan politik akan terjadi ketika masyarakat menilai pemerintah, kebijakan yang dibuat, dan pemimpinnya sebagai sesuatu yang bisa menjaga janjinya, jujur dan adil. Dengan kata lain, Miller dan Listhaug dalam Blind (2010:23) mengungkapkan kepercayaan politik adalah penghakiman warga negara bahwa sistem dan pelaku politiknya responsif, dan akan melakukan apa yang benar meski tanpa pengawasan terus-menerus.

Kepercayaan politik dapat diarahkan pada sistem politik dan organisasi politik atau sama halnya individu pemegang jabatan politik. Kategori pertama dari kepercayaan politik, yaitu *macro level* atau *organizational trust*. Hal ini mengarah pada perspektif orientasi isu di mana masyarakat menjadi percaya atau tidak terhadap pemerintah "karena mereka merasa puas atau tidak puas dengan alternatif kebijakan" (Miller dalam Blind, 2010:23). Kepercayaan organisasi politik dapat dibagi lagi dalam komponen *diffuse* atau *system based trust* dan *specific* atau *institution based trust*. *Diffuse political trust* mengacu pada evaluasi masyarakat terhadap kinerja sistem dan rezim politik secara keseluruhan. Sedangkan *specific political trust*, ditujukan pada institusi politik tertentu, seperti kongres atau kekuatan keamanan setempat. Kategori kedua dari kepercayaan politik adalah *micro level* atau *individual political trust*. Hal ini mencakup perspektif orientasi seseorang di mana masyarakat percaya atau tidak kepada pemerintah "karena persetujuan atau ketidaksetujuan beberapa pemimpin politik" (Citrin dalam Blind, 2010:24).

Selain hal di atas, kepercayaan politik juga mempunyai variasi berdasarkan tipe motivasi seseorang ketika mereka mempercayai lembaga-lembaga maupun pemimpin. Dengan demikian, kepercayaan politik dapat didasarkan pada penalaran rasional atau model penalaran psikologis, atau kombinasi dari keduanya (Leach dan Sabatier dalam Blind, 2010:24). *Rational political trust* didasarkan pada evaluasi masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin apakah tindakannya sesuai dengan agenda yang ditetapkan. Masyarakat akan mengikuti prinsip *rational political trust*, sehingga pemimpin politik harus menjaga kepercayaan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat. *Psychological political trust* meliputi penilaian nilai moral dan atribut pemerintah, institusi politik, dan pemimpin politik. Seseorang mencari keseriusan dan sifat yang sebenarnya melalui kepribadian, kehadiran di forum publik, dan kebiasaan dari pemimpin politik mereka.

Analisis kepercayaan politik yang dikelompokkan dalam beberapa kategori di atas mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Variasi yang berbeda-beda dari kepercayaan politik secara inklusif berganti-ganti dan mungkin cenderung berkerja sama. Kurangnya kepercayaan terhadap pemegang jabatan tertentu secara langsung dapat mentransformasikan dirinya dalam ketidakpercayaan intitusi politik yang berbeda. Seseorang dalam mempercayai representasi pemegang jabatan dan institusi politik dengan mengkombinasikan prinsip dari rasional dan psikologikal kepercayaan politik. Legitimasi dan daya tahan sistem demokrasi dengan kata lain

tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah, apakah sudah benar dan adil.

Kepercayaan politik tidak muncul begitu saja pada ruang yang kosong. Kepercayaan sosial mengacu pada kepercayaan warga negara yang satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat sosial, sehingga tidak dapat dipisahkan dari gagasan kepercayaan politik. Ketika kepercayaan sosial tinggi, masyarakat akan lebih percaya antara satu dengan lainnya sehingga dapat menyatukan usaha mereka untuk mencapai tujuan umum dan saling bermanfaat. Berdasarkan teori unggulan dari Putnam mengenai *social capital*, keterlibatan masyarakat dalam sebuah komunitas dan kepercayaan interpersonal di antara para anggota, saling berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan sosial secara menyeluruh dalam masyarakat tertentu. Selain itu, Keele juga menyetujui bahwa *social capital* memiliki pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap kepercayaan dan kinerja pemerintah (Blind, 2010:25).

Teoris modernisasi seperti Almond dan Verba serta Finifter, mempunyai cara untuk menjaga peningkatan kepercayaan sosial yang diasosiasikan dengan peningkatan partisipasi politik, terutama dalam bentuk voting. Secara umum hal tersebut telah diterima untuk meningkatkan partisipasi pada kepecayaan politik dan demokrasi.

Social capital dapat didefinisikan sebagai "pelumas interaksi antar seseorang" selama ada fasilitas tindakan kolektif dan kolaboratif (Arrow dalam Blind, 2010:26). Namun, hal ini tidak harus diartikan bahwa *social*

capital maupun kepercayaan sosial dapat dengan mudah mengubah diri seseorang ke dalam kepercayaan politik pada setiap masyarakat dan kapanpun mereka mau. Veenstra menunjukkan bahwa di Canada partisipasi dalam beberapa organisasi masyarakat sipil meningkatkan kepercayaan sosial, tetapi tidak untuk kepercayaan politik. Temuan ini dan beberapa temuan serupa membawa sekelompok para ahli yang disebut *new institutionalist* untuk mempertahankan bahwa hal itu bukan modal sosial yang bisa menghasilkan kepercayaan politik. Perbedaan perspektif dalam hubungan kepercayaan politik dan kepercayaan sosial muncul dari pengalaman mengembangkan dan dikembangkannya dunia. Sedangkan ditingkatkannya keterlibatan masyarakat membawa peningkatan kepercayaan kinerja politik dan sosial dalam industrialisasi dunia. Brehm dan Rahn menemukan hubungan yang negatif antara keterlibatan masyarakat dengan kepercayaan politik dalam mengembangkan dunia. Newton di sisi lain menemukan hubungan yang tidak signifikan. Espinal dan Hartlyn dalam kasus di Republik Dominican peningkatan keterlibatan masyarakat menurunkan kepercayaan politik karena masyarakat menemukan institusi pemerintahnya korupsi.

Melihat dari berbagai hubungan antara keterkaitan kepercayaan politik dengan kepercayaan sosial, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kepercayaan sosial dan kepercayaan politik memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kepercayaan sosial memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan kepercayaan politik

memberikan kontribusi untuk keharmonisan politik yang lebih besar dan saling memahami pada perbedaan politik.

2. Urgensi Kepercayaan Publik

Kepercayaan pada pemerintah sangat penting untuk keterlibatan sosial dan kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengatur dan memungkinkan pemerintah bertindak tanpa paksaan. Ketika masyarakat mempercayai pemerintah, hal itu berarti masyarakat memiliki kepercayaan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ekspektasinya. Adanya kepercayaan publik juga memberikan legitimasi terhadap pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Burnet et al dalam Baradei (2015:2), *"Public trust in the motives, effevtiveness and transparency of government is an essential dimension of institutional legitimacy."* Pernyataan senada juga dinyatakan oleh *United Nation* dalam Edwards (2015:2) bahwa, kepercayaan publik berakar dari persepsi masyarakat terhadap legitimasi tindakan pemerintah, misalnya kemampuan pejabat dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan berguna untuk kepentingan umum. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi adalah kuncinya, begitu juga dengan integritas, termasuk menepati janji sehingga ekspektasi sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pengemudi efektivitas pemerintah, pembangunan ekonomi, dan ukuran hasil tindakan pemerintah. Percaya pada pemerintah juga memobilisasi keterlibatan masyarakat untuk

pemerintahan terbuka dan proses inklusif. Tingkat kepercayaan ini dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah itu handal, responsif dan adil, mampu melindungi masyarakat dari resiko, serta penyampaian pelayanan publik secara efektif.

Faktor dalam menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah ada banyak. Cheema (2010) dalam karyanya yang berjudul *Building Trust in Government: An Introduction* memaparkan ada lima faktor yang menentukan kenaikan dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu:

1. Kebijakan dan mekanisme implementasi yang efektif untuk menghasilkan hasil positif bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan kepercayaan terhadap pemerintah.

   Kredibilitas dan dukungan untuk kebijakan publik memberi arahan kepercayaan publik dan menciptakan lapangan kerja yang seimbang untuk bisnis, sehingga berkontribusi pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Bagian penting dari kepercayaan pada pemerintah dapat dijelaskan melalui tingkat dukungan publik terhadap seperangkat kebijakan. Dengan tingkat akses informasi yang tinggi, masyarakat berada pada posisi yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap hasil kebijakannya.

2. Pemimpin politik yang berkomitmen dan inspiratif

   Rondinelli dan Heffron (dalam Cheema, 2010:6), pemimpin politik yang berkomitmen dan inspiratif dapat mempromosikan kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan publik kepada pemerintah akan

meningkat apabila pemimpin memiliki visi masa depan dan kemampuan untuk mengambil tindakan mewujudkan perubahan melalui ketegasan, persuasi, dan pembentukan koalisi.

3. Pertumbuhan ekonomi dan perluasan ekonomi yang tersedia bagi warga negara

   Ketika ekonomi berkembang, kesempatan kerja yang lebih besar tersedia, dan basis sumber daya yang terkait dengan jumlah populasi menguntungkan, maka masyarakat akan cenderung lebih menerima kelemahan kebijakan dan program publik. Hal ini menjelaskan mengapa kepercayaan publik pada pemerintah lebih tinggi di negara non-demokratis dengan ekonomi yang sedang meningkat daripada di negara-negara demokratis dengan kinerja ekonomi yang buruk. Ekonomi yang stagnan dengan peluang ekonomi yang terbatas bagi masyarakat, cenderung memunculkan budaya sinisme dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

4. Penyediaan dan penyampaian layanan

   Penyediaan dan penyampaian layanan meliputi air, sanitasi, perawatan kesehatan, dan Pendidikan sangat penting untuk menginspirasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagian besar kota di negara berkembang, antara 10 dan 30 persen penduduk perkotaan tinggal di pemukiman kumuh dengan akses yang tidak memadai. Daerah pedesaan, terutama daerah terpencil, masyarakat miskin kurang mendapatkan layanan dasar. Untuk mendapatkan dukungan warga,

pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pilihan kebijakan yang akan diadopsi, dilembagakan, dan kemudian dilaksanakan. Inovasi manajemen dalam organisasi sektor publik sangat diperlukan untuk pengembangan nilai-nilai inti pelayanan publik guna memfasilitasi akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap layanan publik dasar.

5. Tata pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif

Tata pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif semakin mendapat pengakuan dari masyarakat internasional sebagai landasan bagi keberhasilan pencapaian berbagai tujuan kebijakan intrenasional dan domestik, termasuk agenda pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, sebagai dasar pemilihan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, termasuk tata kelola administrasi publik dan layanan sipil, peraturan hukum, hak asasi manusia, kebijakan makro ekonomi, serta proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif.

D. *Open Government* atau Pemerintahan Terbuka

1. Arti *Open Government* atau Pemerintahan Terbuka

Keterbukaan pemerintah dan pemenuhan hak atas informasi bagi publik merupakan elemen penting dalam proses pembangunan negara demokrasi. Hak atas informasi juga telah diakui sebagai norma universal yang dibuktikan dengan tercantumnya pemenuhan hak tersebut dalam berbagai kerangka

internasional. Di antaranya dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB) dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Selain itu, *United Nation Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression* menyatakan bahwa adanya hak atas informasi memberikan kewajiban positif bagi negara untuk memastikan akses terhadap informasi. Sementara di Indonesia, hak untuk tahu yang melekat pada setiap warga negara juga telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Open government dapat diartikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam literatur mengenai *Open Government: The Global Context and The Way Forward* mendefinisikan *open government* sebagai, *"A culture of governance based on innovative and sustainable public policies and practices inspired by the principles of transparency, accountability, and participation that fosters democracy and inclusive growth."*

Global Integrity memberikan pemahaman bahwa *open government* mencakup tiga hal, yaitu transparansi informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Keterlibatan publik dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Sedangkan akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Pemahaman senada juga diutarakan oleh Febrianingsih yang mendefinisikan *open government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya (Prakarsa, 2017).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro memberikan rincian ciri-ciri pemerintahan terbuka sebagai berikut:

a. Pemerintah yang mendengarkan *(listening government),* baik mendengarkan secara langsung atau dengan perantara media komunikasi digital.
b. Pemerintah yang bersedia memberikan informasi dan mendidik, yaitu menginformasikan segala kegiatan yang telah, akan dan sudah dilakukan, serta tidak dilakukan, termasuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan adalah hal yang harus diinformasikan.
c. Jalinan yang kuat dengan rakyat, yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan program-programnya.
d. Perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum minoritas, kritikus, bahkan hingga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pun, pemerintah harus memberikan perlakuan perlindungan.

2. Prinsip-Prinsip *Open Government*

a. Transparansi

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Sabarno (dalam Prakarsa, 2017:15) menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Sebagimana yang diungkapkan oleh Krina (dalam Prakarsa 2017:15), transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi pemerintahan dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut ini (Prakarsa, 2017:16):

1. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodi. Krina mendeskripsikan akuntabilitas sebagai prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan (Prakarsa, 2017:16).

Secara internal, pertanggungjawaban dapat berupa hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi atau pihak yang memberikan kewenangan. Hasil kerja diberikan dalam bentuk laporan untuk diukur sejauh mana pencapaian yang telah dilaksnakan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk pertanggungjawaban eksternal bisa dengan menyediakan akses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses ini, masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan serta laporan jika ada penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam mendukung upaya pemerintah mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah partisipasi masyarakat.

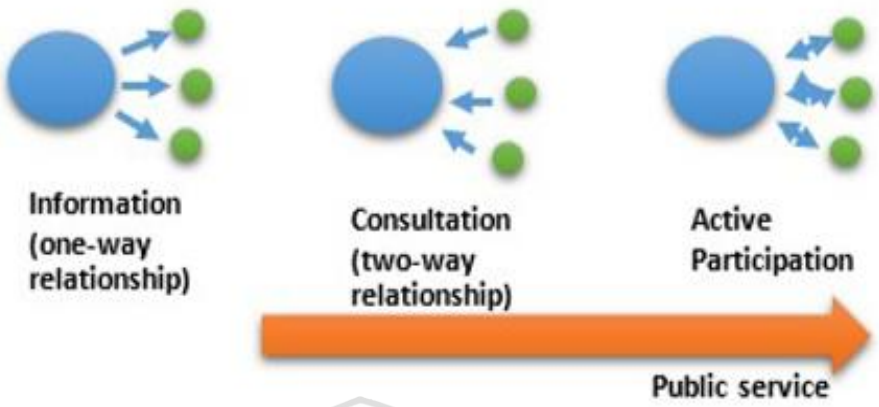

Gambar 2.2 Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memepengaruhi Pembuatan Kebijakan

Sumber: Prakarsa, 2017:17

Berdasarkan gambar di atas, yang dimaksud dengan informasi *(one-way relationship)* adalah pemerintah membuat kebijakan dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh masyarakat. Konsultasi *(two-way relationship)* yaitu masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah. Partisipasi aktif didasarkan adanya keterlibatan masyarakat dengan pemerintah, di mana masyarakat terlibat dalam proses dan isi kebijakan yang nantinya akan menimbulkan interaksi mutualisme. Partisipasi dalam siklus kebijakan berfungsi untuk meningkatkan integritas dalam sektor publik secara keseluruhan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

1. Masyarakat terlibat dalam pengawasan, evaluasi anti korupsi dalam siklus kebijakan.
2. Masyarakat terlibat dalam *good governance* implementasi kebijakan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi publik, termasuk pelaporan dan mekanisme *feedback*).
3. Saluran umpan balik untuk menutup celah dan mengatasi kesalahan pengelolaan.
4. *Lobbying* rutin sebagai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan.

d. Inovasi dan Teknologi

Era modern yang didukung oleh teknologi digitalisasi membuat perubahan yang relatif lebih cepat. Birokrasi harus memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk dapat berperan di lini kehidupan masyarakat. Bahkan di sisi lain ada yang menyatakan bahwa inovasi harus menjadi aktivitas inti pada sektor publik. Hal ini disampaikan oleh Mulgan dan Albury dalam Noor (2013:15), "Inovasi harus menjadi kegiatan inti pada sektor publik: inovasi membantu pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja dan menambah nilai publik, respon terhadap ekspektasi masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan pengguna, meningkatkan efisiensi pelayanan dan meminimalisasi biaya. Keberhasilan pemerintah pada inovasi berguna untuk membangun cara yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan, penyelesaian masalah, dan penggunaan sumber daya serta teknologi."

Teknologi menawarkan kesempatan untuk berbagi informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi. Dapat juga dimanfaatkan untuk memberi informasi lebih banyak kepada publik dengan cara yang memungkinkan orang memahami apa yang pemerintah lakukan untuk mempengaruhi keputusan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan ruang *online* yang mudah diakses dana man sebagai *platform* untuk memberikan layanan, melibatkan masyarakat, dan berbagi informasi serta gagasan.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga dapat berdampak besar pada kemampuan sektor publik untuk membuat keputusan berdasarkan bukti. Sehingga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan dan mengarah pada peningkatan kinerja sector publik dalam bentuk kebijakan, layanan dan komunikasi yang lebih baik dengan warga dan dunia bisnis. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan yaitu, teknologi adalah pelengkap, bukan pengganti, untuk informasi yang jelas dan berguna (Prakarsa, 2017:22).

3. Langkah-Langkah Menuju *Open Government*

Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan *open and transparency government* menurut Santoso dalam Koalisi untuk Kebebasan Informasi (2003:xii) yaitu dengan mengembangkan dan merealisasikan lima hak publik:

a. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya *(right to observe)* sebagai bagian dari pengaktualisasian prinsip transparansi.
b. Hak untuk mendapatkan atau mengakses informasi *(public access to information)* sebagai cara mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat yang berkualitas. Tanpa informasi yang benar, akurat, dan *real time*, partisipasi masyarakat dalam proses pergantian keputusan publik menjadi kurang bermakna.
c. Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik *(right to participate)*. Partisipasi yang hakiki dalam proses pembentukan kebijakan publik sangat penting untuk menghindari

kebijakan publik yang tidak mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik.

d. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers *(free and responsible pers).*

e. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak satu sampai dengan empat diabaikan *(right to appeal),* baik melalui upaya banding administrasi maupun ajudikasi dengan menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase, maupun pengadilan.

Upaya untuk memenuhi hak atas informasi publik telah mendorong pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor (UU KIP) 14 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2010. Beberapa pengaturan pokok yang terkandung dalam undang-undang tersebut, di antaranya:

1. Setiap badan publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik.
2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak atau tidak permanen.
4. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
5. Informasi publik bersifat proaktif.
6. Informasi publik harus bersifat utuh,akurat, dan dapat dipercaya.
7. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen.
8. Ancaman pidana bagi penghambat informasi.

E. Strategi

1. Arti Strategi

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Institusi

maupun organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan.

Ditinjau dari perspektif manajemen, strategi merupakan upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar secara keseluruhan.

Strategi dapat diartikan sebagai rencana kegiatan menyeluruh yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Menurut Clandler (1962), *strategy is determination of the basic long term goals and objective of an enterprise, and the adoption of the courses of action and the allocation of recources necessary for carrying out these goals.* Di sisi lain, Andrew & Drucker (1971) mengartikan strategi sebagai "*the pattern of objectives, puposes, or gooals and major policies and plans for achieving these goals, stated in such a way as to define what business, the company is in or to be in and the kind of company it is or to be.*" Kemudian menurut Hofer & Schendel (1978), strategi adalah "*fundamental pattern of present and planned resources deployments and environmental interactions that indicates how the organization will achieve its objectives*" (Tangkilisan, 2007:253).

Berdasrkan tiga definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa strategi merupakan suatu tindakan yang menyinggung masalah bagaimana

penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.

2. Manajemen Strategi

Manajemen strategi berkaitan dengan pengelolaan berbagai keputusan strategis yang akan mempengaruhi keberadaan organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial (Wheelen & Hunger) yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana (Pearce & Robinson) dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif (Solihin, 2012:64). Kemudian menurut Sofyan (2015:4), manajemen strategi merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam kondisi lingkungan organisasi yang selalu berubah-ubah. Kondisi ini membutuhkan antisipasi dini yang sebelumnya belum pernah terjadi, sehingga disampaikan oleh Bryson dalam Tangkilisan (2007:254) bahwa institusi maupun organisasi mau tidak mau harus melakukan tiga hal berikut ini:

a. Institusi atau organisasi harus berpikir strategis, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya.
b. Institusi atau organisasi harus menterjemahkan *input*nya untuk strategi yang efektif guna menanggulangi lingkungannya yang telah berubah.
c. Institusi atau organisasi harus mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strateginya.

Kegunaan praktis yang diperoleh dari aplikasi teknik-teknik yang dikembangkan oleh manajemen strategik (Bryson dalam Tangkilisan, 2007:254), yaitu:

a. Pengembangan strategi-strategi yang efektif.
b. Memperjelas arah masa depan.
c. Menciptakan prioritas.
d. Membuat keputusan saat ini dengan mempertimbangkan konsekuensi masa yang akan datang.
e. Mengembangkan landasan yang kokoh bagi pembuatan keputusan.
f. Membuat keputusan yang melampaui fungsi dan struktur yang ada.
g. Memecahkan masalah pokok yang dihadapi.
h. Memperbaiki kinerja institusi.
i. Menangani kondisi lingkungan yang cepat berubah.

Sehingga, manajemen strategi akan memberikan gambaran kepada pengambil keputusan mengenai bagaimana suatu institusi dapat digerakkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dengan mengolah secara efektif faktor-faktor strategis yang ada.

Penerapan teknik manajemen strategik akan berjalan baik dan berhasil ketika mempertimbangkan delapan langkah pokok berikut ini (Bryson dalam Tangkilisan, 2007:255):

a. Memprakarsai dan meminta persetujuan terhadap suatu proses manajemen atau perencanaan strategis. Untuk itu perlu dilakukan negoisasi dengan para pengambil keputusan untuk memperolah dukungan dan komitmen dalam pelaksanannya nanti.
b. Mengidentifikasi mandat institusi atau organisasi. Suatu mandate di dalamnya terkandung hal-hal yang harus atau dapat dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan.
c. Memperjelas misi dan nilai-nilai institusi atau organisasi. Penting untuk diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sebagai tujuan, termasuk di dalamnya kebutuhan sosial atau politik yang ingin dicapai.
d. Menilai lingkungan eksternal yang menyangkut peluang maupun ancaman yang ada.
e. Menilai lingkungan internal yang berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki institusi maupun kelemahan yang ada. Institusi dalam hal ini dapat memantau sumber daya sebagai *input* dan strategi sebagai proses dan kinrja yang diperoleh sebagi *output*.
f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, antara lain menyangkut tujuan, cara, falsafah, lokasi, keakuratan waktu, dan kelompok-kelompok yang memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian jika strategi baru dijalankan.
g. Merumuskan strategi untuk mengolah atau menangani isu-isu yang ada.

h. Menciptakan suatu visi institusi atau organissai yang efektif bagi masa depan.

3. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi apa yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan. Institusi atau organisasi tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya dan selalu dihadapkan pada kondisi lingkungan yang selalu beraneka ragam. Lingkungan sebagai salah satu faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Pengertian lingkungan menurut Salusu (1996) yaitu hal-hal yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan organisasi. Sedangkan Wahyudi (1996) mengemukakan bahwa lingkungan adalah salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan organissai dalam persaingan. Di samping itu, Wahyudi membagi lingkungan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pembagian ini didasarkan pada kontrol atau pengaruh organisasi terhadap lingkungan-lingkungan tersebut (Tangkilisan, 2007).

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah lebih pada menganalisis intern organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap bagian, seperti wawasan dan pengalaman sumber daya manusia, keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia, manajemen dan struktur organisasi, budaya organisasi, kondisi keuangan, serta layanan yang diberikan. Setiap kegiatan yang dilakukan dengan baik oleh organisasi tersebut atau setiap sumber daya unik yang dimilikinya disebut kekuatan.

Sedangkan kelemahan adalah kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh organisasi tersebut atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimilikinya.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan suatu kekuatan yang berada di luar organisasi di mana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya (*uncontrollable*), sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi kinerja semua organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Oleh karena itu, agar organisasi sukses dalam jangka panjang, maka harus seirama dengan lingkungan eksternal. Harus ada kesesuaian strategis antara keinginan lingkungan dengan apa yang ditawarkan oleh organisasi. Demikian juga antara kebutuhan organisasi dengan apa yang dapat disediakan oleh lingkungan. Adapun dimensi analisis lingkungan eksternal, yaitu:

1. Teknologi

   Tren perubahan teknologi atau penerapan teknologi yang berkembang di organisasi merupakan salah satu dimensi dalam analisis lingkungan yang selanjutnya akan mempengaruhi strategi. Perubahan teknologi akan menghadirkan peluang dan sebaliknya dengan adanya alternatif teknologi baru juga akan menghadirkan ancaman.

2. Dampak teknologi baru

   Hal ini merupakan masalah penting karena terkadang menjadi masalah kritis untuk mengatasi transisi perubahan ke teknologi baru. Di satu sisi membuat organisasi sukses, tapi di satu sisi juga bisa membuat organisasi menjadi tidak sehat.

3. Pemerintah

   Adanya perubahan dan munculnya undang-undang atau peraturan baru dapat menampilkan ancaman dan peluang.

4. Ekonomi

   Evaluasi strategi termasuk mempertimbangkan tentang ekonomi, terutama inflasi dan dasar kondisi kesehatan ekonomi yang diukur dari tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Analisis lingkungan dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peluang yang bisa muncul serta ancaman yang bisa terjadi akibat adanya perubahan-perubahan. Selain itu, agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi dengan cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi. Pada setiap sektor lingkungan, terdapat banyak sub faktor yang masing-masing saling berinteraksi membentuk satu kekuatan yang pada akhirnya mempengaruhi strategi organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Jika dianalisis, data lingkungan akan membentuk sekumpulan isu strategis di mana tren dan perkembangan dapat digunakan untuk menentukan kondisi yang akan datang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengenai Startegi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui *Open Government*. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Sugiyono (2016:15) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Hal ini dikarenakan filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Sehingga, dapat disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi motivai, tindakan, dan lain-lain secara holisti. Kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6).

Peneliti melakukan penelitian ke lokasi dan situs penelitian menggunakan catatan lapangan, teknik wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya diubah menjadi sebuah rangkaian representatif pada penelitian kualitatif. Melihat dari penjelasan di atas, penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

diharapkan akan membantu mempermudah dalam menganalisis rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti karena bertujuan menggambarkan realisasi *open government* yang telah dirumuskan untuk membangun kepercayaan publik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan subjek tujuan untuk melihat fenomena yang terjadi atau sedang berlangsung. Pernyataan dari Sugiyono (2016:285) memberikan gambaran bahwa gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Oleh karena itu, diperlukan fokus penelitian untuk membatasi luasnya masalah yang masih bersifat umum.

Fokus penelitian dari Strategi Pemerintah Daerah dalam Membanguna Kepercayaan Publik melalui *Open Government*, yaitu:

1. Derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro terhadap Pemeritah Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari:
   a. *Political trust*
   b. *Social trust*
2. Realisasi *open government* di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan realisasi prinsip-prinsip *open government* yang meliputi:
   - Transparansi
   - Akuntabilitas

- Partisipasi
- Inovasi dan Teknologi

3. Lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* untuk membangun kepercayaan publik, melalui:
   - analisis lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
   - analisis lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bojonegoro telah berhasil melaksanakan *open government* untuk meningkatkan kepercayaan publik.
2. Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang *"Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program"* atau percontohan pemerintahan daerah terbuka pada tahun 2016.

Situs penelitian merupakan tempat di mana peneliti dapat memperoleh hasil yang akurat dan terjamin keabsahannya. Situs penelitian yang dipilih yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
3. Bojonegoro Institute (BI)

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data menurut cara memperoleh yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sugiyono (2010:137) menyatakan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dan Bojonegoro Institute (BI).

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dalam dokumen yang berkaitan dengan data derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro dan bentuk-bentuk realisasi *open government.*

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan tempat di mana ditemukan informasi dan data yang penting serta dapat menunjang penelitian dari mana data diperoleh. Sumber data dari penelitian ini yaitu:

a. Informan

Dijelaskan oleh Sugiyono bahwa dalam penelitian kualitatif tidak mengenal konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan infromasi data (Sugiyono, 2007:62). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, di antaranya Kasubid Sospol dan Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Direktur Bojonegoro Institute.

b. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan. Menurut Sugiyono (2005:82), dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan misalnya, catatan harian, *life histories*, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Bentuk gambar bisa berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Kemudian bentuk karya contohnya, karya seni berupa gambar, patung, film, dan lainnya.

Sumber data bertujuan untuk melengkapi, mendukung dan memperkaya data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dijadikan sebagai sumber data, antara lain: RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, Rencana Aksi OGP Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2016-2017, dan Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling utama dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:308). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

   Dikemukakan oleh Stainback dalam Sugiyono (2016:318) bahwa, *"interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation of phenomenon than can be gained through observation alon."* Sehingga, melalui wawancara akan diketahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

   Penelitian kualitatif memiliki bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data, yaitu pemilihan informan. Berikut ini adalah informan yang diwawancarai oleh peneliti:

   a. Bapak Maspriyadi selaku Kasubid Sospol dan Pemerintahan
   b. Bapak Sigit Jatmiko selaku Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik

c. Bapak Heri Widodo selaku Camat Gondang
d. Bapak Edi Sampurno selaku Kepala Desa Campurejo
e. Mas Aw. Syaiful Huda selaku Direktur Bojonegoro Institute
f. Mas Nasruli Chusna selaku Sekretaris Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro (YKIB)
g. Mas Tulusno Budisantoso selaku pegiat AJI (Aliansi Jurnalistik Indepeden)
h. Mas Khorij Zainal Ashrori selaku Redaktur Radar Bojonegoro

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara mendalam. Data yang diperoleh dalam observasi adalah berupa catatan lapangan yang kemudian dikumpulkan secara sistematis. Salah satu manfaat observasi menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:226) adalah peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Kegiatan observasi ini dilakukan peneliti dengan datang ke kantor BAPPEDA, Dinas Kominfo, dan Sekretariat Bojonegoro Institute untuk mencari data yang dibutuhkan dan mewawancarai pihak yang menjadi informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lembaran agenda, dan sebagainya. Menurut Moleong (2008),

bentuk dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan studi dokumentasi, antara lain:

a. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi dapat berupa catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.

b. Dokumen resmi

Dokumen resmi dapat berupa dokumen internal atau dokumen eksternal. Dokumen internal contohnya, catatan berupa memo, pengumuman instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain-lain. Sedangkan dokumen eksternal berupa bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga nasional, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain-lain.

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, Rencana Aksi OGP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016-2017, dan Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

   Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian karena peneliti yang bertanggungjawab untuk memahami metode penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan teori, serta penyajian data penelitian (Sugiyono, 2016:205).

2. Pedoman wawancara (*Interview guide*)

   Pedoman wawancara digunakan untuk mempermudah proses wawancara. Berisi serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait, sehingga akan membantu mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data.

3. Perangkat penunjang

   Perangkat penunjang dalam penelitian ini berupa perlengkapan yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian, seperti catatan lapangan, kamera, dan alat perekam. Perlengkapan tersebut berguna untuk mencatat informasi yang bersifat verbal selama penelitian berlangsung.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan sumber data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data untuk kemudian diolah menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bogdan dalam Sugiyono (2016:334) bahwa analisis data merupakan proses sistematis dalam menyusun transkip wawancara, catatan lapangan, dan material lain yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman serta dapat mempresentasikan temuan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menurut John C. Creswell dengan pendekatan fenomenologi. Teknik ini dipilih karena mempermudah peneliti dalam menyajikan hasil penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan fokus yang telah ditentukan sebelumnya dan mencegah masuknya data yang tidak relevan dalam hasil penelitian. Teknik analisis yang dikemukakan oleh Creswell digambarkan melalui bagan berikut ini.

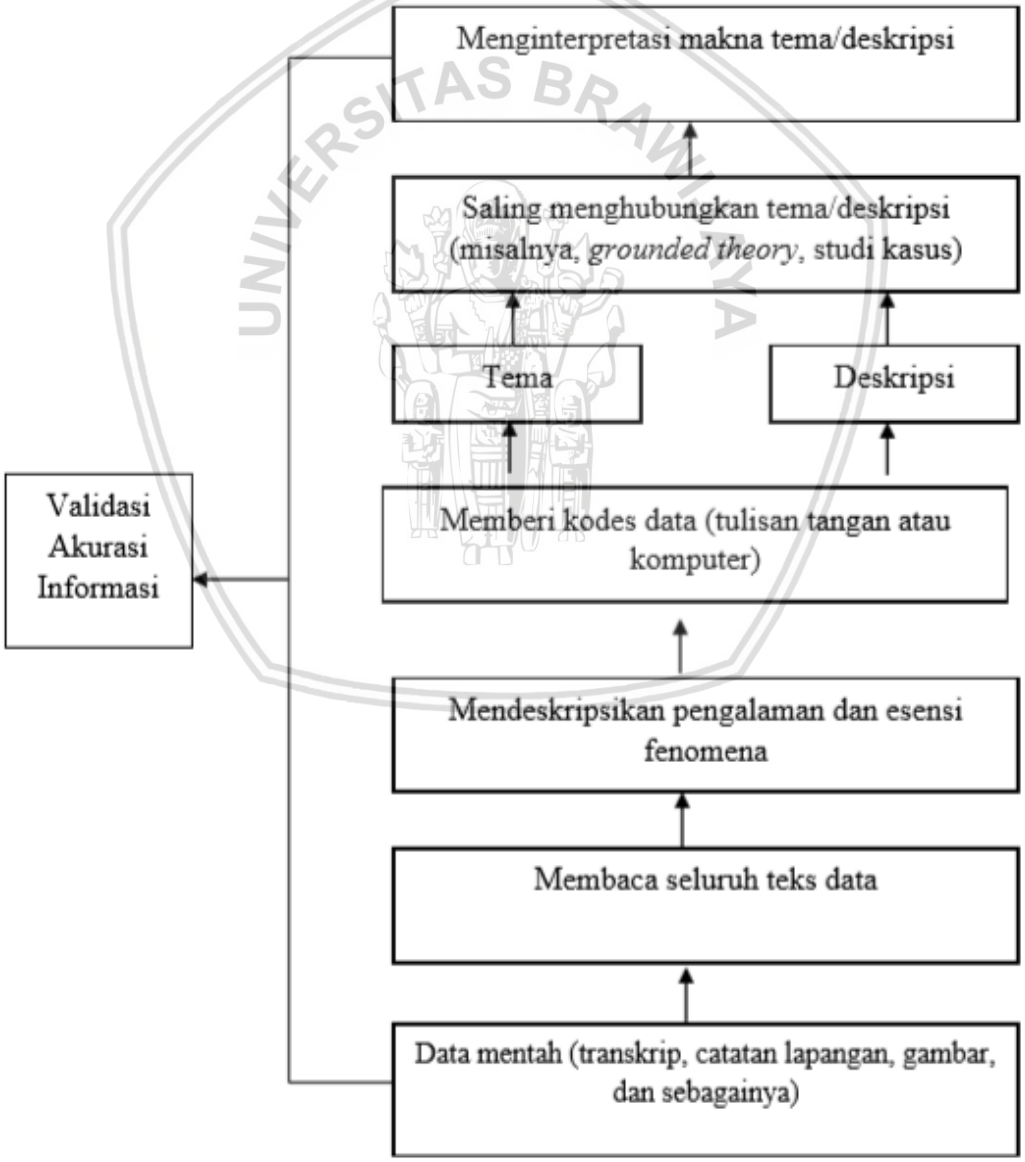

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologi

Sumber: Creswell, 2016:263

Menurut Creswell (2016:263-268) analisis data dengan pendekatan fenomenologi dilakukan melalui tahapan:

1. Langkah 1

   Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini menyertakan transkip wawancara dari informan Kasubid Sospol dan Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dan Direktur Bojonegoro Institute. Informan tersebut akan membantu menjawab rumusan masalah dari peneliti, yaitu derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro, realisasi *open government*, dan lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government*.

2. Langkah 2

   Membahas keseluruhan data. Menuliskan catatan khusus dan gagasan umum dari data yang diperoleh. Data dari wawancara akan direfleksikan dan dicocokkan dengan data pendukung yang diperoleh.

3. Langkah 3

   Membuat *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan bagian-bagian penelitian dan menuliskan kategori batasan penelitian. Peneliti dalam tahap ini melakukan peng*coding*an dengan cara memberi kode hasil wawancara sesuai fokus penelitian. Kemudian, peneliti membatasi data yang akan digunakan agar tidak melebar. Kegiatan ini bertujuan untuk mereduksi data-data yang dianggap tidak

berhubungan langsung dengan fokus penelitian dan juga membantu peneliti dalam menginterpretasikan data.

4. Langkah 4

   Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan data. Pada tahap ini proses *coding* semakin detail dengan mengumpulkan data bagian yang sudah di*coding* dan dikumpulkan pada setiap fokus penelitian, yaitu derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro, realisasi *open government*, dan analisis lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* di Kabupaten Bojonegoro.

5. Langkah 5

   Mendeskripsikan hasil penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah dengan menyajikan hasil wawancara dan data-data pendukung yang diberikan oleh pihak BAPPEDA, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bojonegoro Institute.

6. Langkah 6

   Langkah terakhir dalam analisis ini adalah pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data. Data disajikan atau divisualisasikan dengan menyajikannya dalam bentuk tabel, gambar, atau pembahasan. Pada tahap ini peneliti memaknai data dan disandingkan dengan teori yang sesuai. Sehingga data dan pembahasan dapat disinkronisasikan dan dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian menurut Sugiyono (2016:363) sering hanya ditekankan pada validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas melalui triangulasi. Kredibilitas sebagai pengukur tingkat kebenaran atas data yang telah dikumpulkan atau derajat kepercayaan data serta kesesuaian data antara konsep penelitian dengan hasil penelitian. Triangulasi menurut Moelong (2013:330) merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Data tersebut digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data lainnya. Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pendangan. Melalui triangulasi, peneliti dapat melihat ulang temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode atau teori. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukannya dengan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.

Data dalam penelitian ini menggunakan keabsahan data triangulasi sumber. Di mana menurut Moelong (2013:330) triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara orientasi berada di bagian paling barat wilayah Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat $6^0$59’ sampai $7^0$37’ Lintang Selatan dan $112^0$25’ sampai $112^0$09’ Bujur Timur, dengan jarak kurang lebih 110 km dari ibu kota provinsi.

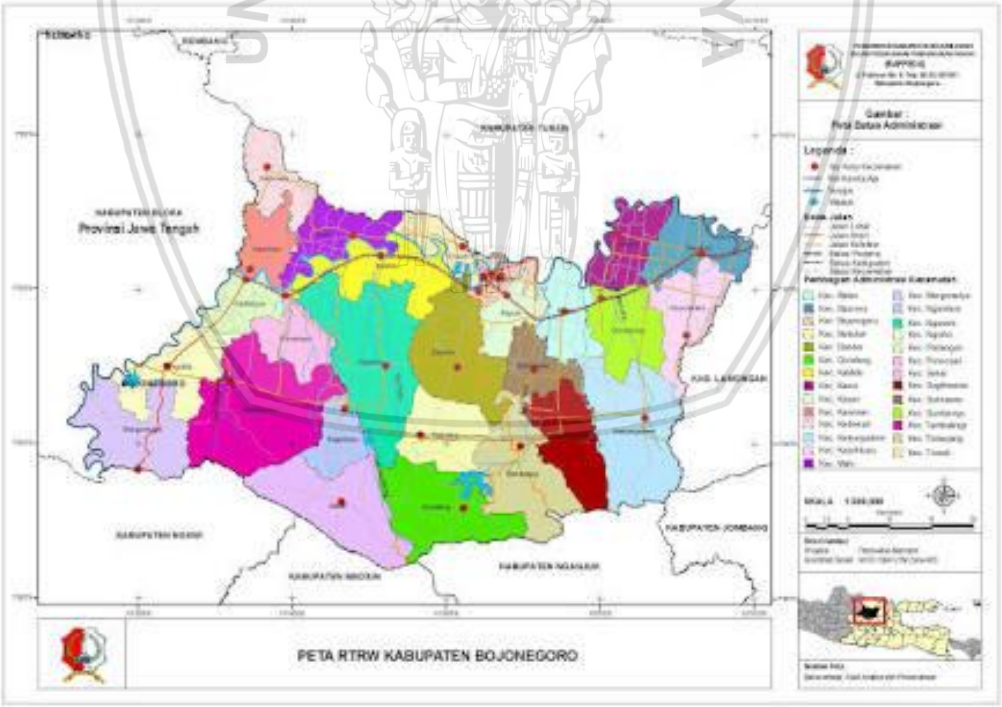

Gambar 4.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bojonegoro

Sumber: RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018

Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Tuban

Sebelah timur : Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang

Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

Sebelum tahun 2011, wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan, kemudian pada tahun 2011 terjadi pemekaran 1 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Gayam yang terdiri dari 12 desa yang sebelumnya merupakan bagian dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kalitidu dan Ngasem. Pemekaran tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, secara administrasi Kabupaten Bojonegoro saat ini terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan.

B. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro

BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro berlokasi di Jalan P. Mas Tumapel No. 01 Gedung Pemkab lantai 4.

BAPPEDA merupakan perwujudan pemerintah daerah yang berperan sebagai *"agent of change"* dalam pembangunan yang bertugas menentukan dan mengarahkan proses perencanaan pembanguna daerah.

BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro mempunyai visi **"Menjadi Badan Perencana Pembangunan yang Profesional, Inovatif dan Aspiratif dalam Mengawal Pembangunan Bojonegoro."** Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sedangkan misi BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro adalah **"Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah."**

Tugas pokok BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro yaitu membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian serta pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bdang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut.

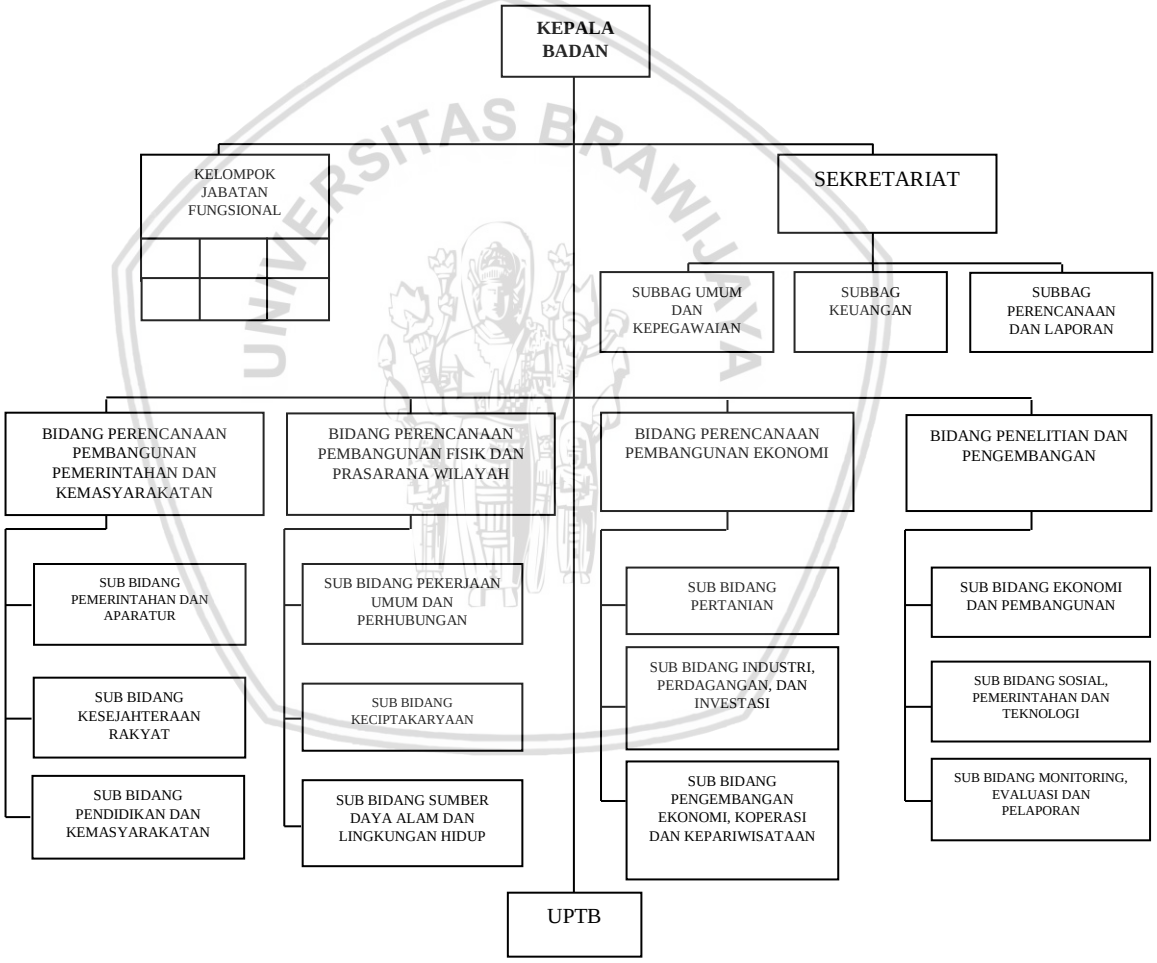

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro
Sumber: bappeda.bojonegorokab.go.id

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro berlokasi di Jalan P. Mas Tumapel No. 1 Gedung Pemkab Lantai 3.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rumusan Standart Pelayanan Minimal (SPM) menetapkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Diseminasi Informasi sebagai standar minimal layanan dalam pelaksanaan urusan wajib komunikasi dan informasi di daerah. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibutuhkan suatu organisasi yang secara khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro dan sekarang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011, ditetapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai satuan kerja perangkat daerah yang khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, yaitu **"Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang Terbaik dalam Mewujudkan Transparansi Komunikasi dan Informasi yang Handal."**

Kemudian misi untuk menunjang tercapainya visi di atas, yaitu sebagai berikut:

a. Mewujudkan peningkatan layanan *e-Government*.

b. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas pembantuan bidang komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam malaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi:

a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
c. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
d. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervise urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut.

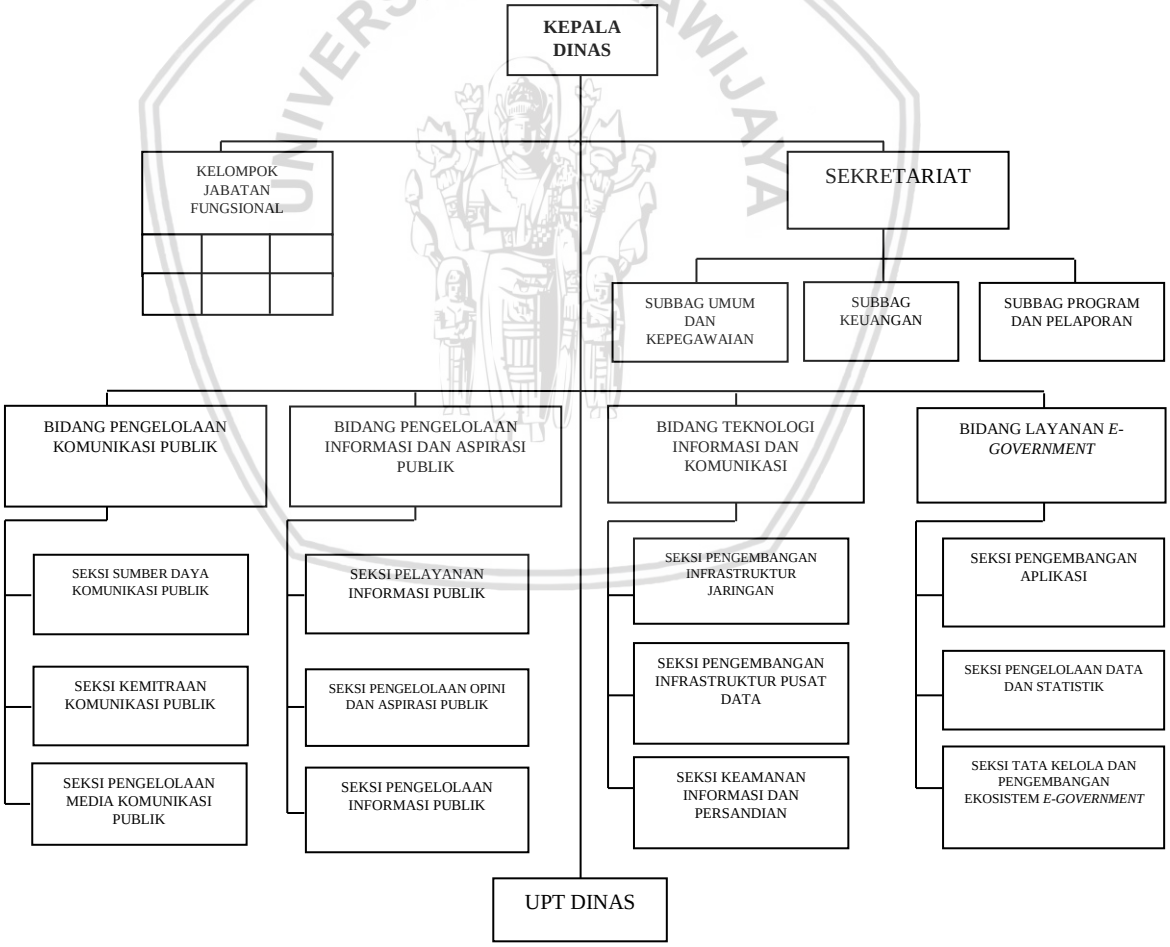

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016

3. Bojonegoro Institute (BI)

Bojonegoro Institute adalah organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO) yang berdiri pada tanggal 20 Februari 2005. Dengan Akte Notaris Didiek Wahju Indarta, SH No 208 Tahun 2005. Selanjutnya didaftarkan pada Badan Kesbanglinmas Bojonegoro pada tahun 2006.

Pada awal didirikan, lembaga ini diharapkan dapat menjadi wakil masyarakat sipil dalam mengawal regulasi/kebijakan dan pembaharuan tata pemerintahan lokal yang lebih baik, berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan dan keberpihakan pada masyarakat. Dengan mewujudkan kerangka demokratisasi dan desentralisasi, guna menuju relasi antara negara dan masyarakat yang kuat dan bermakna, serta kehidupan masyarakat sipil yang tangguh, semarak, dinamis dan partisipatif.

Visi yang diusung oleh BI, yaitu **"Menjadi Lembaga non pemerintah yang tangguh dan terpercaya dalam mempromosikan masyarakat yang merdeka dan pluralis, serta tata pemerintahan lokal yang baik."** Kemudian misi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut, adalah:

a. Mengembangkan gagasan-gagasan kritis dan sikap demokratis warga masyarakat.
b. Memperkuat kapasitas masyarakat untuk bersuara (*voice*) dan keluar (*exit*) dari lingkungan yang tidak demokratis dan sentralistik.

c. Mendorong terciptanya kemitraan lokal yang berbasis pada prinsip saling percaya di antara *stakeholder* pemerintahan local melalui perluasan ruang publik yang bebas, otonom, dan dialogis.

Untuk mewujudkan cita-cita di atas, BI memiliki dua program utama sebagai manifestasi dari mandat sosial, yaitu:

a. Program *Good Governance* dan Otonomi Lokal
b. Program Demokarsi dan Penguatan *Civil Society*

Bojonegoro Institute merancang beberapa aktivitas utama untuk menggerakkan dua program di atas, di antaranya:

a. Penelitian aksi yang bersifat kritis dan partisipatif terhadap berbagai fenomena ketidakberdayaan masyarakat, terutama untuk mengidentifikasi dan menganalisi masalah serta kebutuhan masyarakat. Hasil-hasil penelitian senantiasa dirumuskan sebagai modal untuk keperluan program aksi dan perubahan dalam masyarakat.
b. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang merupakan wahana mendiseminasikan pemikiran kritis dan mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Pendidikan dan pelatihan juga menjadi media assistensi untuk meningkatkan kapasitas aktor-aktor strategis seperti aktifis sosial, mahasiswa, birokrasi desa dan lain-lain.
c. Publikasi yang merupakan sarana artikulasi dan sosialisasi ide-ide kritis yang ditimba dari berbagai pemikiran dan aktifitas kelembagaan. Bentuk dan hasil publikasi ini adalah Media Massa dan Buku.

d. Advokasi, yaitu gerakan bersama melalui analisis kebijakan, dialog, dan *public hearing* untuk melakukan perubahan kebijakan publik di pemerintah daerah dan pengorganisasian dalam arena masyarakat sipil (desa).

Berikut ini beberapa *program experience* yang telah dilakukan oleh Bojonegoro Institute.

Tabel 4.1 *Program Experience* yang Telah Dilakukan oleh Bojonegoro Institute

No	Program	Mitra	Tahun
1	Riset Aksi *Participating Interest*	-	2005
2	Studi Implementasi Saham Rakyat (Cepu Block Invesment)	-	2007
3	*Community Emergency Respon Management*	OXFAM GB	2008
4	Pendidikan Pemilih untuk Pemilu 2009	DEPDAGRI	2009
5	Pembuatan Film Dokumenter "*People, Oil, Policy; Playing between welfare and curse*"	RWI-LGI-Pattiro-LPAW	2009
6	Penguatan Parlemen	RWI-IPC	2011
7	*Community Score Card*	RWI-ANSA-EAP	2011
8	*Program Promoting Transparency & Accountability of Subnational Oil & Gas Management for Sustainable Development in Bojonegoro*	Revenue Watch Institute	2013
9	Studi Lapangan Peserta Pelatihan Tatakelola Industri Ekstraktif se-Asia Pasific di Bojonegoro	Polgov UGM-RWI-USAID	2014
10	*Reversing the Resources Curse Throught Poverty Allviation*	Ford Foundation Publish What You Pay-Ind	2014-2015

Sumber: bi.or.id

Susunan struktur organisasi Bojonegoro Institute yaitu sebagai berikut.

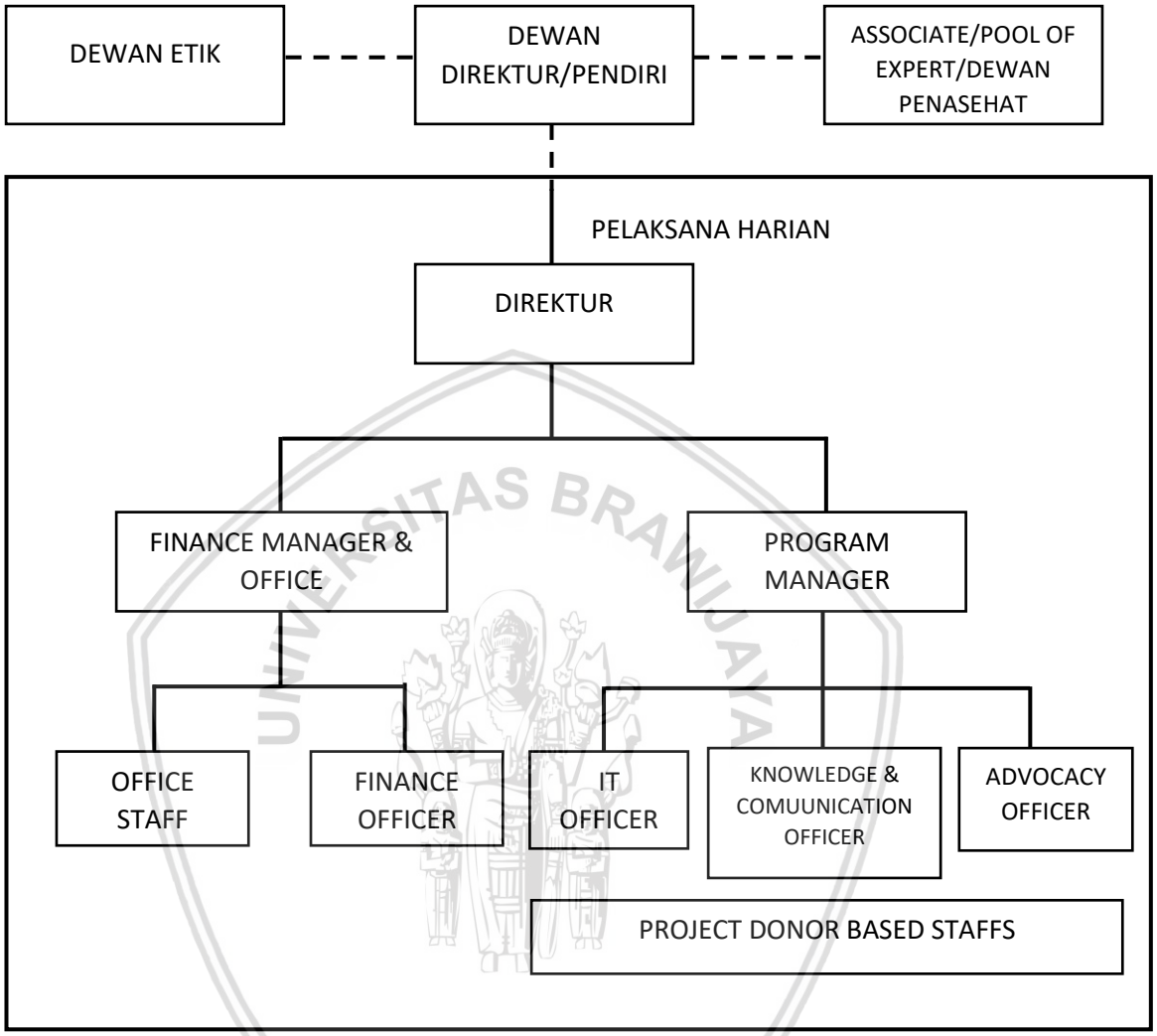

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Bojonegoro Institute

Sumber: Sekretariat BI

C. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

a. *Political Trust*

Kepercayaan politik akan terjadi ketika masyarakat menilai pemerintah, kebijakan yang dibuat, dan pemimpinnya sebagai sesuatu yang bisa menjaga janjinya, jujur, dan adil. Selama periode kepemimpinan Bupati Suyoto, kinerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Edi selaku Kepala Desa Campurejo.

> "Selama kepemimpinan Pak Yoto ini ya hasilnya jauh. Jadi saya anggap yang bawa perubahan itu cara pikir beliau dengan kepiawaian yang ada itu. Walaupun ada pro dan kontra tapi ada banyak perubahan, ada keterbukaan. Bagi beberapa kebijakan program yang tidak bergerak pun ya ada, hanya saja skornya kecil, lebih banyak di perubahan baik." (Kutipan wawancara pada 24 Juni 2018 pukul 20.00 WIB)

Diakui juga oleh Mas Nasrul selaku Sekretaris YKIB yang menyatakan bahwa:

> "Saya mengakui kepemimpinan Pak Yoto itu banyak lompatan-lompatan, banyak terobosan, yang mungkin bisa jadi hingga 20-50 tahun ke depan itu belum terjadi lagi pada kepemimpinan-kepemimpinan setelah Pak Yoto. Yang pertama beliau orangnya brilian, bagi saya beliau itu gagasannya tajam, maksudnya tajam itu tepat sasaran, dan berani serta bernyali untuk melakukan, itu secara personality. Kadang kan orang bisa bergagasan, bisa beragumen, bisa menurunkan suatu ide atau saran, tapi tidak melakukan-melakukan karena tekanan dari berbagai pihak. Sedangkan Pak Yoto berani untuk mendobrak itu." (Kutipan wawancara pada 5 Juli 2018 pukul 14.30 WIB)

Peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro di antaranya bisa dilihat dari hasil capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai tukar petani, pengangguran, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil survei IKM yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sama dengan PT.KOKEK pada empat unit pelayanan publik Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 menunjukkan berada pada kategori baik, yaitu dengan *range* nilai rata-rata tertimbang IKM antara 2,51-3,25 atau konversi IKM 62,51-81,25. Nilai IKM pada empat unit pelayanan publik adalah:

a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mendapat nilai rata-rata tertimbang 3,24 dan konversi nilai IKM sebesar 81,08 dengan kualitas pelayanan baik.
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mendapat nilai rata-rata tertimbang 2,98 dan konversi nilai IKM sebesar 74,40 dengan kualitas pelayanan baik.
c. UPTD Puskesmas Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mendapat nilai rata-rata tertimbang 3,09 dan konversi nilai IKM sebesar 77,23 dengan kualitas pelayanan baik.
d. UPTD Puskesmas Dander Kabupaten Bojonegoro mendapat nilai rata-rata tertimbang 3,06 dan konversi nilai IKM sebesar 76,57 dengan kualitas pelayanan baik.

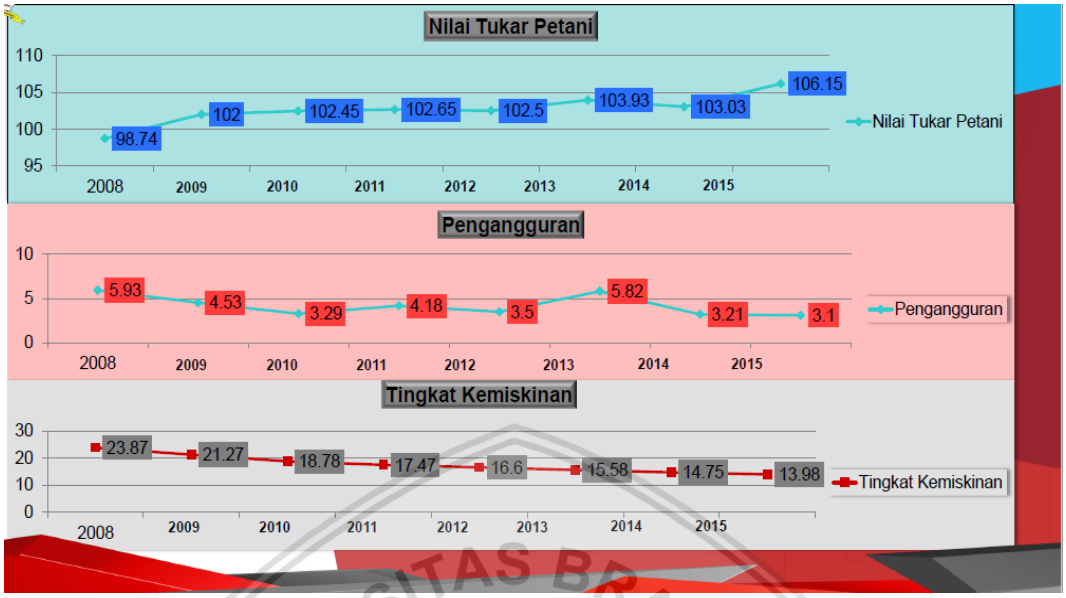

Gambar 4.5 Capaian Nilai Tukar Petani, Pengangguran, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2016

Sumber: Suyoto, 2016:23

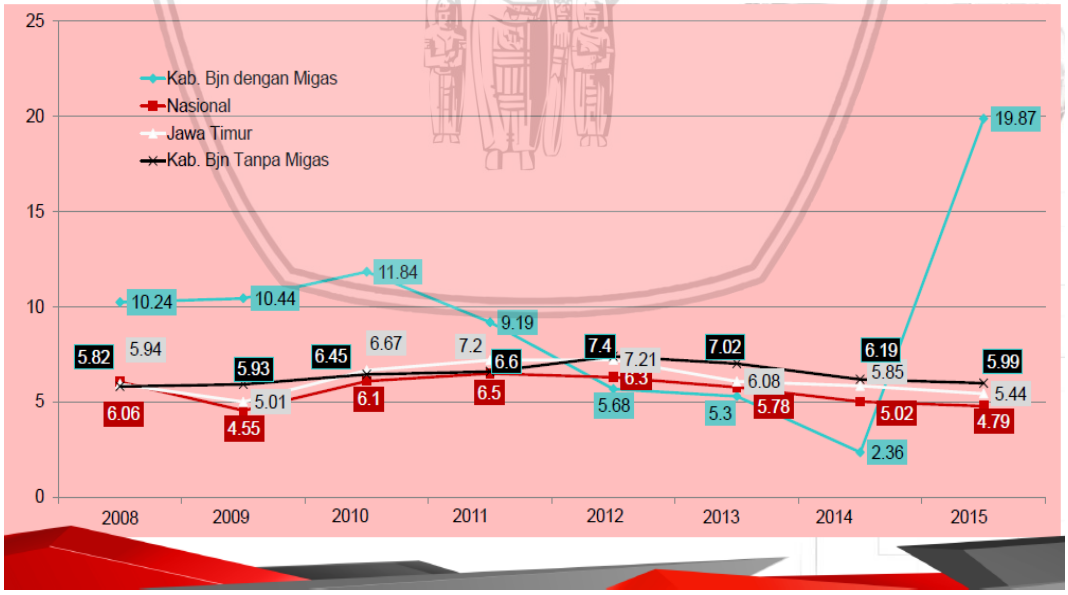

Gambar 4.6 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2015

Sumber: Suyoto, 2016:24

Secara keseluruhan kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro memang baik, namun walaupun demikian masih ada beberapa institusi yang belum bisa menunjukkan kinerja yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Khorij selaku Redaktur Radar Bojonegoro:

> "Cuma *problem*nya adalah di tataran OPD-OPD. OPD itu banyak yang tidak sejalan dengan keinginan bupati agar *open*, baik *open mind, open data,* maupun *open* kinerja. Di tataran bupati itu *open government*, tapi di tataran OPD ini kok yang realisasinya sulit. Ini sebenarnya ada apa, unsur X ini yang seharusnya dicari. Terkait *open government* ini belum tersampaikan di aparatur dan instansi." (Kutipan wawancara pada 5 Juli 2018 pukul 20.15 WIB)

Selain itu juga, dari pihak DPRD Kabupaten Bojonegoro cenderung melemah. Hal ini dinyatakan oleh Mas Nasrul:

> "*Emane* itu mbak. Emannya kita mendapat sosok bupati yang brilian, tapi pada satu sisi DPRDnya cenderung melemah. Bupati kan orangnya 1, DPRD jumlah anggota dewannya 40 orang. Terbukti dari beberapa capaian, usulan-usulan atau usulan kebijakan, usulan APBD, kadang-kadang anggota dewan itu tidak bisa melakukan sisi kontrolnya secara maksimal. Misalnya pembelian mobil pemadam kebakaran senilai lebih dari 50 milyar kalau nggak salah. Kenapa itu bisa diloloskan, padahal gedung yang tinggi di sini itu tidak banyak, tapi itu diloloskan untuk membeli mobil pemadam kebakaran. Harusnya kan dana itu bisa untuk pembangunan infrastruktur yang lain, seperti jalan. Jalan lho ya kalau sampean lihat dari ujung timur sampai barat, rata-rata kan rusak, rata-rata kurang baik untuk dilewati." (Kutipan wawancara pada 5 Juli 2018 pukul 14.30 WIB)

Ditambahkan juga oleh Mas Tulus selaku pegiat AJI bahwa DPRD secara aturan belum bisa menyusun aturan yang bisa mengikat program itu ketika ganti kepemimpinan masih tetap bisa dipakai.

Kemudian dari sisi keamanan, aparat keamanan baik polisi, satpol PP, maupun TNI mampu menjaga stabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Tingkat kericuhan ataupun demo di Kabupaten Bojonegoro cenderung

menurun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris YKIB pada wawancara 5 Juli 2018 pukul 14.30,

> "Selama ini, aparat keamanan baik polisi, satpol PP, maupun TNI itu cukup bisa menjaga stabilitas. Karena konflik-konflik di sini tidak terlampaui batas. Konflik-konflik di sini rata-rata berbau urusan pekerjaan. Misalkan yang paling besar adalah pada 1 agustus 2016, amuk massa pegawai DPC di blok cepu. Mobil-mobil dibalik, pintu dijebol oleh para pegawai, tapi itupun mereda dengan pendekatan-pendekatan dan penanganan yang menarik dari kepolisian. Setelah kericuhan itu ada juga demo besar-besaran di daerah blok cepu itu demo menuntut ganti rugi fler (pembakaran gas uap). Jadi ngebor minyak itu ya, itu ada gas ikutannya, gas ikutan itu kalau nggak dibakar, dia kaan meracuni warga, mangkanya harus dibakar. Dan api dari pembakaran itu berdampak pada suhu di wilayah warga sekitar. Nah itu kan ada dana atau kompensasi dari perusahaan yang beberapa kali telat dibayarkan dan kurang bagi warga. Itu demo kan besar sekali, tapi demo mereda."

Hal senada disampaikan juga oleh Redaktur Radar Bojonegoro pada wawancara 5 Juli 2018 pukul 20.15 yang mengatakan bahwa:

> "Dua tahun ini gerak unjuk rasa agak kendor ya. Dulu sedikit ada demo sedikit ada demo. Dulu itu mahasiswa demo ke DPRD sudah biasa dan itu sering. Secara keseluruhan pemerintah dalam menjaga keamanan di Bojonegoro ini normal, tidak sampai terjadi pertengkaran."

Secara perspektif seseorang, masyarakat akan setuju dan percaya kepada pemerintah apabila program yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait hal tersebut, disampaikan oleh Mas Nasrul bahwa:

> "Selama ini ada yang sesuai, ada yang hanya untuk *spirit branding*. Spirit branding itu ya hanya untuk membranding penguasa saja. Untuk menaikkan popularitas, menaikkan pamornya. Tapi ada beberapa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti keterbukaan, masyarakat itu difasilitasi, disediakan ruang untuk

> mengadu dan menyampaikan keluhannya." (Kutipan wawancara pada 5 Juli 2018 pukul 14.30)

Sehingga, kesesuaian tindakan pemerintah terhadap agenda yang telah dibuat oleh pemerintah pun menjadi bahan evaluasi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris YKIB,

> "Pemerintah sendiri dalam menjalankan ternyata ada beberapa hambatan yang bersumber dari mereka sendiri. Ya rata-rata berumber dari mereka sendiri itu ya dari jajarannya. Mereka kurang bisa menterjemahkan apa yang dikendaki pimpinan kita. Programnya buagus, tapi implementasi di birokrasinya itu yang kurang bagus, tetap saja hasilnya tidak akan maksimal, tetap saja ada beberapa bidang list yang belum menjalankan sesuai dengan yang direncanakan." (Kutipan wawancara pada 5 Juli 2018 pukul 14.30 WIB)

Walaupun demikian, untuk agenda terkait OGP menurut Mas Tulus sudah sesuai. Disampaikan oleh Mas Tulus pada wawancara 5 Juli 2018 pukul 15.20 bahwa:

> "Kalau OGP menurutku sesuai. Jadi mulai perencanaan tingkat atas sampai bawah itu sesuai. Hanya saja memang itu kan butuh penguatan SDM saja. Tapi untuk mencapai itu sudah dilakukan semua, mulai dari yang atas (pimpinan) sampai tingkat OPD yang paling bawah sudah dilakukan."

Selain hal di atas, kepercayaan politik juga didasarkan pada keseriusan dan sifat pemimpin melalui kepribadian, kehadiran di forum publik, dan kebiasaan pemimpin. Pejabat publik di Kabupaten Bojonegoro sudah berusaha menunjukkan sikap yang baik dalam menyikapi dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seperti yang dinyatakan oleh Mas Awe selaku Direktur BI dalam wawancara pada Jumat, 6 April 2018 pukul 10.00 WIB,

> "…BI pernah terlibat di dialog publik itu. Waktu itu kita mempertanyakan perda transparansi migas yang belum

diundangkan, belum dibentuk tim tranparansinya. Ya responnya bagus kok, meskipun tidak bisa diwujudkan secara langsung dalam jangka pendek, tapi minimal pimpinan daerah komit di depan publik untuk mengundangkan dan menjalankan perda itu. Itu kan komitmen yang disampaikan di publik luar biasa. Kita bisa tagih *statement*nya. Jadi kalau ada forum publik seperti dialog publik itu saya lihat juga bagus. Warga bisa berinteraksi langsung dengan kepala-kepala OPD. Karena kalau dialog publik gitu kan yang hadir bupati, sekretaris daerah, kepala-kepala OPD, dan legislatif beberapa kali juga hadir."

Kehadiran pimpinan publik dalam forum publik didukung dengan adanya daftar hadir dialog interaktif yang dihadiri oleh pimpinan/kepala OPD dan masyarakat.

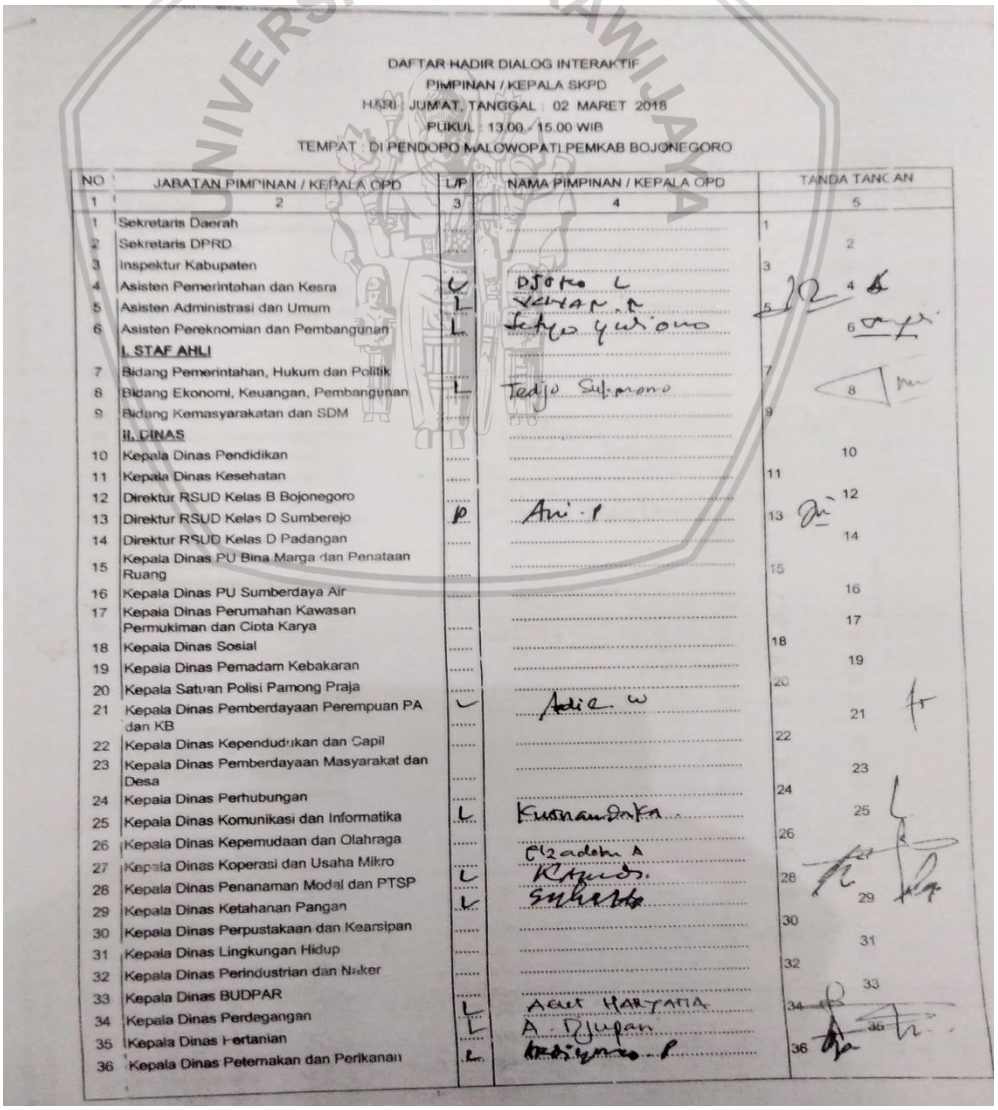

DAFTAR HADIR DIALOG INTERAKTIF
PIMPINAN / KEPALA SKPD
HARI : JUMAT, TANGGAL : 02 MARET 2018
PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : DI PENDOPO MALOWOPATI PEMKAB BOJONEGORO

NO	JABATAN PIMPINAN / KEPALA OPD	L/P	NAMA PIMPINAN / KEPALA OPD	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah			1
2	Sekretaris DPRD			2
3	Inspektur Kabupaten			3
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	L	Djoko L	4
5	Asisten Administrasi dan Umum	L	[illegible]	5
6	Asisten Pereknomian dan Pembangunan	L	Tedjo Yuwono	6
	I. STAF AHLI			
7	Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik			7
8	Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan	L	Tedjo Sukarono	8
9	Bidang Kemasyarakatan dan SDM			9
	II. DINAS			
10	Kepala Dinas Pendidikan			10
11	Kepala Dinas Kesehatan			11
12	Direktur RSUD Kelas B Bojonegoro			12
13	Direktur RSUD Kelas D Sumberejo	P	Ani P	13
14	Direktur RSUD Kelas D Padangan			14
15	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang			15
16	Kepala Dinas PU Sumberdaya Air			16
17	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya			17
18	Kepala Dinas Sosial			18
19	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran			19
20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja			20
21	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan PA dan KB	P	Adie W	21
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil			22
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			23
24	Kepala Dinas Perhubungan			24
25	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	L	Kusnandaka	25
26	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga			26
27	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	L	Elzadela A.	27
28	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	L	Rizki S.	28
29	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	L	Suharto	29
30	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			30
31	Kepala Dinas Lingkungan Hidup			31
32	Kepala Dinas Perindustrian dan Naker			32
33	Kepala Dinas BUDPAR	L	Agus HARTATA	33
34	Kepala Dinas Perdagangan	L	A. Djupan	34
35	Kepala Dinas Pertanian	L	[illegible]	35
36	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	L	[illegible]	36

Gambar 4.7 Daftar Hadir Dialog Interaktif Pimpinan/Kepala OPD

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

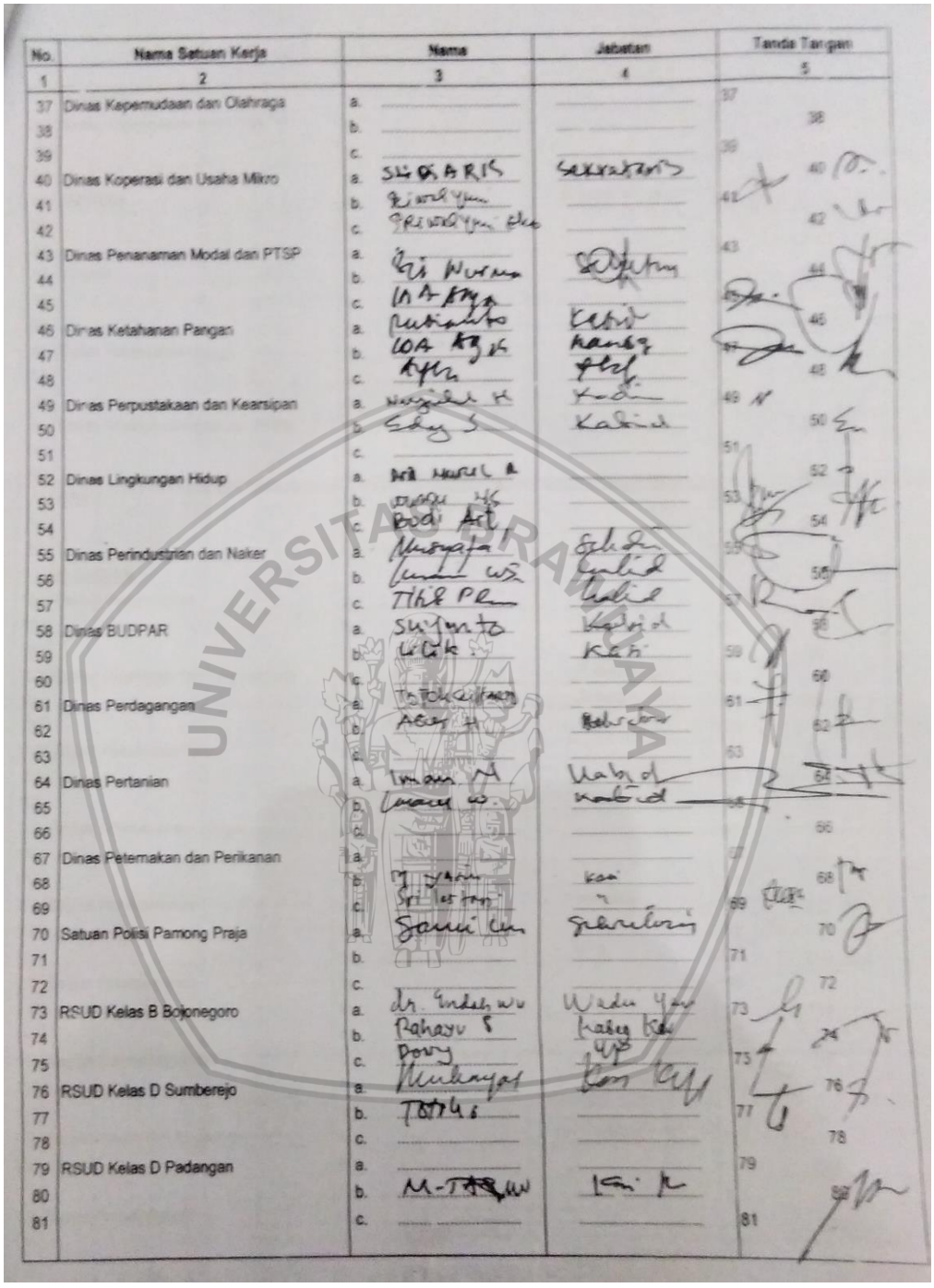

No.	Nama Satuan Kerja	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	a.		
38		b.		
39		c.		
40	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	a.		
41		b.		
42		c.		
43	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	a.		
44		b.		
45		c.		
46	Dinas Ketahanan Pangan	a.		
47		b.		
48		c.		
49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	a.		
50		b.		
51		c.		
52	Dinas Lingkungan Hidup	a.		
53		b.		
54		c.		
55	Dinas Perindustrian dan Naker	a.		
56		b.		
57		c.		
58	Dinas BUDPAR	a.		
59		b.		
60		c.		
61	Dinas Perdagangan	a.		
62		b.		
63		c.		
64	Dinas Pertanian	a.		
65		b.		
66		c.		
67	Dinas Peternakan dan Perikanan	a.		
68		b.		
69		c.		
70	Satuan Polisi Pamong Praja	a.		
71		b.		
72		c.		
73	RSUD Kelas B Bojonegoro	a.		
74		b.		
75		c.		
76	RSUD Kelas D Sumberejo	a.		
77		b.		
78		c.		
79	RSUD Kelas D Padangan	a.		
80		b.		
81		c.		

Gambar 4.8 Daftar Hadir Dialog Interaktif Staff OPD

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

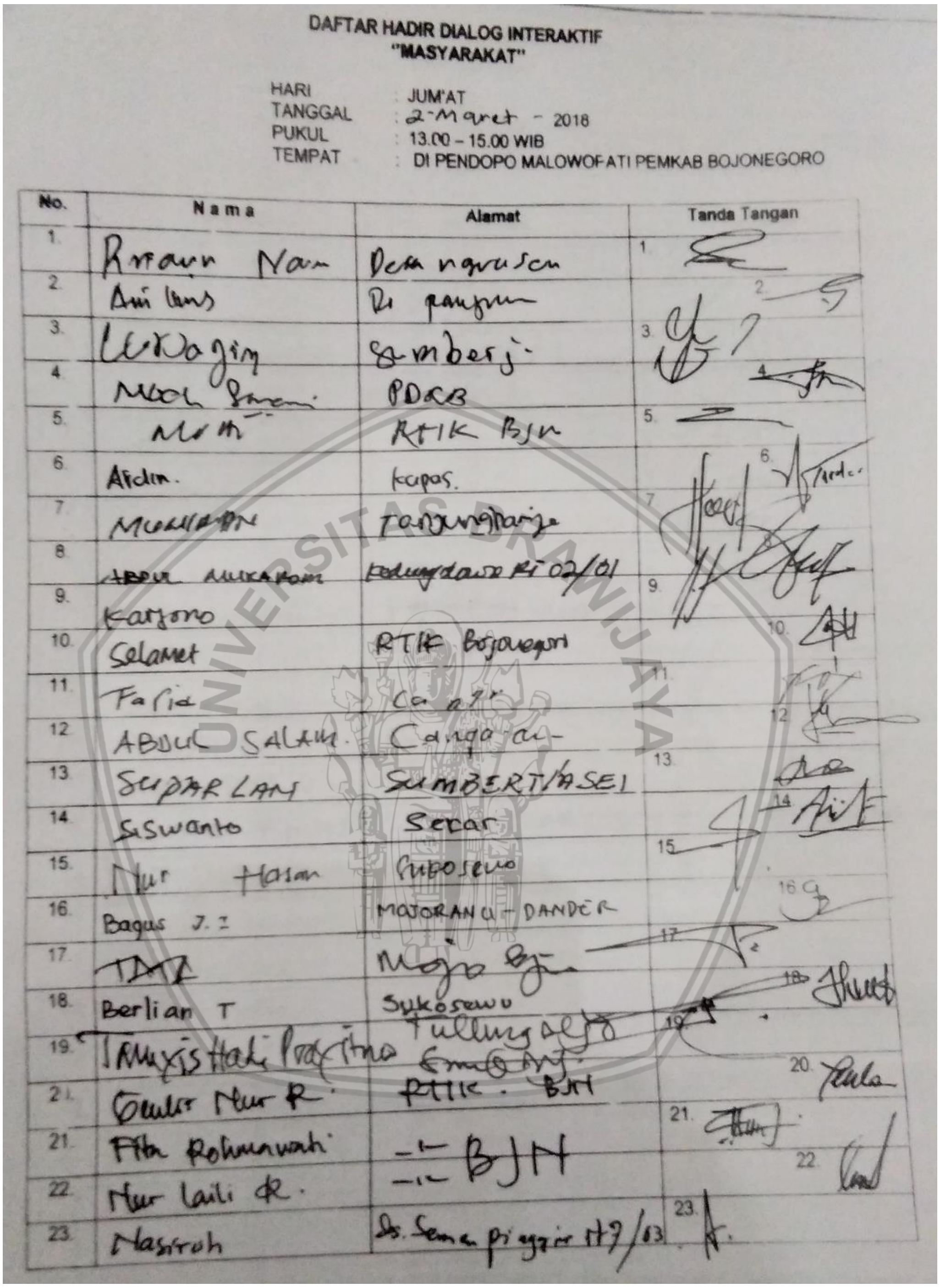

DAFTAR HADIR DIALOG INTERAKTIF
"MASYARAKAT"

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 2-Maret - 2018
PUKUL : 13.00 – 15.00 WIB
TEMPAT : DI PENDOPO MALOWOPATI PEMKAB BOJONEGORO

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Rizwan Nam	Desa ngrasem	1.
2.	Ani lans	Rs pangan	2.
3.	Wagim	Sumberj.	3.
4.	Moch Samani	PDRB	4.
5.	Mr M	RTIK Bjn	5.
6.	Afdin.	Kapas.	6.
7.	Muhajir	Tanjungharjo	7.
8.	Abdul Muharom	Kalungdowo RT 02/01	
9.	Karjono		9.
10.	Selamet	RTIK Bojonegoro	10.
11.	Farid	Campur	11.
12.	ABDUL SALAM.	Cangaan	12.
13.	SUPARLAN	SUMBERTLASEI	13.
14.	Siswanto	Sekar	14.
15.	Nur Hasan	Sukosewu	15.
16.	Bagus J. I	MOJORANGU - DANDER	16.
17.	TATA	Mojo Bojo	17.
18.	Berlian T	Sukosewu	18.
19.	Tamyis Hadi Prasetyo	Tulungagung	19.
21.	Ganlir Nur R.	RTIK . BJN	20.
21.	Fitri Rohmawati	-"- BJN	21.
22.	Nur Laili R.	-"-	22.
23.	Nasiroh	Ds. Sembung Pinggir RT 7/03	23.

Gambar 4.9 Daftar Hadir Dialog Interaktif Masyarakat

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

Bagaimana respon pemerintah terhadap isu-isu strategis dan pemenuhan janji kampanye atau politik merupakan hal yang menjadi bagian untuk menjaga kepercayaan publik. Respon pemerintah yang tepat akan membantu proses pengambilan keputusan arah pembangunan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Sigit selaku Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik, bahwa:

> "Misalkan masyarakat mengeluh jalan rusak, itu terjadi di kecamatan A. Kita punya data dari sistem tadi, dialog publik, itu kita kumpulkan. O ternyata di kecamatan A jalannya rusak, di kecamatn B terjadi kekeringan. Dengan adanya data ini kita tidak akan salah pembangunan. Jangan sampai di kecamatan A jalannya yang rusak, kita malah bangun danau di sana. Di kecamatan B yang harusnya kita bangun danau di sana malah kita bangun jalan. Itu sebenarnya fungsi aspirasi kan seperti itu. Kita bisa mengontrol betul apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Jadi biar nyambung harus ada garis besarnya." (Kutipan wawancara 12 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Respon pemerintah terhadap berbagai aspirasi maupun keluhan masyarakat telah dirangkum oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik yang nantinya ditindak lanjuti oleh OPD terkait. Keluhan/aspirasi masyarakat yang dirangkum bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

KELUHAN/ ADUAN MASYARAKAT

YANG DIHIMPUN MELALUI DJALOG INTERAKTIF EDISI 216 PERIODE II / 2018 TANGGAL 2 MARET 2018

NO	NAMA ALAMAT PELAPOR	KECAMATAN	URAIAN KELUHAN / PENGADUAN	TANGGAPAN SKPD TERKAIT	TOPIK	BIDANG	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pak Sugianto Desa Sabontoro Kec. Balen HP 085230482240	BALEN	* Agar dibentuk Perkumpulan Penjual Jamu tradisional/ gendong dan Dinas Kesehatan agar memberikan pembinaan yang berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja : Saat ini di Bojonegoro ada 120 orang penjualan jamu gendong yang sudah ada perkumpulannya serta dari Dinas Kesehatan juga rutin memberikan binaan hingga bisa mandiri	Pengaduan	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja : Kami sudah survey langsung dan kami sanggup untuk memfasilitasi pembinaan para penjualan jamu gendong
2.	Sunardi Desa Guyangan Kec. Trucuk	TRUCUK	* Jalan Bojongoro-Cepu (Barat pertigaan Clangap) banyak lubang yang besar, mohon segera diperbaiki	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang : Penanganan ruas jalan ada di wilayah pusat	Pengaduan	Infrastruktur	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang : Segera kita tindaklanjuti dengan disurvey ke lapangan dan segera berkoordinasi dengan pusat
			* Dari warga Balongrejo Kecamatan Sugihwaras dana DAK belum dicairkan oleh Kades untuk siswa SLTA, mohon segera dicairkan	Moderator : diusulkan akan dijawab dalam dialog publik akan datang	Pengaduan	Pendidikan	Dinas Kominfo : Akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan
3.	Tamyis Desa Tulungrejo Kec Sumberrejo HP 082140777888	SUMBERREJO	* Pakir liar di depan Telkomsel memaksa minta padahal tiap tahun sudah berlangganan, mohon ditertibkan	Dinas Perhubungan : Pakir liar yang ada di jalan Dr. Wahidin depan Telkomsel akan segera ditertibkan	Pengaduan	Perhubungan	Dinas Perhubungan : Segera akan kami tindak lanjuti
			* Terdapat korban kecelakaan motor jatuh di depan BRI Temayang akibat jalan rusak, mohon segera diperbaiki	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang : Temayang-Sugihwaras merupakan peta skala prioritas yang segera akan ditangani	Pengaduan	Infrastruktur	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang : Saat ini UPTD wilayah 5 sudah mempersiapkan material-material yang diperlukan untuk menambal jalan

Gambar 4.10 Rangkuman Keluhan/Aspirasi Masyarakat

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

Untuk pemenuhan janji kampanye maupun politik mengenai tiga masalah pokok Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2008 yang meliputi politik uang, kemiskinan, dan infrastruktur, secara capaian ada beberapa yang belum sesuai target, tapi progres yang dilakukan pemerintah cukup baik.

> "…Janji politik itu kan tertuang dalam RPJMD. Kalau di RPJMD sepertinya angka kemiskinan tidak sesuai target. Tapi dalam penanggulangan kemiskinan progresnya cukup bagus. Nah kalau kita lihat dari progres kemiskinan makronya, yang setiap tahun di*update* itu, minimal Kabupaten Bojonegoro sudah keluar dari 10 kabupaten termiskin." (Kutipan wawancara dengan Direktur BI pada 6 April 2018 pukul 10.00 WIB)

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Maspriyadi selaku Kasubid Sosial, Politik dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bojonegoro bahwa:

> "Kalau 100% ya tidak. Contohnya jalan, seperti Pohwates ke selatan, Proliman itu kan masih belum bagus jalannya. Sebenarnya kalau untuk mengatasi 100% ya belum. Jadi dulu itu kan paving, kalau paving mestinya tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Harusnya desa dengan adanya anggaran yang besar dari ADD (Anggaran Dana Desa) itu harusnya tanpa menunggu pemerintah daerah bisa. Apalagi jalan itu kan bukan kewenangan kabupaten. Tapi desa itu tidak ada insiatif gitu. Kita tidak memungkiri bahwa permasalah itu masih ada, terutama jalan. Apalagi sekarang juga sudah ganti model dari paving ke motmik, itu kan belum semuanya. Kalau banjir, alhamdulillah sudah teratasi." (Kutipan wawancara pada 16 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan temuan di atas, derajat kepercayaan publik yang ada di Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kepercayaan politik telah ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui capaian-capaian kinerjanya. Walaupun masih ada beberapa hal yang belum maksimal, tetapi secara keseluruhan pemerintah mampu

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan untuk menunjang kebutuhan dan keinginan masyarakat.

b. *Social Trust*

Variasi kedua dari kepercayaan, yaitu *social trust*. Kepercayaan sosial mengacu pada kepercayaan masyarakat satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat sosial, sehingga tidak bisa dipisahkan dari gagasan kepercayaan politik. Kepercayaan sosial merupakan pelumas interaksi antar seseorang selama ada fasilitas tindakan kolektif dan kolaboratif. Di Kabupaten Bojonegoro, masyarakat dengan pemerintah maupun CSO telah menunjukkan kerjasama yang baik.

> "Jadi kerjasama BI itu dalam rangka menginisiasi kebijakan, mendorong inovasi birokrasi program, edukasi, *awareneness*, dll. Kerjasama BI karena BI sebagai *civil society*, ya kerjasamanya membangun ekosistem dengan *civil society* lain. Misalkan dengan teman-teman NGO lokal ada IDFoS, Ademos, RTIK di dalam mendorong *open government* atau mendorong isu-isu strategis. Karena kami juga sadar, untuk membangun perencanaan di Bojonegoro tidak mungkin BI sendirian. Kita juga menjalin mitra dengan CSO nasional dan internasional. Contoh yang nasional itu ICW, IPC, Pattiro, Article 33. Kalau yang internasional ada HIFOS (CSO dari Belanda), NrGI (*Natural Government Institute*), AMSA dari Filipina." (Kutipan wawancara dengan Direktur BI pada 6 April 2018 pukul 10.00 WIB).

Pernyataan serupa diakui juga oleh Bapak Maspriyadi yang menyatakan bahwa:

> "Selama ini terus terang kita terbuka dengan 4 sekawan, yaitu akademisi, *business*, *civil society*, dan *government*. Sampai sekarang itu kita libatkan dalam penyusunan dan apapun. Kayak dulu itu ada pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) kita libatkan NGO. Terus kemarin waktu ada penilaian desa tentang keterbukaan juga kita libatkan. Apalagi yang terakhir kemarin itu *open data* kontrak semua dilibatkan, bahkan yang memberikan bimtek juga pernah dari BI. Mereka yang punya acaranya, kita memfasilitasi." (Kutipan wawancara pada 16 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Selain kerjasama antar CSO, CSO di Kabupaten Bojonegoro juga terlibat dalam penyusunan rencana-rencana strategis. Sebagai contoh dalam proses penyusunan rencana aksi OGP (*Open Government Partnership*). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak hanya berkoordinasi dengan antar dinas, tetapi juga melibatkan CSO-CSO di Kabupaten Bojonegoro.

RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH (OPEN GOVERNMENT)
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2016-2017

Tema : Open Data	
1. Rencana Aksi : Revolusi data	
Komitmen, 2016 – 2017	Sedang berjalan
Organisasi Penanggungjawab	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Koordinator	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pejabat yang bertanggung jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Email	dinkominfo@bojonegorokab.go.id kusnandaka@bojonegorokab.go.id kusnandaka.bjn@gmail.com
Phone	+62 353 881454 ; +62 81 6541 1930
Yang terlibat	
1. OPD	• Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) • Camat • Kepala Desa/ Lurah
2. CSO dan pihak lain	• Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bojonegoro • CSO Bojonegoro Institut (BI), Sinergantara, Mediatrac
Masalah yang akan dituntaskan	Masih terdapatnya kesimpangsiuran data dasar antar pengelola data dan belum tersaji secara real time
Obyek utama	Tersedianya kesamaan data dasar yang mengacu pada data di aplikasi data dasa wisma Tim Penggerak PKK
Penjelasan komitmen	Dengan tersedianya kesamaan data yang mengacu pada data dasar di aplikasi data dasa wisma TP PKK yang telah terverifikasi serta tersaji secara real time, dapat mendukung terwujudnya kualitas policy. Dengan terinputkan pada portal data nasional data.go.id, dapat memudahkan akses pemanfaatan data oleh semua pihak termasuk dalam pengambilan keputusan
Tantangan OGP	Mewujudkan keterbukaan data berbasis data dasar real time
Relevansi	Tersedianya kesamaan data mengacu pada data dasar ini sangat penting dalam mewujudkan kualitas policy, dan terinputkannya pada portal data.go.id dapat menguatkan akses keterbukaan informasi bagi para pihak
Ambisi	Penguatan tata kelola data dari tingkat pemerintahan desa menuju One Data Bojonegoro yang terinputkan pada portal nasional data.go.id, akan dapat menguatkan pemerintahan lebih terbuka

Gambar 4.11 Kerjasama CSO dengan Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi OGP
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pengemudi efektivitas pemerintah, pembangunan ekonomi, dan ukuran hasil tindakan pemerintah. Sehingga penting adanya suatu kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasubid Sosial, Politik dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bojonegoro pun mengiyakan hal tersebut.

> "Kepercayaan publik bagi pemerintah ya sangat penting. *Non sense* kalau kita membangun tapi kalau tidak ada kepercayaan ya apa artinya pemerintah itu. Jadi ya wajiblah bagi kami, harus ada kepuasan dari masyarakat." (Kutipan wawancara pada 16 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Melihat dari temuan di atas, derajat kepercayaan publik terkait dengan kepercayaan sosial mampu ditunjukkan oleh antar elemen yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baik drai kalangan masyarakat, sektor privat, CSO, dan pemerintah. Antar kalangan tersebut mampu menunjukkan peran kolaborasi yang baik sehingga tercipta kondisi lingkungan yang saling mendukung.

2. Realisasi *open government* di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan prinsip-prinsip *open government*

Open government atau pemerintahan terbuka dapat diartikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB, arti *open government* bagi pemerintah adalah:

> "Kalau menurut saya sendiri, keterbukaan itu tidak hanya kita memberikan data, tidak hanya kita membuka diri tentang apa yang kita miliki, tapi kita juga harus mau menerima kritikan dan saran, itu kan juga bagian dari kita terbuka. Kemudian kalau kita pemerintah dikritik, berarti pemerintah yang lebih baik. Karena memang gini, selamanya itu pasti ada yang namanya ketidakpuasan, ketidakpuasan itu karena ketidaksempurnaan. Kalau kita tidak mau merubah diri, kita akan semakin jauh dari kesempurnaan. Kita maunya jadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik."

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan pembentukan kantor PPID, berikut ini disajikan data terkait jumlah kantor PPID yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 4.2 Data Jumlah Kantor PPID di Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Jumlah					Ket.
		PPID	Ada	Belum	SK	Personil	
1.	PPID Kabupaten	1	1		1	17	
2.	SKPD						
	a. Badan	6	6		6	18	
	b. Dinas	23	23		23	70	
	c. Inspektorat	1	1		1	3	
	d. Sekretariat DPRD	1	1		1	3	
	e. Bagian	10	10		10	30	
	f. Kecamatan	28	28		28	107	
	g. RSUD	3	3		3	18	
	h. BUMD	7		7			
	i. Satpol PP	1	1			1	
Jumlah		**81**	**74**	**7**	**73**	**250**	

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

Selanjutnya terkait realisasi prinsip-prinsip *open government* di Kabupaten Bojonegoro, yaitu sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, baik informasi keuangan maupun akses untuk berinteraksi dengan pemerintah.

> "Transparansi kita sudah membuka seluruh anggaran di web sampai pada rincian APBD. Bisa dilihat di web BPKAD di menu transparansi. Itu nanti anggaran tahun 2015, 2016, 2017, 2018 ada. Ini di lantai 1,2, dan 4 juga dipajang, kalau tidak dipajang berarti tidak transparan. Dicantumkan juga nomor HP pejabat pengelola keuangan, transparansinya sampai seperti itu. Transparansi anggaran masing-masing OPD yang dipajang itu juga di*upload* di masing-masing web OPD." (Kutipan wawancara dengan Bapak Sigit pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Gambar 4.12 Tranparansi Anggaran Pemkab Bojonegoro dan OPD di Lantai 2

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

No	Name	Lihat	Download
1	Dinas Pendidikan		Download
2	Dinas Kesehatan		Download
3	Akademi Kebidanan		Download
4	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro		Download
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo		Download
6	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan		Download
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang		Download
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air		Download

Gambar 4.13 Transparansi APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro via website

Sumber: bpkad.bojonegoro.go.id

Terkait transparansi anggaran tidak hanya di tingkat pemerintah kabupaten, tetapi hingga pemerintahan desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Heri selaku Camat Gondang pada wawancara 24 Juni 2018 pukul 10.00:

> "*Open government* di tingkat desa terkait APBDes mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sudah di*open*kan dengan mengacu pada juknis penyusunan APBDes. Mulai dari perencanaan, penyusunan APBDes itu diketahui oleh BPD, kemudian disahkan yang tentunya sudah dikonsultasikan di bupati melalui camat. Setelah itu diumumkan terutama di kantor dan tempat-tempat strategis. Di sana diumumkan besaran APBDesnya berapa dan penggunaannya untuk apa saja."

Akses untuk menyediakan fasilitas pertanyaan publik telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sigit yang menyatakan bahwa:

> "Fasilitas-fasilitas pertanyaan publik ada dialog publik, ada LAPOR!, ada radio malowopati. Kalau dulu ada FB ya, tapi karena FB itu ternyata tidak efektif, terlalu banyak informasi *hoax*, akhirnya kita memilih untuk tidak itu. Kita pakai yang pasti, seperti SMS itu nomernya ada, SMS radio Malowopati nomernya juga ada, dialog

publik malah orangnya ada, kelihatan." (Kutipan wawancara pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Selain sistem online, permohonan informasi bisa diperoleh melalui pelayanan langsung di desk PPID masing-masing badan publik yang dituju. Alur permohonan jika datang langsung di desk PPID badan publik sebagaimana gambar di bawah ini.

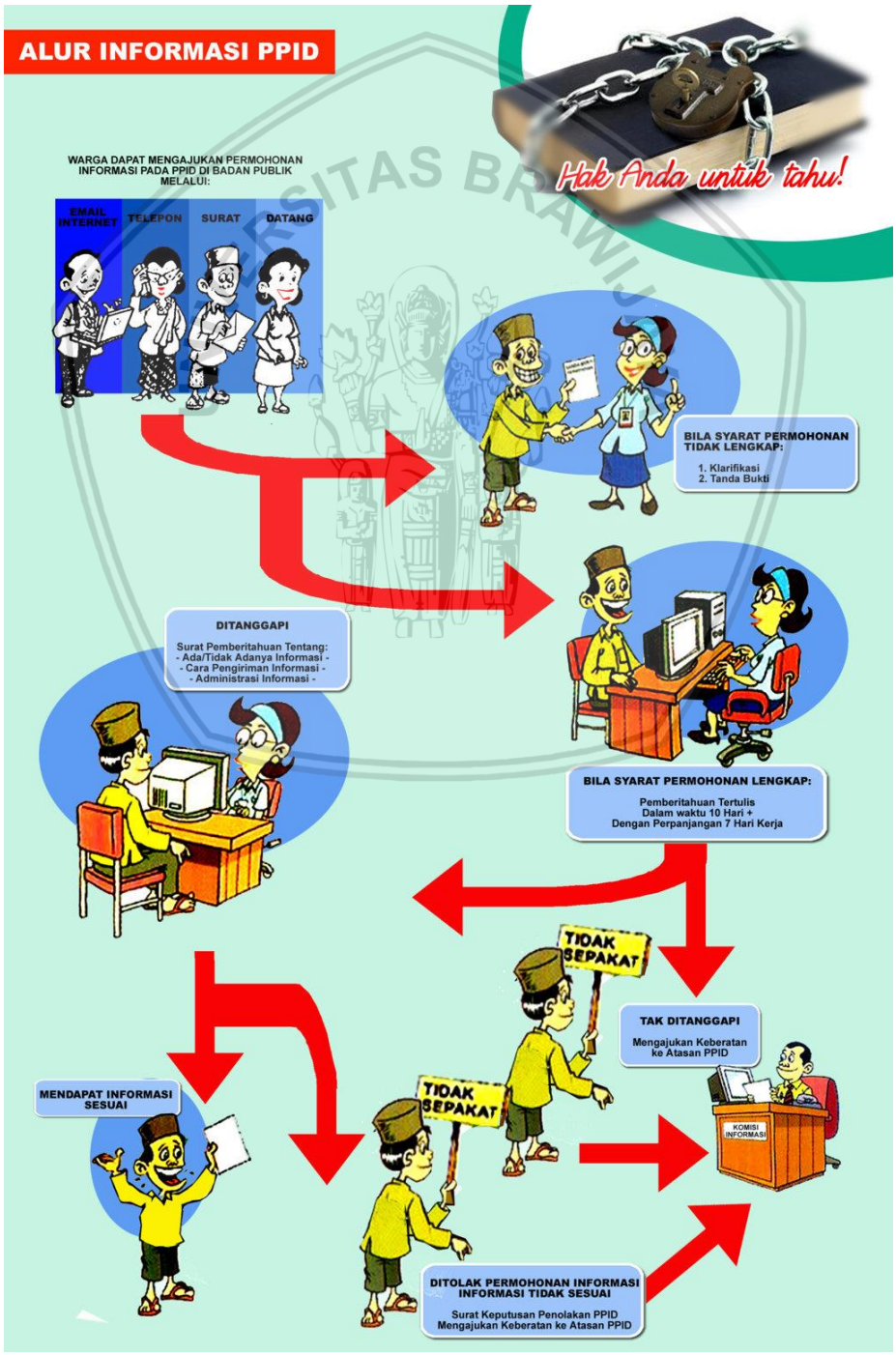

Gambar 4.14 Alur Informasi PPID

Sumber: bpkad.bojonegoro.go.id

Mekanisme penyampaian pertanyaan-pertanyaan maupun aduan masyarakat juga dijelaskan oleh Bapak Sigit.

> "Kalau dialog publik datang langsung *pas* dialog publik. Kalau dulu datang langsung di pendopo dilaksanakan setiap hari Jumat jam 14.30 WIB-selesai, biasanya selesai jam 15.00. Kalau SMS itu ketik BJN (spasi) aduan/aspirasi kirim ke 1708. Kalau LAPOR! bisa lewat website lapor.ukp.go.id nanti *login*, kalau belum punya akun nanti buat akun. Di LAPOR! nanti bisa *upload* foto. Misalkan ada sekolah mau roboh, kita foto nanti kita *login* terus *upload*. Kalau radio itu bisa *on air* nomernya 08113322958. WA juga ada, SMS juga diterima. Itu nanti WA dan SMS di*forward* ke kepala OPD." (Kutipan wawancara pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Berikut ini alur pengaduan dan rekapan persentase permohonan informasi baik yang diajukan melalui radio malowopati maupun sistem LAPOR!.

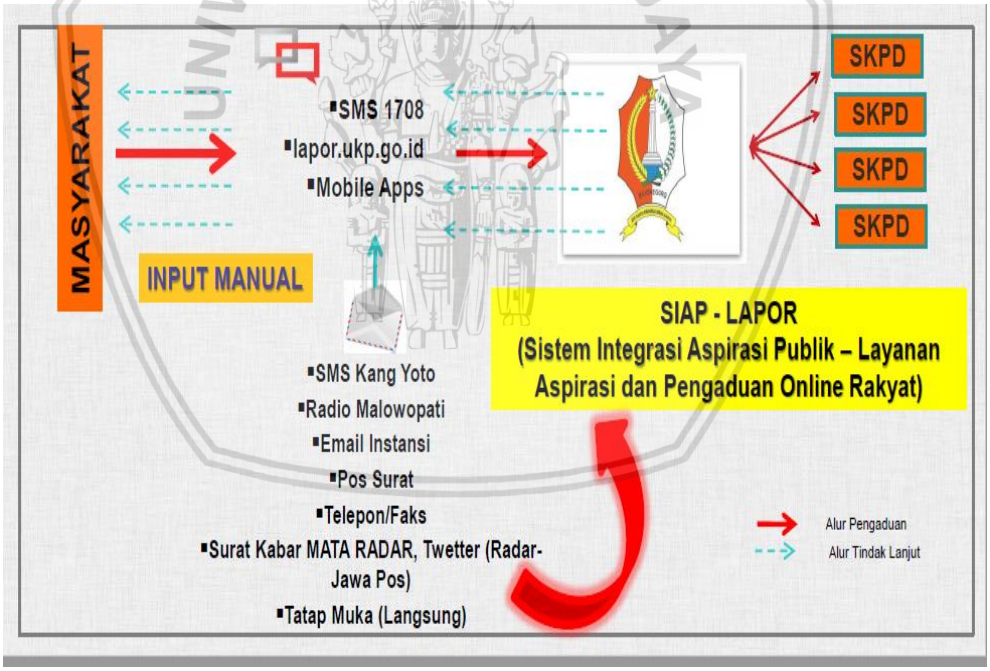

Gambar 4.15 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan SIAP-LAPOR!

Sumber: Suyoto, 2016:15

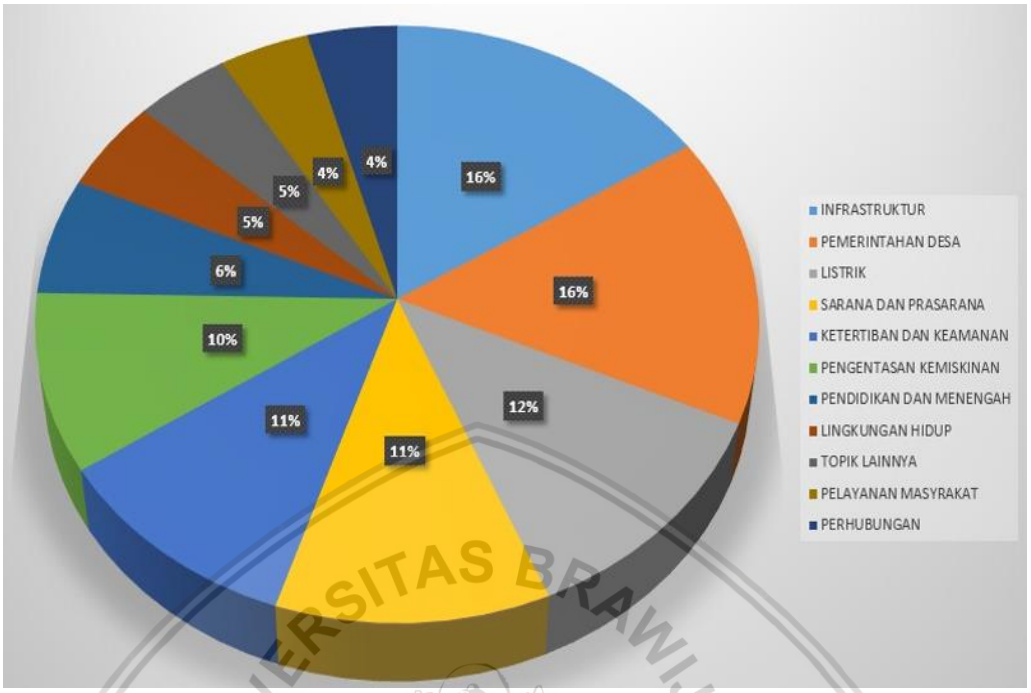

Gambar 4.16 Grafik Permohonan Informasi Radio Malowopati

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

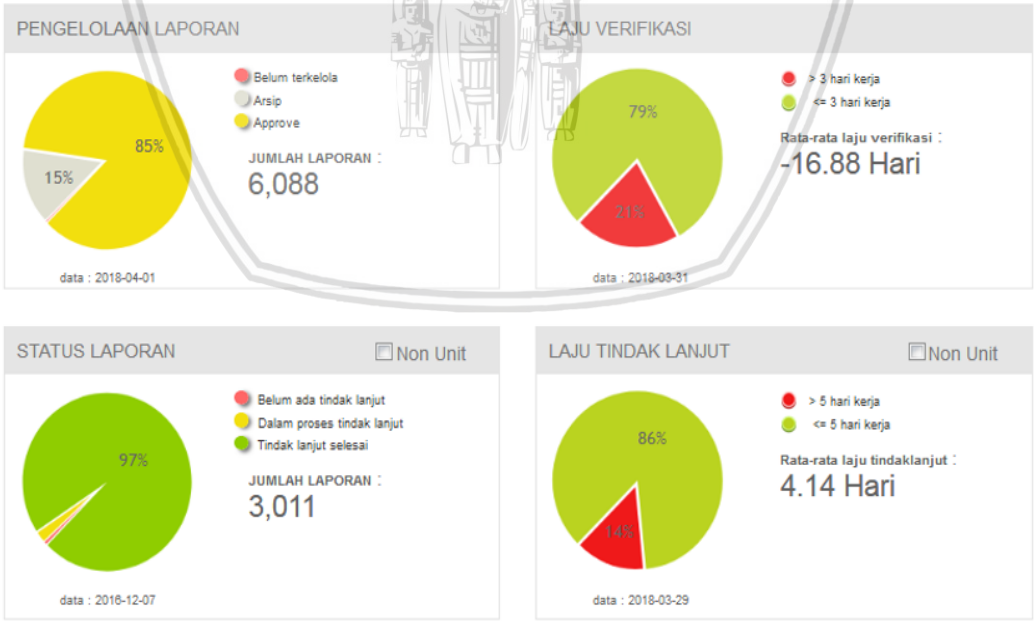

Gambar 4.17 Statistik Laju Verifikasi Pengelola LAPOR! dan Tindak Lanjut OPD

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periode. Pertanggungjawaban secara internal dapat berupa hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi yang memberikan kewenangan. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berhasil mendapatkan gelar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa:

> "Bentuk pertanggungjawaban internal yang pasti sudah diperiksa per tahun oleh BPK (Badan Pengelola Keuangan) dan pada tahun 2016 kemarin karena kita sudah terbuka, yang mengawasi tdak hanya BPK, tapi masyarakat juga ikut mengawasi, untuk pertama kalinya kita memperoleh gelar WTP. WTP itu diberikan kepada daerah untuk akunlatibilitas yang baik dengan skor-skor tertentu. Akuntabilitas kan artinya kita melakukan ini sesuai aturan dan sesuai pemanfaatan. Kalau kata Pak Yoto dulu kita mengerjakan tidak ngawur." (Kutipan wawancara pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperoleh gelar WTP juga disampaikan oleh Camat Gondang yang mengatakan bahwa:

> "Alhamdulillah kemarin penilaian kinerja itu kita ada penilaian kinerja WTP dan kalkulasi tahun di bawahnya kita pada 2017 kemarin masih tergolong WTP walaupun tentunya ada catatan-catatan, tetapi sifatnya untuk pembenahan dan peningkatan lagi." (Kutipan wawancara pada 24 Juni 2018 pukul 10.00)

Adapun bentuk pertanggungjawaban eksternal dengan menyediakan akses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses tersebut, masyarakat dapat memberi penilaian atau laporan

jika ada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

> "Pertanggungjawaban kepada masyarakat disampaikan melalui banner. Di banner kan ada realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dari situ dapat dilihat apakah kita mampu menganggarkan dengan baik, kan bisa dilihat masyarakat. Jadi sebenarnya di banner itu banyak informasi di dalamnya." (Kutipan wawancara dengan Bapak Sigit pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Tetapi selain banner, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menyediakan website tersendiri untuk mengakses SAKIP agar masyarakat tahu apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menunjang kinerjanya. Tampilan websitenya seperti gambar di bawah ini.

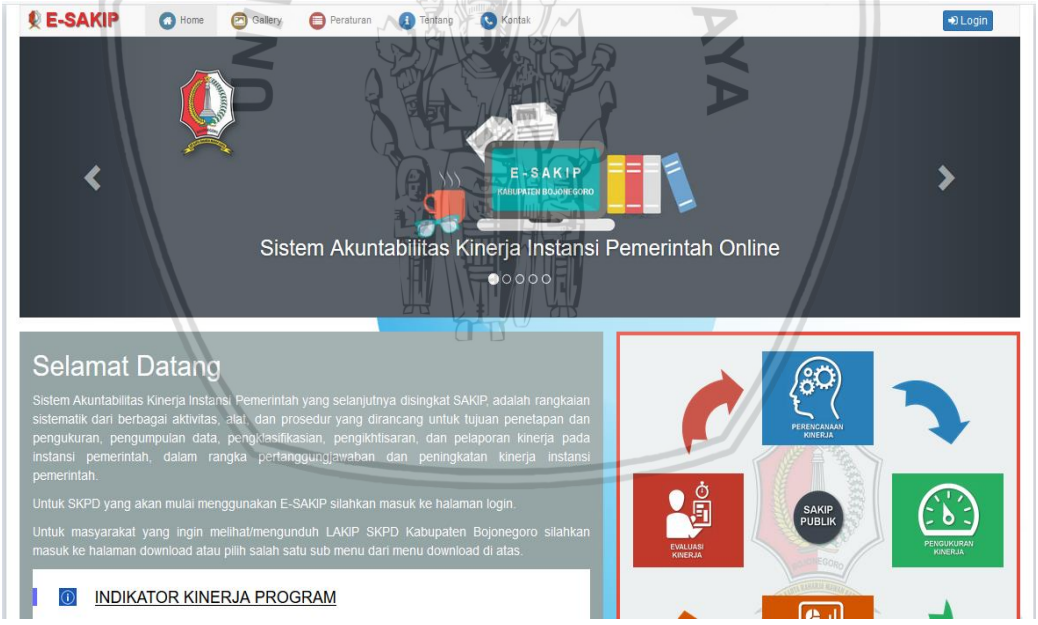

Gambar 4.18 E-SAKIP Kabupaten Bojonegoro

Sumber: silakip.bojonegorokab.go.id/

c. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Partisipasi dalam siklus kebijakan berfungsi untuk meningkatkan integritas dalam sektor publik. Adanya partisipasi dari masyarakat akan

menimbulkan interaksi yang aktif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Tulus pada wawancara 5 Juli 2018 pukul 15.20,

> "Kalau obrolan warung sih selama kepemimpinan Pak Yoto keterlibatan masyarakat itu ada, misal dalam pembuatan program. Mulai dari musrenbangdes, musrenbang kecamatan, sampai musrenbang kabupaten ada perwakilan-perwakilan masyarakat yang diajak untuk menyusun rencana programnya. Nah untuk pengawasannya juga mereka bisa langsung mengawasi dan mereka bisa langsung melaporkan misalkan ada program yang tidak sesuai. Jadi menurutku tingkat partisipasi masyarakat selama kepemimpinan Pak Yoto sih meningkat. Ini adalah langkah awal mencoba masyarakat untuk mulai aktif."

Selain itu juga, dikatakan oleh Kepala Desa Campurejo bahwa partisipasi masyarakat membuat sisi kontrol pemerintahan menjadi lebih mudah dan seandainya ada titik lemah akan cepat diketahui.

Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait peningkatan partisipasi publik, di antaranya ada dialog publik, LAPOR!, SMS radio malowopati, dll. Kalau di tingkat kecamatan, untuk meningkatkan partisipasi publik biasanya melalui sosialisasi pembinaan.

> "Yang pertama sosialisasi pembinaan, baik lewat kajian, pertemuan, ya mungkin kalau di desa itu banyak lewat tahlilan, bahkan pada *event-event* peringatan 17an, keagamaan, nah kita biasanya masuk di situ. Kalau formal ya biasanya kita undang beberapa perwakilan di tingkat kecamatan atau desa. Kalau informal ya itu ketika ada *event-event* kemasyarakatan, termasuk kalau di desa itu budayanya sering misalkan bersih desa, *manganan*." (Kutipan wawancara dengan Bapak Heri pada 24 Juni 2018 pukul 10.00)

Gambar 4.19 Dialog Publik

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

Namun di sisi lain, dikatakan oleh Mas Awe bahwa di kalangan masyarakat melihat OGP masih ada distorsi makna. OGP masih dilihat sebagai pengawasan saja, belum pada pastisipasi masyarakat. Masih sebatas *"ooo sing dilakoni ngono to"*. Bagaimana masyarakat untuk bisa langsung tergerak, berkolaborasi, ikut dalam perencanaan pembangunan atau musrenbang masih minim.

> "Dialog Publik kalau berdasarkan teorinya Arnstein itu adalah level tertinggi. Masalahnya itu Kabupaten Bojonegoro langsung menginjak pada dialog. Mangkanya waktu itu kita kasih masukan. Jadi kalau dialog langsung dialog, tanpa ada tahapan-tahapan sebelumnya, dialog itu hanya jadi mengeluh. Mangkanya di awal-awal kita mendorong keterbukaan dulu di OPD. Karena kalau pemerintah sudah terbuka, masyarakat akan mudah mengakses informasi. Ketika masyarakat sudah mendapat informasi kemudian ada forum dialog, jadinya dialog itu seimbang, tidak monoton. Tapi kalau belum apa-apa, keterbukaannya belum bagus, tiba-tiba sudah ada forum dialog, warga tidak punya data atau informasi jadinya mereka hanya mengeluh, mendengarkan. Ketika sudah proses keterbukaan dan *open* dokumen kontrak dilakukan, masyarakat sudah mulai berani untuk menyampaikan aspirasinya, inovasi atau gagasannya." (Kutipan wawancara pada 6 April 2018 pukul 10.00 WIB)

Biarpun begitu, berbagai keluhan maupun aspirasi masyarakat tetap dijadikan landasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk perumusan arah pembangunan. Sebagaimana yang telah dirangkum oleh Dinas Kominfo Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik. Masyarakat pun antusias dengan adanya dialog publik. Disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa masyarakat selalu hadir dalam dialog publik untuk menyampaikan aspirasinya. Ketika dialog publik libur juga selalu ditunggu-tunggu.

d. Inovasi dan Teknologi

Era modern yang didukung oleh teknologi digitalisasi membuat perubahan yang relatif lebih cepat. Birokrasi harus memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk dapat berperan di lini kehidupan masyarakat. Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak hanya dalam hal teknologi, tetapi juga di bidang inovasi pelayanan, inovasi birokrasi, dan inovasi aturan. Tidak bisa dihindari kalau menjabarkan inovasi itu lebih mudah dengan inovasi teknologi.

> "…Tapi mayoritas itu IT. Contoh, ada perencanaan 19 namanya musrenbang. Ini masuk e-musrenbang, di e-musrenbang semua orang akan tau. Semua kalau sudah pakai IT pakai mesin kan tidak bisa direkayasa Mbak. Ya memang ada yang di luar ini, tapi kalau menurut saya yang paling bagus ada di IT." (Kutipan wawancara dengan Bapak Maspriyadi pada 16 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Adapun contoh lain yang disampaikan oleh Bapak Maspriyadi, yaitu manajemen review. Di mana pada hari Jumat pagi kepala OPD memaparkan hasil kinerjanya di hadapan bupati, wakil bupati, dan perangkat lain. Kemudian hasilnya di IT kan juga, nanti masuk di SISPAN (Sistem

Pemantauan). Selain itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik juga menyampaikan kalau inovasi lain lebih pada sistem kinerja.

> "…Seperti kita membuat banner-banner transparansi, kita *upload* itu semua di web, kita dorong keterbukaan sampai tingkat desa. Jadi kecamatan kita surati agar pemerintah kecamatan menyuruh semua desa memasang baliho anggaran masing-masing desa." (Kutipan wawancara pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Gambar 4.20 Kegiatan Evaluasi Kinerja di Rumah Dinas Bupati

Sumber: Suyoto, 2016:21

Selain itu, ada aplikasi Bojonegoro *Open System* (BOS) yang digunakan untuk memuat informasi mengenai perkembangan pekerjaan yang dilakukan dengan perusahaan lelang. BOS bisa diakses oleh masyarakat dengan alamat website bos.bojonegoro.go.id.

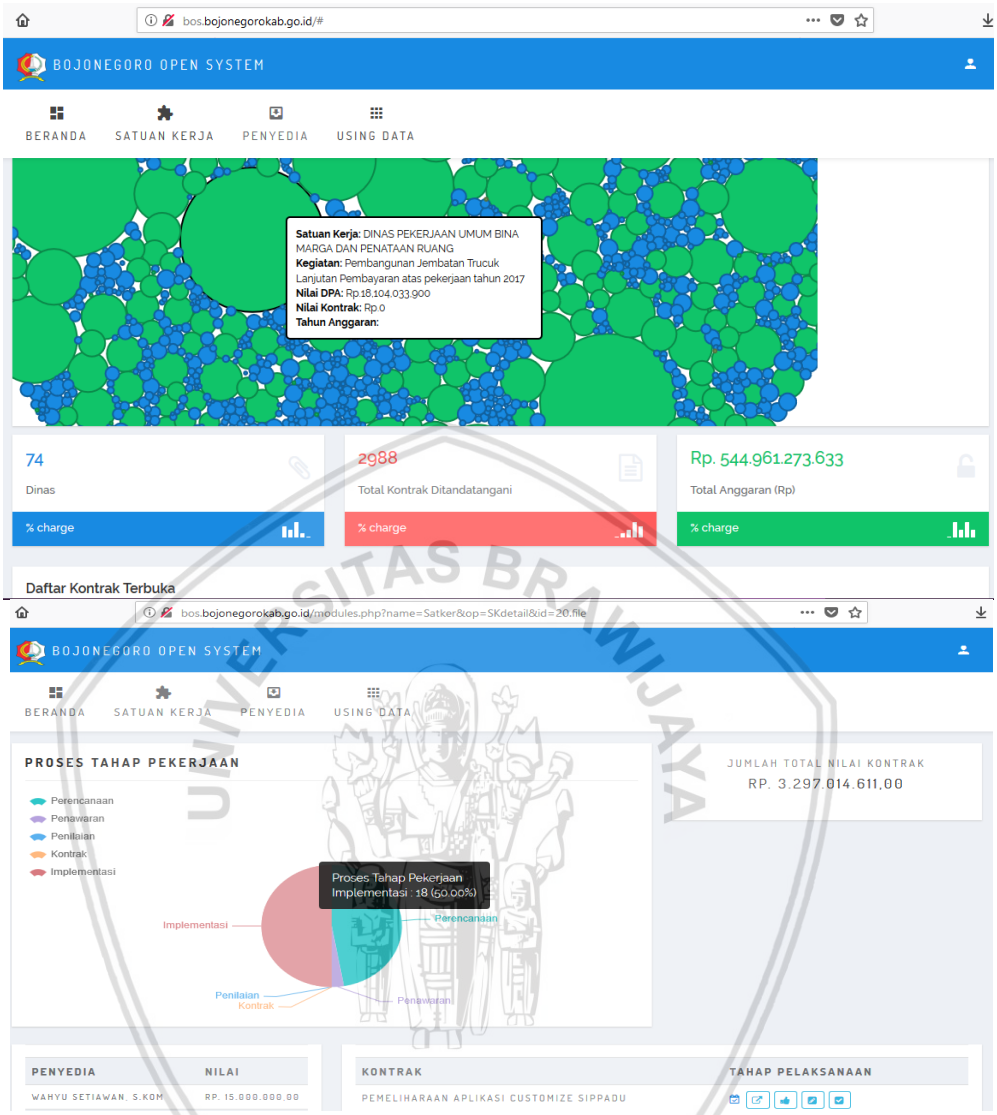

Gambar 4.21 Konten website BOS

Sumber: bos.bojonegoro.go.id

Inovasi bidang pelayanan ada pelayanan terpadu untuk pembuatan data kependudukan di daerah-daerah yang jauh dari kota. Hal ini disampaikan oleh Bapak Maspriyadi pada wawancara 16 April 2018 pukul 09.00 WIB.

> "OPD satu dengan lainnya itu ada kegiatan. Ada pelayanan publik, kalau tidak salah ortala yang punya. Jadi ada kegiatan pelayanan publik di kecamatan Mbak. Misal ingin buat KTP, KK, akte itu langsung di kecamatan itu. Biasanya itu di kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota, seperti Sekar, Gondang. Nah itu nanti buka pelayanan terpadu, misal di kecamatan Sekar untuk daerah Sekar, Gondang, dan sekitarnya.

> Contoh lain kayak buat pameran gitu, jadi OPD yang terkait bidang pelayanan berkumpul jadi satu untuk beberapa hari, 2-3 hari."

Dengan demikian, realisasi *open government* di Kabupaten Bojonegoro yang didasarkan pada prinsip-prinsip *open government* mulai dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pelibatan masyarakat, serta inovasi dan teknologi telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan sangat serius. Sehingga hal tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

3. Analisis lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* di Kabupaten Bojonegoro

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada tiap-tiap bagian. Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan *open government* yaitu adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa adanya undang-undang tersebut digunakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk penganggaran, menyampaikan kepada OPD lain, sehingga mewajibkan setiap badan publik untuk mem*publish* keuangannya. Adanya regulasi daerah terkait pelaksanaan OGP juga turut memperkuat pelaksanaan OGP.

> "Kalau saya lihat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen untuk itu. Misalkan menerbitkan beberapa regulasi yang memperkuat pelaksanaan OGP. Contohnya ada Perda Transparansi Migas, Perbup Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik,

> yang paling fenomenal itu keterbukaan dokumen kontrak." (Kutipan wawancara dengan Mas Awe pada 6 April 2018 pukul 10.00 WIB)

Kelemahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan *open government* yaitu adanya ketakutan tersendiri dari kalangan pemerintah di mana pemerintah merasa khawatir ketika harus terbuka.

> "Dulu di awal-awal keterbukaan kita ada ketakutan tersendiri. Kalau anggaran ini kita buka, apa yang akan terjadi. Apakah kita nanti akan diserang oleh siapa. Ketakutan-ketakutan seperti itulah intinya. Tapi ketika sudah dibuka, ya sudah kita menjadi terbuka. Kita menjadi lebih enak. Tidak ada lagi yang ditakut-takuti." (Kutipan wawancara dengan Bapak Sigit pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya, masih ada beberapa SDM yang kurang berkompeten, apalagi yang di pemerintahan desa. Dikatakan oleh Kepala Desa Campurejo dan Camat Gondang bahwa diperlukan adanya penguatan SDM. Karena rata-rata SDM di pemerintahan desa perlu dikembangkan lagi. Begitupun dengan masyarakatnya, perlu dijelaskan bahwasannya pembangunan ini bukan dari pemerintahan saja, karena pembangunan itu tugas dari semua elemen, termasuk pemerintah, pengusaha, dan kesadarn masyarakat itu sendiri.

Selain SDM yang kurang berkompeten, pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro juga belum semua benar-benar terbuka sesuai UU KIP. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa pada tahun 2017 kemarin ketika Bojonegoro mengadakan festival keterbukaan pemerintahan desa, dari 28 kecamatan dan masing-masing kecamatan mengirimkan satu desa yang paling terbuka, terlihat bahwa pemerintahan desa yang benar-benar terbuka sesuai UU KIP hanya 20% atau sekitar 84 desa saja. Ditambahkan oleh Mas Awe yang mengatakan kalau melihat OPD teknis masih belum sepenuhnya menjalankan komitmen OGP.

> "OGP di Kabupaten Bojonegoro ini sebagian masih dipahami hanya mentransparansikan atau membuka data. Belum sampai membuka ruang. Jadi masih seperti etalase. Etalase itu kan orang hanya bisa melihat, mau mengambil tidak bisa. Memang OGP ini belum bisa langsung pada level ideal. Ruang kolaborasi itu ada, tapi sebagian orang hanya memahami mentransparansikan saja." (Kutipan wawancara dengan Direktur BI pada 6 April 2018 pukul 10.00 WIB)

Dengan demikian, lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan *open government* di Kabupaten Bojonegoro dari segi lingkungan internal terkait kekuatan terletak pada adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan OGP. Sedangkan terkait lingkungan eksternal terletak pada adanya rasa tidak percaya diri dari pemerintah untuk terbuka, kurang berkompetennya SDM yang ada terutama di pemerintah desa, belum semua pemerintahan desa terbuka sesuai UU KIP, dan masih belum optimalnya komitmen OPD teknis dalam melaksanakan OGP.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan *open government* terletak pada adanya transparansi. Menurut Bapak Maspriyadi, adanya transparansi ya mau tidak mau membuat semua harus transparan. Sebagai contoh pada test CPNS tahun kemarin yang ada *live streaming*. Penilaian dinilai satu-satu dan disiarkan di TV lokal. Peluang lain disampaikan oleh Mas Awe kalau pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah membuat Rencana Aksi OGP, yaitu revolusi data, *open* dokumen kontrak, transparansi anggaran, pelayanan publik di bidang kesehatan, serta mendorong akuntabilitas dan partisipasi pembangunan desa.

Ditambahkan oleh Bapak Edi bahwa adanya sistem *controlling* secara online membuat masyarakat bisa secara langsung turut mengoreksi dan mengawasi apabila terjadi penyimpangan.

Ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan *open government* yaitu adanya transisi pemimpin yang bisa memicu potensi konflik politik. Disampaikan oleh Bapak Maspriyadi bahwa transisi pemimpin ini tidak hanya terjadi dalam masa transisi bupati baru di Kabupaten Bojonegoro, tetapi orang-orang yang di OGI (*Open Government* Indonesia) struktur organisasinya berubah.

> "Jadi tantangannya itu bahwa tidak semua perangkat atau *person* berpartisipasi. Kesadaran terhadap OGP ini kurang. OGP kan ada pelaporan tiga bulan sekali, nah dengan adanya mutasi, pergantian pejabat, orang-orang yang biasanya menangani pelaporan kemudian ganti orang lain, perlu belajar lagi. Pernah dulu dari orang pembangunan dipindah ke humas. Jadi minimal perlu ada transformasi dari pimpinan ke bawah, jaga-jaga kalau ada pergantian posisi seperti ini." (Kutipan wawancara dengan Bapak Maspriyadi pada 16 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Di samping itu, keterbukaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berpotensi memunculkan berita-berita hoax.

> "Yang perlu diantisipasi itu adanya *fake* akun yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyebarkan berita-berita hoax. Misal saja FB, *sampean* sendiri mungkin bisa membuat sampai 50 akun untuk menyerang Kabupaten Bojonegoro yang hanya satu admin." (Kutipan wawancara dengan Bapak Sigit pada 2 April 2018 pukul 14.00 WIB)

Sehingga, analisis lingkungan strategis dari segi lingkungan eksternal terkait peluang terletak pada meningkatnya partisipasi masyarakat, adanya transparansi, dan pembuatan rencana aksi OGP. Sedangkan dari sisi ancaman ada pada transisi pemimpin baik di daerah maupun pusat dan

beredarnya *fake* akun dalam menyebarkan berita-berita hoax untuk menyerang pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Kepercayaan adalah hal dasar untuk membangun hubungan antara orang satu dengan lainnya. Ketika seseorang diberi kepercayaan, hal sesulit apapun dapat dilakukan oleh orang tersebut. Kepercayaan yang tertanam dalam diri seseorang adalah syarat utama yang diperlukan untuk menciptakan karya-karya besar umat manusia. Para peneliti psikologi cenderung memahami kepercayaan sebagai suatu proses kognitif internal dari orang yang mempercayai dan dipercayai. Sehingga kepercayaan mempunyai arti yang sangat penting, karena tanpa adanya kepercayaan tidak akan tercipta suatu pengakuan dan kedamaian.

Pembahasan berikut ini akan menguraikan derajat kepercayaan publik yang ada di Kabupaten Bojonegoro terhadap pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan:

a. *Political Trust*

Kepercayaan publik sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu mencakup kepercayaan warga terhadap negara atau pemerintah termasuk di dalamnya ada institusi, kebijakan, dan para pejabatnya

yang dianggap akan selalu bertindak sesuai dengan harapannya. Seseorang memiliki kepercayaan kepada orang lain ketika orang tersebut memiliki pengetahuan yang memadai tentang orang yang dipercayainya dan menilai bahwa orang tersebut memang dapat dipercaya.

Kepercayaan publik dalam perspektif psikologi melibatkan penilaian warga tentang nilai-nilai moral dan karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga politik, ataupun para pejabat publik tertentu. Penilaian yang dilakukan warga tentunya sangat bergantung pada persepsi warga mengenai kejujuran dan kredibilatas pemerintah, institusi politik, dan para pejabatnya. Pengalaman berinteraksi dan pengetahuan mereka tentang institusi pemerintah dan para pejabatnya akan turut membentuk persepsi mereka mengenai seberapa jauh pemerintah dan para pejabatnya dapat dipercaya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari segi kepercayaan politik secara keseluruhan kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama periode kepemimpinan Pak Yoto menunjukkan peningkatan. Hal ini diakui oleh Sekretaris YKIB dan Kepala Desa Campurejo bahwa di masa kepemimpinan beliau banyak terjadi perubahan yang lebih baik, lompatan-lompatan, dan berbagai terobosan.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Miller dan Listhaug dalam Blind (2010), dikatakan bahwa kepercayaan politik sebagai penghakiman warga negara terhadap sistem dan perilaku politik yang mampu menunjukkan sikap responsif dan melakukan apapun yang benar tanpa pengawasan secara terus menerus, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan hal tersebut melalui keseriusannya untuk mau mendengar masyarakatnya. Sehingga, sikap responsif tersebut berpengaruh pada progres penyelesaian tiga masalah pokok yang ada pada tahun 2008. Tiga masalah tersebut di antaranya politik uang yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah, kemampuan anggaran rendah akibat korupsi, serta partisipasi masyarakat rendah. Melalui semangat perbaikan dan mental model akhirnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu menunjukkan pencapaian yang meningkat. Beberapa capaian tersebut di antaranya:

1. Hasil survei IKM pada empat unit pelayanan publik Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Dispendukcapil, UPTD Puskesmas Bojonegoro, dan UPTD Puskesmas Dander di tahun 2017 menunjukkan kategori baik, yaitu dengan *range* nilai antara 2,51-3,25 atau konversi IKM 62,51-81,25.
2. Nilai tukar petani yang pada tahun 2008 sebesar 98,74 menjadi 106,15 di tahun 2016.

3. Angka pengangguran pada tahun 2008 sebesar 5,93 mampu diturunkan hingga menjadi 3,1 di tahun 2016.
4. Tingkat kemiskinan yang mencapai angka 23,87 di tahun 2008 mampu diturunkan menjadi 13,98 di tahun 2016. Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan ini membuat Kabupaten Bojonegoro keluar dari 10 kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur.
5. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan. Di mana pada tahun 2015 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas mencapai angka 5,99 dan pertumbuhan ekonomi dengan migas mencapai hingga angka 19,87.

Di Kabupaten Bojonegoro walaupun secara keselurahan kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan peningkatan capaian kinerja yang baik, masih ada beberapa instansi yang belum menunjukkan kinerja yang baik. Menurut Redaktur Radar Bojonegoro, masih banyak OPD yang tidak sejalan dengan keinginan bupati untuk *open* dan belum diketahui penyebabnya mengapa tataran OPD sulit untuk *open*. Selain itu juga ditambahkan oleh Sekretaris YKIB dan salah satu pegiat AJI bahwa pihak DPRD kurang maksimal dalam menjalankan sisi kontrolnya dan aturan yang disusun DPRD belum bisa mengikat program yang dibuat apabila berganti kepemimpinan.

Jika dari sisi keamanan, aparat keamanan baik polisi, satpol PP, ataupun TNI mampu menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten

Bojonegoro. Terbukti dari terkendalinya demo besar-besaran yang terjadi di daerah Blok Cepu terkait ganti rugi fler (pembakaran gas uap) dan menurunnya gerak unjuk rasa. Disampaikan oleh Sekretaris YKIB bahwa pihak kepolisian mempunyai pendekatan-pendekatan dan penanganan yang menarik dalam mengendalikan emosi massa.

Kemudian berdasarkan perspektif seseorang terkait setuju atau tidak setuju maupun percaya atau tidak percaya kepada pemerintah terhadap program yang dikeluarkan pemerintah itu tergantung pada sejauh mana program yang dikeluarkan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena menurut Sekretaris YKIB selama ini program pemerintah ada yang sesuai, ada yang hanya untuk *spirit branding*. Tetapi mengenai keterbukaan yang mana masyarakat difasilitasi, disediakan ruang untuk mengadu dan menyampaikan keluhannya, mendapat respon yang positif dari masyarakat karena masyarakat merasa kebutuhannya untuk menyampaikan aspirasi diberi ruang.

Terkait dengan sesuai atau tidaknya tindakan pemerintah terhadap agenda yang telah ditetapkan tidak selalu menunjukkan kesesuaian. Hal ini dikarenakan selama proses implementasi terkadang menemui suatu kendala yang biasanya bersumber dari jajaran pemerintah itu sendiri. Dikatakan oleh Sekretaris YKIB jka jajaran pemerintah kadang kurang bisa menterjemahkan apa yang dikehendaki pemimpin. Namun kalau terkait OGP, menurut salah satu pegiat AJI tindakan yang dilakukan

pemerintah sudah sesuai, mulai dari perencanaan tingkat atas sampai bawah.

Di samping itu, menurut Leach dan Sabatier dalam Blind (2010), adanya kepercayaan politik juga didasarkan pada evaluasi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dan keseriusan pemimpinnya dalam yang ditunjukkan melalui kepribadian dan kehadiran di forum publik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyikapi dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya mampu menunjukkan sikap yang bisa dikatakan baik. Hadirnya pejabat publik dalam forum publik membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah terbuka dan serius melayani masyarakatnya. Bukan hanya melayani keluhan-keluhan masyarakat, tetapi kritik dan aspirasi juga diterima dengan senang hati oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang disampaikan oleh Direktur BI bahwa hadirnya bupati, sekretaris daerah, kepala-kepala OPD, dan beberapa legislatif telah menunjukkan komitmen terhadap apa yang sudah dibuat. Disampikan juga oleh Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro bahwa apa yang dikeluhkan masyarakat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan, sehingga bisa dikontrol apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.

b. *Social Trust*

Kepercayaan sosial merupakan harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama-sama oleh anggota masyarakat. Kepercayaan sosial ada untuk menumbuhkan keyakinan pada orang lain atas kejujuran dan integritasnya.

Di Kabupaten Bojonegoro, empat sekawan yang terdiri dari akademisi, *business*, *civil society*, dan *government* mampu menunjukkan kerjasama dan kolaborasi yang baik. Antar CSO sering bertemu untuk bertukar ide membahas isu-isu strategis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur BI, mereka menyadari bahwa untuk membangun perencanaan di Bojonegoro dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain. CSO di Bojonegoro selain bekerjasama dengan sesama CSO, mereka juga membantu memberikan bimtek kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Di samping itu, CSO dan pihak lain di Kabupaten Bojonegoro terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016-2017. CSO dan pihak lain tersebut, diantaranya:

a. Bojonegoro Institute (BI)
b. Sinergantara
c. Mediatrac
d. Institute Development for Society (IDFoS)
e. PRC

f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Sesuai dengan teori Putnam dalam Blind (2010) mengenai *social capital* yang dinyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam sebuah komunitas dan kepercayaan interpersonal di antara para anggota, saling berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan sosial secara menyeluruh dalam masyarakat tertentu, maka hal tersebut telah menyatukan antar elemen di Kabupaten Bojonegoro dalam usaha mencapai tujuan umum dan saling bermanfaat. Di samping itu, pada dasarnya juga kepercayaan sosial mempunyai tiga elemen dasar, yaitu adanya kepercayaan, sistem nilai/norma, dan hubungan kerja sama (Imazizah, 2013). Ketiga elemen tersebut merupakan bagian dari modal sosial yang berperan kuat mendorong kesejahteraan sosial. Hal tersebut disetujui oleh Keele dalam Blind (2010) bahwa *social capital* memiliki pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap kepercayaan dan kinerja pemerintah.

Berdasarkan analisis kepercayaan politik dan kepercayaan sosial di Kabupten Bojonegoro, dapat dikatakan bahwa derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro cenderung baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu mengelola sumber daya publik secara efektif dan berguna untuk kepentingan umum. Tingkat kepercayaan yang dipengaruhi oleh apakah pemerintah handal, responsif, adil, mampu melindungi masyarakat dari resiko, dan menyampaikan pelayanan publik efektif, mampu ditunjukkan oleh

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui media-media pelayanan yang telah disediakan. Capaian yang dihasilkan juga menunjukkan hasil yang signifikan. Ditambah pula dengan keterbukaan pemerintah dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan mampu menunjukkan kolaborasi yang baik.

2. Realisasi *open government* di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan prinsip-prinsip *open government*

Keterbukaan mengacu pada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Pemerintah yang baik akan bersifat transparan dan terbuka dalam memberikan informasi data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan melakukan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Hak untuk tahu yang melekat pada setiap warga negara telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sistem keterbukaan pemerintah di Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk

mendapatkan informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Undang-undang ini juga mengharuskan pembentukan kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyimpan, mencatat, dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik. Di Kabupaten Bojonegoro, instansi yang sudah ada PPID berjumlah 74 dari yang seharusnya ada 81. Instansi yang belum ada PPID yaitu BUMD dengan jumlah 7. Kemudian untuk instansi yang belum mempunyai SK PPID yaitu Satpol PP. Secara keseluruhan jumlah personil PPID yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berjumlah 250 orang.

Open government atau keterbukaan pemerintah didefinisikan oleh OECD sebagai suatu budaya tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada inovasi dan keberlanjutan kebijakan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang nantinya membantu perkembangan demokrasi dan pertumbuhan inklusif. Di sisi lain, disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro jika keterbukaan tidak hanya pemerintah membuka data, membuka diri tentang apa yang dimiliki, tetapi juga harus mau menerima kritikan dan saran. Karena ketika pemerintah mau dikritik, berarti pemerintah mau jadi yang lebih baik lagi.

Realisasi *open government* yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan prinsip-prinsip *open government*, yaitu sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi merupakan suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi dengan disertai ketersediaan informasi yang lengkap dan diperlukan oleh seseorang atau kelompok untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan pengambilan keputusan kolektif. Transparansi sangat dibutuhkan dan wajib dilakukan oleh suatu institusi maupun lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap khalayak umum guna melakukan bentuk pengawasan terhadap tindakan yang akan atau telah diambil dalam institusi tersebut.

Di Kabupaten Bojonegoro, transparansi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak hanya dalam informasi keuangan, tetapi juga kontak para pejabat publik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sigit yang menyatakan bahwa pemerintah sudah membuka semua anggaran di web sampai pada rinciannya dan dicantumkan juga nomor HP pejabat pengelola keuangan. Masyarakat Bojonegoro maupun masyarakat luar yang ingin mengetahui APBD Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2009-2018 bisa membuka web BPKAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (bpkad.bojonegoro.go.id) di menu transparansi. Transparansi anggaran selain bisa diakses di website juga dijabarkan pemerintah melalui banner-banner atau baliho-baliho yang ditempatkan di tempat-tempat strategis. Hal ini terbukti dari sudah terpasangnya banner-banner anggaran setiap OPD yang ada di kantor pemerintah Kabupaten Bojonegoro lantai 1, 2, dan 4. Jadi siapapun yang datang ke kantor pemkab bisa secara langsung melihat besaran anggaran yang digunakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro

beserta realisasinya. Tidak hanya pada tingkat kabupaten saja, tetapi sampai pemerintahan desa juga melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Heri selaku Camat Gondang bahwa setelah APBDes disahkan maka selanjutnya diumumkan terutama di kantor dan tempat-tempat strategis.

Transparansi keuangan penting untuk dipublikasikan karena telah menjadi kebutuhan warga negara dan telah mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana dijelaskan bahwa:

> "Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum."

Dalam UU tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Adapun batasan transparansi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbunyi:

> "Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan."

Sistem keterbukaan informasi lain yang ingin didapatkan masyarakat Bojonegoro bisa melalui desk PPID badan publik dengan alur permohonan informasi sebagai berikut:

1. Warga mengajukan permohonan informasi pada PPID badan publik terkait melalui email, telepon, surat, atau datang langsung ke PPID badan publik yang dituju.
2. Bila syarat permohonan tidak lengkap maka akan diklarifikasi dan diberi tanda bukti. Namun apabila syarat permohonan lengkap maka akan diberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 10 hari + dengan perpanjangan 7 hari kerja.
3. Setelah itu, masyarakat yang mengajukan permohonan informasi akan ditanggapi dengan diberi tahu terkait ada atau tidaknya informasi, cara pengiriman informasi, dan administrasi informasi. Tetapi apabila pihak PPID badan publik tidak menanggapi, masyarakat bisa mengajukan keberatan kepada atasan PPID.
4. Jika setelah ditanggapi dan kedua belah pihak sepakat dengan informasi yang dimaksud, maka masyarakat dinyatakan telah mendapat informasi yang sesuai. Namun apabila masyarakat merasa permohonan informasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat bisa mengajukan surat keputusan penolakan PPID atau mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Mekanisme pengajuan informasi di Kabupaten Bojonegoro seperti yang dijelaskan di atas telah sesuai dengan mekanisme yang ada pada UU Nomor 14 Tahun 2008 BAB VI terkait mekanisme memperoleh informasi.

Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melayani pertanyaan-pertanyaan publik melalui berbagai akses, di antaranya ada dialog publik, LAPOR!, SMS, dan *on air* radio Malowopati. Fasilitas ini disediakan pemerintah untuk menjembatani apa yang ingin disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Dengan begitu, secara tidak langsung pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mendorong partisipasi masyarakat melalui penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada daerah sebagaimana yang disinggung dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, laporan masuk sistem LAPOR! dari tahun 2015-2017 mencapai ribuan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1.439 laporan, tahun 2016 sebanyak 2.478 laporan, dan tahun 2017 sebanyak 1.813 laporan. Kalau melihat dari grafik permohonan informasi melalui radio Malowopati, permohonan informasi paling banyak ada pada bidang infrastruktur dan pemerintahan desa, persentasenya sebesar 16%. Kemudian untuk komplain terendah ada pada pelayanan masyarakat dan perhubungan yang hanya 4%.

Berbagai laporan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat pada diagram pengelolaan laporan, laju verivikasi, status

laporan, dan laju tindak lanjut yang ada di penyajian data. Jumlah laporan pada 1 April 2018 mencapai 6.088 laporan, 85% telah disetujui untuk ditindaklanjuti dan 15% masih diarsipkan. Tidak ada laporan yang dibiarkan begitu saja. Laju verifikasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar kurang dari tiga hari. Persentase laporan yang diverifikasi kurang dari tiga hari sebesar 79%. Laju tindak lanjut laporan sebagian besar juga dikerjakan kurang dari lima hari kerja, dengan persentase 86%. Kemudian untuk data status laporan pada 7 Desember 2016, jumlah laporan sebanyak 3.011 yang telah selesai ditindak lanjuti sebesar 97%. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap pelaporan masyarakat.

Melihat uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa transparansi lembaga publik memiliki urgensitas sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepercayaan. Pemerintah yang terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik lebih dipercaya daripada pemerintah yang relatif tertutup. Medina dan Rufin dalam Salle (2011) menjelaskan bahwa "*transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction*." Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil.
2. Untuk meningkatkan pengawasan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan pembangunan warga perlu menyertakan pengawasan masyarakat, dan

pengawasan masyarakat akan efektif bila warga masyarakat memperoleh informasi terkait program/kegiatan secara tepat.

3. Warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui. Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Hak-hak warga negara menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap negara. Warga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas biasa diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Istilah akuntabilitas dalam teori dan praktek mengenai kebijakan publik memerlukan penjelasan yang cukup terperinci. Secara tradisional, akuntabilitas memiliki makna sebagai kemampuan untuk memberi jawaban terhadap perilaku atau tindakan seseorang. Kemudian secara umum, para pegawai publik dan organisasinya hanya dikenai tanggung jawab terhadap tindakan legal saja. Hal inipun baru diberikan ketika diminta oleh pihak yang berwenang, atau dengan kata lain pertanggungjawaban hanya mementingkan segi administrasi saja. Walaupun demikian, pihak publik tidak menganggap bahwa pertanggungjawaban para

pegawai publik dan agen-agennya hanya terbatas pada aspek legalitas tindakan formal saja, tetapi lebih dari itu, di mana ada beberapa cakupan aspek lain seperti perilaku organisasi dan profesionalitas, elemen politik, dan moralitas tindakan administrasi sebagai aspek penting yang juga perlu dipertanggungjawabkan para aparatur.

Bentuk pertanggungjawaban hasil kerja pemerintah ada dua, yaitu pertanggungjawaban secara internal dan eksternal. Secara internal, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membuat LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan telah diperiksa oleh BPK. Laporan tersebut dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 berhasil mendapatkan gelar WTP. Itu artinya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menyediakan akses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban eksternal. Sehingga, masyarakat bisa mengakses apa yang telah dilaporkan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan web tersendiri untuk mengakses SAKIP. Masyarakat Bojonegoro bisa mengakses di http://silakip.bojonegorokab.go.id/. Di dalam web tersebut masyarakat akan memperoleh informasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Brautigam dalam Sjamsuddin (2007:56) yang mengatakan bahwa akuntabilitas keuangan artinya aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat

dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan hal tersebut. Terbukti dari dipublikasikannya realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban secara eksternal melalui website badan-badan publik dan baliho-baliho/banner. Kelembagaan pemerintah yang transparan dan berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut berminat untuk menerima kontrol masyarakat dan senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan diamati oleh rakyat.

Diuraikan juga dalam penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik. Amanat itulah yang dijadikan pedoman pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk senantiasa menyampaikan apa yang telah dilakukan guna menjaga kepercayaan publik agar pemerintah mendapat pengakuan dari rakyat atas kinerjanya. Karena menurut Kasubid Sosial, Politik dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bojonegoro, tidak ada artinya jika pemerintah membangun tetapi tidak ada kepercayaan.

c. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi

dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun atau membentuk Raperda/Perda. Hal tersebut sejalan dengan hakekat otonomi daerah yang berupa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkatan partisipasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro sudah ada pada tingkat *active relationship*, di mana masyarakat terlibat dalam proses kebijakan. Disampaikan oleh Mas Tulus selaku salah satu pegiat AJI bahwa mulai dari musrenbangdes, musrenbang kecanatan, sampai musrenbang kabupaten ada perwakilan-perwakilan masyarakat yang diajak untuk menyusun program pemerintah, sehingga hal ini sebagai langkah awal untuk mengarahkan masyarakat bersikap aktif. Hal ini sebagimana yang disyaratkan dalam *good governance* di mana ada dua sumber partisipasi di luar unsur negara (Sjamsuddin, 2007:74), yaitu:

1. Unsur masyarakat (*civil society*) baik secara individu seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman, tokoh masyarakat, ormas atau LSM sesuai dengan keahlian atau pengalamannya.
2. Unsur dari sektor swasta (*privat sector*) seperti pengusaha, industriawan, pedagang baik secara pribadi maupun tergabung dalam organisasi bisnis seperti Gapensi, Kadin, Hippmi, dan sebagainya.

Selain itu menurut Bapak Edi selaku Kepala Desa Campurejo adanya partisipasi aktif dari masyarakat membuat sisi kontrol pemerintah menjadi lebih mudah ketika ada titik lemah. Walaupun di sisi lain dikoreksi oleh Thoha dalam Sjamsuddin (2007:90) di mana dalam masyarakat yang demokratis dan kompleks hampir tidak memungkinkan untuk melakukan dan memperoleh kontrol serta partisipasi masyarakat yang sempurna. Akan

tetapi kita bisa menaruh suatu harapan yang minim sekalipun dengan mengetengahkan suatu cara pemilihan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pejabat-pejabat dalam birokrasi pemerintah.

Upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses untuk berperan serta. Suatu proyek pembangunan diadakan untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan. Sehingga hal inilah yang disebut transparansi, akuntabilitas, amanah dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan telah difasilitasi pemerintah dengan adanya dialog publik, LAPOR!, SMS radio Malowopati, dll, karena dari ruang partisipasi tersebut hasilnya akan dijadikan acuan pemerintah untuk proses penyusunan arah kebijakan pembangunan.

Selain itu, beberapa CSO juga berpartisipasi langsung dalam penyusunan Rencana Aksi OGP. Walaupun begitu, tingkat *active relationship* di Kabupaten Bojonegoro juga belum bisa dikatakan ideal sekali. Karena seperti yang disampaikan oleh Direktur BI bahwa ketika Kabupaten Bojonegoro langsung menginjak pada dialog, tanpa ada tahapan-tahapan sebelumnya, dialog hanya jadi tempat mengeluh.

Melihat teori Arnstein tentang tangga partisipasi dalam Mulluk (2007), Arnstein menyatakan terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci dalam delapan anak tangga partisipasi. Tiga derajat partisipasi yang dimaksud yaitu:

1. Nonpartisipasi. Aktivitas partisipasi pada derajat ini merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya tidak mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Pada derajat ini terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi dan terapi.
2. Tanda partisipasi. Derajat ini melibatkan aktivitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlihat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam derajat ini terdapat tiga anak tangga yaitu pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman.
3. Kuasa warga. Warga mempunyai kendali yang lebih kuat dalam memberikan peluang keterlibatan pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. derajat ini menunjukkan adanya retribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini yaitu mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan sampai pada yang tertinggi yaitu kendali warga.

Berdasarkan uraian teori di atas, derajat partisipasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana disampaikan oleh Direktur BI masih berada pada derajat tanda partisipasi. Memang benar pemerintah sudah membuat ruang komunikasi seperti halnya dialog publik, tetapi ada suatu hal yang perlu diperhatikan. Beberapa masyarakat yang hadir dalam dialog

publik belum mempunyai data dan informasi sehingga mereka hanya mengeluh dan mendengarkan. Disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Kominfo Kabupaten Bojonegoro kadang masyarakat yang datang ke dialog publik itu ada yang mengeluhkan hutangnya, suaminya yang pengangguran, dan kondisi-kondisi yang lain. Biarpun demikian, masyarakat antusias dengan adanya ruang partisipasi ini. Masyarakat bisa menyampaikan apapun yang menjadi *uneg-uneg*nya. Ditambahkan oleh Bapak Sigit kalau dialog publik libur juga menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

d. Inovasi dan Teknologi

Daya kreativitas dan inovasi yang tinggi harus dimiliki birokrasi untuk dapat berperan dalam lini kehidupan masyarakat. Teknologi hadir untuk menawarkan berbagai informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan ruang *online* yang mudah dan aman sebagai *platform* pemberian layanan, pelibatan masyarakat, serta berbagi informasi dan gagasan.

Inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menunjang berbagai penyampaian informasi, partisipasi, dan kolaborasi tidak hanya dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam bidang pelayanan, birokrasi, dan aturan. Inovasi bidang teknologi di antaranya ada:

1. SISMON (Sistem Monitoring)/SISPAN (Sistem Pantauan)

   SISPAN adalah bentuk baru dari SISMON, karena dulu ketika masih menggunakan SISMON kecamatan tidak dimasukkan sistem, dan

sekarang dimasukkan. SISPAN dilaksanakan untuk menilai hasil indikator capaian kinerja., tujuannya untuk mengetahui target RPJMD, dan penyerapan anggaran apakah sudah tepat atau belum.

2. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

   LAPOR! adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

3. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

   Siskeudes sebagai aplikasi keuangan desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh BPK yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola keuangan desa yang lebih efektif dan efisien.

4. Bojonegoro *Open System* (BOS)

   Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang memuat informasi mengenai perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan lelang. Selain itu untuk membuka partisipasi dan pengawasan dari masyarakat terhadap proyek pembangunan fisik yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro.

5. E-Musrenbang

E-Musrenbang merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginput prioritas perencanaan pembangunan yang meliputi sarana prasarana, ekonomi, pemerintahan dan kemasyarakatan. Aplikasinya bisa diakses melalui www.musrenbang.bojonegorokab.go.id. Di halaman web tersebut bisa dilihat usulan-usulan yang masuk, yang disetujui, maupun yang ditolak pada kegiatan musrenbang Kabupaten Bojonegoro.

Inovasi lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait peningkatan kinerja pemerintah daerah yaitu adanya evaluasi kinerja berbasis IT. Sebagaimana yang disampaikan Kasubid Sosial, Politik dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bojonegoro mengenai manajemen review. Kegiatan ini diadakan setiap hari Jumat di rumah dinas bupati dengan agenda memaparkan hasil kinerja di hadapan bupati, wakil bupati, dan perangkat lain.

Dari segi inovasi aturan, banyak aturan-aturan baru yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait mendukung keterbukaan di Kabupaten Bojonegoro, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro.
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro.
7. Surat Keputusan Ketua PPID Nomor 188/038/412.45/2015 tentang SOP Layanan Permohonan Informasi melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan integrasi layanan permohonan melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta desk layanan informasi PPID Kabupaten Bojonegoro.

Inovasi aturan di atas digunakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menjaga komitmen dalam merealisasikan prinsip-prinsip *open government* dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Harapannya agar setiap daerah di Kabupaten Bojonegoro bisa secara optimal merealisasikan prinsip-prinsip tersebut dan terarah.

Inovasi menjadi hal yang sangat penting karena membantu menyelesaikan masalah di kehidupan masyarakat, membantu

pengembangan suatu daerah, dan menjadikan suatu daerah mendapat legitimasi karena selalu bertumbuh dengan ide-ide baru (Rizvi dalam Noor, 2013). Disetujui juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani bahwa pengembangan inovasi penting dilakukan karena dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Selain itu, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 386, 387, dan 388 juga menjelaskan perlu adanya inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah (kepala daerah, SKPD, DPRD) bahkan lapisan masyarakat. Kemudian PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Pasal 19 menyebutkan:

> "Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negative kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah."

Dengan demikian, inovasi bukanlah suatu hal yang mengubah tatanan kebijakan pemerintah daerah, melainkan *compatible* dengan nilai-nilai, norma, dan hukum. Artinya adalah suatu ide atau gagasan yang dalam pelaksanannya melanggar kebijakan dan aturan hukum, maka dapat dipastikan hal tersebut bukanlah inovasi.

Melihat dari realisasi prinsip-prinsip *open government* di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengupayakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang dilakukan mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Adanya transparansi baik dari segi keuangan dan pelayanan informasi lain, membuat masyarakat mudah berinteraksi dengan pemerintah, masyarakat tidak takut mengkomunikasikan apa yang

diinginkan karena pemerintah membuka ruang komunikasi. Bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik secara internal dan eksternal menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat beranggapan negatif kepada pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Sehingga bentuk pelaporan pertanggungjawaban dikemas sebaik-baiknya agar masyarakat percaya bahwa pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada dengan baik. Ruang partisipasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Bojonegoro dalam berbagai kegiatan. Di samping itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam penyusunan arah kebijakan, sehingga tercipta bentuk partisipasi yang aktif. Tidak hanya pemerintah yang mengendalikan masyarakat agar masyarakat mengikuti apa maunya pemerintah, tetapi masyarakat juga turut serta memberikan masukan-masukan dan aspirasinya. Kemudian dari segi inovasi dan teknologi, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Adanya inovasi dan teknologi juga mempermudah akses masyarakat untuk memantau bagaimana kinerja pemerintah.

3. Analisis lingkungan strategis dari pelaksanaan *open government* di Kabupaten Bojonegoro

Lingkungan secara umum dimaksudkan sebagai kumpulan dari berbagai faktor lingkungan makro-eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi dinamika organisasi. Pada setiap sektor lingkungan, terdapat banyak sub faktor yang masing-masing saling berinteraksi membentuk suatu kekuatan yang nantinya mempengaruhi strategi pemimpin dalam mengambil suatu keputusan.

Lingkungan yang berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografi, dan lainnya dapat berpengaruh pada *inputs*, yang mana berbagai tuntutan bisa langsung ditransformasikan ke dalam sistem politik atau karena pengaruh lingkungan juga bisa mati dan tidak bisa diteruskan pada sistem politik. Pengaruh lingkungan pada *withinputs* bisa mewarnai kualitas, kuantitas, dan kelancaran proses konversi yang mana pada intinya juga akan berpengaruh terhadap *output* (Sjamsuddin, 2007).

Faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan *open government* tentunya dipengaruhi juga oleh kedua faktor lingkungan berikut ini:

a. Analisis Lingkungan Internal

Unsur kekuatan dan kelemahan pada dasarnya merupakan faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkup tugas institusi tertentu. Kekuatan merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah atau

institusi dibandingkan dengan daerah atau institusi lain. Analisis kondisi sosial ekonomi daerah dalam kekuatan tersebut dapat berupa tingkat kesuburan tanah yang lebih baik, potensi sumber daya alam yang lebih besar dan bernilai tinggi, kualitas pendidikan yang lebih baik, kondisi keuangan yang lebih mapan, dan lain-lain. Disampaikan oleh Sjafrizal (2014:247) bahwa analisis akan menjadi lebih konkrit dan meyakinkan apabila semua unsur kekuatan dapat dibuktikan secara kuantitatif dengan menggunakan indikator dan data pendukung tertentu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adanya UU KIP dan regulasi daerah terkait pelaksanaan *open government* dijadikan kekuatan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam malaksanakan *open government*. Karena melalui undang-undang tersebut secara tidak langsung memaksa setiap badan publik untuk transparan kepada masyarakat. Baik transparan dalam penyampaian informasi maupun penganggaran. Ketika pemerintah mampu melakukan transparansi dengan baik, maka akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Telah dijelaskan pula dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 bahwa undang-undang ini mengamanatkan badan publik untuk menjalankan kewajiban sebagai berikut:

1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

3. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban segaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Melihat uraian undang-undang di atas, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menjalankan kewajibannya dengan menyediakan akses ruang komunikasi publik kepada pemerintah melalui LAPOR!, dialog publik, sms atau *on air* radio malowopati, dan desk PPID. Di mana semua akses komunikasi tersebut dapat diakses dengan mudah dan pemerintah juga senantiasa melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan maupun anggaran kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Di samping itu, regulasi-regulasi daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait pelaksanaan *open government* turut menguatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan *open government*. Sebagai contoh yang diuraikan dalam Perbup Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Pasal 4 bahwa manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik dalam pelaksanaannya berasaskan:

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Partisipatif
5. Profesionalitas
6. Persamaan dalam perlakuan (tidak diskriminatif)

7. Keterbukaan
8. Akuntabilitas
9. Ketepatan waktu
10. Kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan

Dengan begitu pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terjaga komitmennya dalam menyelenggarakan pemerintahan karena selain dipedomani dengan regulasi nasional juga dipedomani regulasi daerah yang didalamnya terdapat asas-asas tersebut sehingga realisasi *open government* dapat terlaksana dengan baik.

Di samping adanya unsur kekuatan, faktor lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kelemahan. Kelemahan merupakan kekurangan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi tertentu dibandingkan dengan daerah atau institusi lainnya. Kelemahan dapat muncul dalam bentuk terbatasnya atau relatif kecilnya potensi sumber daya alam, posisi daerah yang kurang menguntungkan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Sama halnya dengan unsur kekuatan, analisis kelemahan akan menjadi lebih konkrit dan meyakinkan apabila dapat didukung oleh data dan informasi yang bersifat kuantitatif dan terukur.

Kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan *open government* yaitu:

1. Adanya rasa ketakutan tersendiri dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro di awal-awal keterbukaan

   Ketakutan tersebut dikarenakan tidak terbiasa terbuka sehingga pemerintah mempunyai asumsi takut diserang ketika akan membuka anggaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Informasi

dan Aspirasi Publik Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Padahal kunci utama dari *open government* adalah transparansi. Adanya transparansi memungkinkan tidak ada lagi dinding pemisah antara kelembagaan dan masyarakat dalam melakukan tugas atau fungsi masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU KIP bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi.

2. Sumber daya manusia yang kurang berkompeten

   Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat vital bagi terwujudnya kinerja yang produktif, efektif, dan efisien. Kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Menurut Kepala Desa Campurejo dan Camat Gondang, diperlukan adanya penguatan SDM karena rata-rata SDM di pemerintahan desa perlu dikembangkan lagi. Hal tersebut disetujui oleh Siagian (2001:182) karena pengembangan SDM merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun menjawab tantangan masa depan. Sehingga nantinya SDM akan mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa (Sumarsono, 2003).

3. Belum semua desa dan OPD teknis berkomitmen menjalankan *open government*

   Disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa pemerintahan desa yang benar-benar terbuka sesuai UU KIP hanya 20% atau sekitar 84 desa saja dengan total desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 419 desa. Ditambahkan juga oleh Mas Awe jika komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menjalankan OGP itu sudah baik, tapi Mas awe masih melihat dari OPD teknis belum sepenuhnya menjalankan komitmen ini. Padahal sebuah komitmen sangat diperlukan dalam hal apapun agar mendapatkan hasil yang optimal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mowday et.al. dalam Sufya (2013) yang mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi khusus, meliputi kepercayaan, dukungan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya yang sungguh-sungguh untuk kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Unsur peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar daerah atau ruang lingkup tugas tertentu tetapi berpengaruh terhadap masa depan institusi tersebut. Peluang dapat diartikan sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah atau institusi bersangkutan.

Peluang sebagai unsur yang dari luar biasanya datang dari segi ekonomi, sosial, kebijakan, dan aturan pemerintah atau karena adanya perubahan teknologi baru.

Peluang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan *open government* terletak pada:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat

   Perilaku pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mau melibatkan pihak-pihak di luar DPRD dan pemerintah daerah berguna untuk:

   a. menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman-pengalaman masyarakat dan dunia usaha sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik.
   b. menjamin kebijakan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
   c. menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

   Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pegiat AJI dan Camat Gondang bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan program itu ada, mulai dari musrenbangdes sampai musrenbang kabupaten ada perwakilan-perwakilan yang diajak. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan kebijakan tentunya membatu proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, membantu pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan membantu menertibkan

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007).

2. Komando dari pusat untuk selalu membuat rencana aksi *open government*

   Sejak awal berdirinya OGI di tahun 2012 pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengupayakan proses perumusan kebijakan yang semakin inklusif. Komitmen ini berangkat dari keyakinan bahwa hasil pembangunan yang inklusif hanya dapat dihasilkan melalui sebuah proses perencanaan dan pengawasan pembangunan yang juga inklusif. Langkah yang telah disepakati bersama dituangkan dalam Rencana Aksi OGI. Dengan begitu Kabupaten Bojonegoro senantiasa membuat renaksi tersebut untuk menjaga komitmen melaksanakan *open government*.

3. Kemajuan teknologi

   Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah ada. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pun merasa tertantang dengan hal tersebut hingga akhirnya membuat berbagai portal online untuk menunjang kinerjanya. Kemajuan teknologi dianggap oleh Kepala Desa Campurejo sebagai hal sangat membantu karena adanya sistem *controlling* secara online yang akhirnya membuat masyarakat bisa secara langsung mengoreksi dan pengawasi tindakan pemerintah apabila terjadi penyimpangan. Diungkapkan juga oleh

Franklin (1989) bahwa teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini. Di samping itu teknologi juga sebagai sarana memecahkan masalah mendasar dari setiap peradaban manusia (Sardar, 1987).

Terlepas dari unsur peluang, faktor eksternal selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman diartikan sebagai suatu kondisi atau permasalahan yang datang dari luar dan dapat menimbulkan kesulitan, kendala, atau tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi tertentu. Ancaman dapat muncul sebagai akibat dari kemajuan dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, perubahan kebijakan dan aturan atau situasi ketertiban dan keamanan yang membahayakan proses pembangunan. Diperjelas lagi oleh Sjafrizal (2014:248) yang mengatakan jika kondisi keamanan dan ketertiban umum atau perubahan sudut pandang masyarakat dan kemajuan teknologi informasi dapat pula menimbulkan ancaman tertentu bagi suatu daerah atau institusi.

Adapun ancaman yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan *open government* yaitu:

1. Adanya *fake* akun yang menyebarkan berita hoax

   Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudahan dalam membuat akun-akun media sosial memicu oknum-oknum tertentu untuk membuat *fake* akun demi

kepentingan pribadi. Kemudian penyampaian informasi yang terjadi begitu cepat di mana setiap orang telah mudah memproduksi informasi melalui beberapa media sosial seperti *facebook, twitter*, ataupun telpon genggam seperti *whatsapp* dan lain sebaginya tanpa difilter dengan baik membuat seseorang mudah terpengaruh berita hoax. Hal inilah yang diwaspai oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena disampaikan Bapak Sigit bahwa bisa saja satu orang yang membuat 50 *fake* akun untuk menyerang Kabupaten Bojonegoro yang hanya satu admin.

Penyebaran berita palsu yang marak terjadi jika dikaitkan dengan etika pada internet adalah penyalahgunaan *freedom to speech*. *Freedom to speech* berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal yang menyalahgunakan apabila seseorang mempunyai batasan dalam mengemukakan pendapat dan memiliki fungsi masing-masing individu pada komunitas, menyalahkan seseorang, memuji seseorang, dan lain-lain dengan sebebas-bebasnya pada suatu komunitas (Floridi, 2010).

Dalam melawan berita hoax pemerintah telah memaparkan beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar berita hoax tersebut antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2. Potensi konflik politik

Transisi pemimpin memang selalu terjadi karena dalam pemerintahan pasti ada mutasi maupun pergantian pemimpin. Apalagi menjelang

pemilihan kepala daerah baru. Hal yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur yang bisa memicu terjadinya konflik politik. Muhammad Lukman Edy selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengklaim bahwa masih banyak penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah yang kurang memahami isi UU Pilkada, Peraturan Badan Pengawas Pemilu, maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maspriyadi disampaikan bahwa tidak semua orang berpartisipasi dan sadar terhadap *open government*, apalagi ada pelaporan OGP setiap tiga bulan. Belum lagi setelah ini terjadi pergantian bupati.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI menjelaskan bahwa menjelang pemilihan kepala daerah konflik dapat muncul akibat:

a. Ulah pejabat pertahanan yang hendak kembali mencalonkan diri.
b. Keterlibatan ASN dalam pilkada yang sengaja berpihak pada calon kepala daerah tertentu untuk mendapatkan promosi.
c. Keterlibatan TNI dan Polri dalam pilkada melalui dukungan ke calon-calon kepala daerah tertentu.
d. Politik uang.
e. Salah hitung dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara.
f. Adanya oknum KPU atau Bawaslu yang berpihak pada calon kepala daerah tertentu.
g. Kampanye yang mengandung SARA.
h. Konflik antara partai politik dengan kandidat.

Oleh karena itu, beberapa hal di atas perlu diperhatikan karena untuk kedepannya akan menjadi tantangan tersendiri dalam melanjutkan keterbukaan pemerintah dengan bupati baru

Dengan demikian, berdasarkan analisis lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, pelaksanaan *open government* di Kabupaten

Bojonegoro telah diperkuat dengan adanya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan, sehingga hal ini memaksa setiap badan publik untuk terbuka. Namun yang perlu diperhatikan dari sisi kelemahan adalah pemerintah harus lebih percaya diri dan menjunjung tinggi nilai kejujuran agar siap menghadapi masyarakat. Karena ketika pemerintah melakukan suatu tindakan ataupun kegiatan berdasarkan ketentuan yang ada, pasti masyarakat akan mudah menerima dan percaya. Di samping itu, perlunya memberikan pelatihan-pelatihan terkait pelaksanaan komponen-komponen *open government* baik di tingkat pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan desa agar setiap anggota di dalamnya cepat melakukan adaptasi apabila terjadi transisi pemimpin. Ditambah dengan memastikan ulang pelaksanaan *open government* di tingkat pemerintahan desa agar sesuai dengan UU KIP dan sejalan dengan pemerintahan kabupaten.

Kemudian dari sisi peluang, meningkatnya partisipasi masyarakat membuat pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih dekat masyarakatnya sehingga menciptakan ruang kolaborasi antar elemen. Adanya komando dari pusat untuk pembuatan rencana aksi *open government* turut serta menjaga komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan keterbukaan. Selanjutnya terkait ancaman, pemerintah tentunya harus lebih waspada dengan *fake* akun yang kapan saja bisa menyebarkan berita-berita hoax dan potensi-potensi konflik dalam transisi pemimpin apalagi menjelang pemilihan kepala daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Strategi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Open Government*, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro selama masa kepemimpinan Bupati Suyoto yang dilihat dari segi *political trust* dan *social trust* dapat dikatakan cenderung baik. Hal ini dikarenakan oleh realisasi *open government* di Kabupaten Bojonegoro yang didasarkan pada prinsip-prinsip *open government* telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan komitmen yang tinggi. Adanya ruang komunikasi yang disediakan oleh pemerintah baik *offline* maupun *online* mampu menjembatani komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Sehingga hal ini membuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, CSO, dan sektor privat bekerja sama dengan baik dan sedikit demi sedikit membuat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatkan. Di samping itu, terlaksananya realisasi prinsip-prinsip *open government* dalam membangun kepercayaan publik tentunya dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal melekat pada adanya UU KIP, penguatan SDM, dan pengoptimalan keterbukaan di tingkat pemerintahan desa. Sedangkan lingkungan eksternal dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat, komando pembuatan renaksi *open government* dari pusat,

adanya *fake* akun yang menyebarkan berita hoax, dan adanya potensi konflik politik.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi *open government* yang sudah baik harus tetap dipertahankan. Untuk yang belum baik seperti masih minimnya peran masyarakat dalam musrenbang perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai urgensitas dari kegiatan musrenbang. Kemudian untuk kegiatan dialog publik yang masih dianggap untuk tempat mengeluh, sesekali pemerintah perlu menyediakan sesi diskusi terkait isu strategis yang ada. Sehingga secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk ikut menanggapi dan menyampaikan solusi.
2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memberikan pelatihan-pelatihan maupun bimtek (bimbingan teknis) kepada pemerintahan desa terkait keterbukaan sesuai UU KIP. Pemberian pelatihan maupun bimtek bisa bekerja sama dengan pihak lain seperti CSO agar apa yang dilakukan pemerintahan desa sesuai dengan pemerintah kabupaten. Selain itu, kesadaran melakukan *open government* juga perlu dikuatkan pada perangkat-perangkat daerah agar yang benar-benar paham tidak hanya beberapa orang, tetapi semuanya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika adanya pergantian pemimpin maupun adanya mutasi.

3. Diperlukan suatu pendekatan yang bersifat mengedukasi masyarakat dalam menyikapi berbagai berita yang masuk agar masyarakat lebih kritis dalam menerima berita sehingga tidak mudah terpengaruh dengan adanya berita-berita hoax.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abner, dkk. 2017. *Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*, (Online), (https://mti.binus.ac.id, diakses pada 14 Agustus 2018).

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.

Aksa, Ahmad Husnan. 2010. *Etika Administrasi: Peranannya dalam Mewujudkan Good Governance*, (Online), (http://download.portalgaruda.org, diunduh pada 18 Januari 2018, pukul 20.00).

Ardiansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Baradei, Laila El. 2015. *Building Trust in Government*, (Online), (http://enid.org.eg/Uploads/PDF/PB27_government_trust.pdf, diunduh pada 23 Desember 2017, pukul 14.31).

Barsei, Adhitya N. 2018. *Pentingnya Inovasi bagi Pemerintah Daerah*, (Online), (www.kompasiana.com, diakses pada 14 Agustus 2018).

Blind, Peride K. 2006. *Building Trust in Government in The Twenty-First Century*. United Nation.

_____. 2010. Building Trust in Government: Linking Theory with Practice. *Building Trust in Government: Innovations in Governance Reform in Asia*. United Nation University Press.

Cheema, G Shabbir. 2010. Building Trust in Government: An Introduction. *Building Trust in Government: Innovations in Governance Reform in Asia*. United Nation University Press.

Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Edwards, Meredith. 2015. *The Trust Deficit-Concepts and Causes of Low Public Trust in Government*. Committee of Experts on Public Administration.

Floridi, L. 2010. *The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Haryono. 2010. Membangun Birokrasi untuk Good Governance (Relasi Pejabat Politis dan Pejabat Birokrasi pada Pemerintahan Lokal untuk Mewujudkan Good Governance). *Governance Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 1, No.2: 178.

Imazizah. 2013. *Kepercayaan Sosial*, (Online), (https://iimazizah.wordpress.com, diakses pada 14 Agustus 2018).

Kartika, Citrawati F, dkk. 2012. *Good Environmental Governance*. Malang: UB Press.

Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Review Implementasi Open Government Indonesia (2011-2014)*. Jakarta.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Koalisi untuk Kebebasan Informasi. 2003. *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka*. Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

_____. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Mulluk, M.R.K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UB.

_____. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Noor, Irwan. 2013. *Desain Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.

Nurmantu, Safri. 2018. *Kepercayaan Kepada Pemerintah (Trust in Government)*, (Online), (http://safrinurmantu.com/, diakses pada 1 Januari 2018).

OECD. 2016. *Open Government The Global Context and The Way Forward*, (Online), (https://www.oecd.org/gov/open-gov-way-forward-highlights.pdf, diunduh pada 17 November 2017, pukul 12.16).

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Prakarsa. 2017. *Open Government: Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa Jakarta.

Rahadian, Lalu. 2017. *Ada 9 Potensi Ancaman Konflik dalam Pilkada Serentak 2018*, (Online), (https://m.cnnindonesia.com, diakses pada 14 Agustus 2018).

Rayanto, Tavip Agus. 1998. *Manajemen Strategik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*, (Online), (https://journal.ugm.ac.id, diunduh pada 18 Januari 2018, pukul 19.30).

Salle, Agustinus. 2011. *Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Online), (http://ejournal.mkduncen.ac.id, diakes pada 14 Agustus 2018).

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.

Sofyan, Iban. 2015. *Teknik Penyusunan Manajemen Strategi Pemerintah dan Usaha*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Penerbit Erlangga.

Sufya, Dian Haya. 2013. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Atasan terhadap Komitmen Organisasi Karyawan PT. X*, (Online), (https://dinahayasufya.wordpress.com, diakses pada 14 Agustus 2018).

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suyoto. 2016. *Konsep dan Strategi Pemerintahan Terbuka Bojonegoro*, (Online). (http://opengovindonesia.org, diunduh pada 16 Desember 2017).

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Website Open Government Indonesia. *Bagaimana OGI Bekerja*, (Online), (https://opengovindonesia.org, diakses pada 23 Desember 2017).

Website Open Government Partnership. *What is Open Government Partnership*, (Online), (https://www.opengovpartnership.org, diakses pada 23 Desember 2017).